

# PERAN KELAS MENENGAH PADA PEREKONOMIAN INDONESIA



Fitrawaty  
Indra Maipita  
Wawan Hermawan



---

# **Peran Kelas Menengah Pada Perekonomian Indonesia**

**Fitrawaty**

**Indra Maipita**

**Wawan Hermawan**

*Character Building*  
UNIVERSITY

# PERAN KELAS MENENGAH PADA PEREKONOMIAN INDONESIA

Fitrawaty, Indra Maipita, Wawan Hermawan

Editor : Rangga Restu Prayogo

ISBN : 978-623-93261-3-5

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh :

The Higher Education Press

Kelompok Penerbit Sasanti Institute

Klaseman 4/38, Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik

Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Email : [highereducation1.press@gmail.com](mailto:highereducation1.press@gmail.com)



Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memproduksi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seijin tertulis dari penerbit.

Terbitan Pertama 2020

# Pengantar dari Penulis

Puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala berkah, rahmat dan hidayahNya, sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan.

Berbagai kajian dan bukti empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan kelas menengah dikaitkan dengan pemerintahan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Ncube et al, 2011). Kelas menengah semakin dianggap sebagai prasyarat terjadinya stabilitas pada struktur sosial ekonomi suatu negara (Nayab, 2011). Negara dengan pertumbuhan yang baik akan memiliki kelas menengah yang semakin banyak (Landes, 1998). Tiga alasan untuk mempertimbangkan bahwa kelas menengah penting bagi perekonomian, yaitu: (1) pengusaha baru, muncul dari kelas menengah yang menciptakan lapangan kerja dan kesempatan pertumbuhan untuk seluruh masyarakat, (2) kelas menengah dengan nilai-nilai yang kuat menekankan pada akumulasi modal manusia dan tabungan, (3) kelas menengah bersedia membayar sedikit tambahan untuk kualitas, dengan demikian akan mendorong investasi dalam produksi dengan kualitas yang lebih baik dan pemasaran yang kompetitif, yang memacu tingkat produksi yang lebih tinggi dan mengarah ke peningkatan pendapatan untuk semua orang (Bannerjee dan Duflo, 2007; Nayab, 2011).

Dengan adanya buku ini, diharapkan peran kelas menengah di Indonesia dapat lebih diketahui dengan baik terutama perannya terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor ekonomi/industri. Peta kelas menengah yang dihasilkan dalam penelitian dan disampaikan pada buku ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembangunan ekonomi.

Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelenggaraan dan penyelesaian penelitian ini. Kepada Lembaga Penelitian Unimed, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah mempercayai pelaksanaan penelitian ini dengan memberikan pendanaan sesuai dengan Surat Perjanjian Penelitian No.061A/UN33.8/KU/2015, Tanggal 10 Februari 2015. Teman-teman di FE Unpad, dan lainnya yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah

keilmuan dan pengembangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Bagian dari hasil penelitian ini juga telah dipublikasikan pada Jurnal Ekonomi Malaysia 52(3) 2018:3-16.

Atas segala rahmat dan karunia yang diperoleh hingga buku ini terwujud, penulis haturkan terimakasih, puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanawataala. Semoga buku ini bermanfaat buat kemaslahatan ummat.

Medan, Akhir Mei 2020.

Penulis,

[fitra53@gmail.com](mailto:fitra53@gmail.com)



## DAFTAR ISI

PENGANTAR DARI PENULIS.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang dan Masalah.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Pengertian dan Ukuran Kelas Menengah.....	10
2.2 Kurva Lorenz dan Koefisien Gini.....	11
2.3. Teknik Peramalan ( <i>Forecasting</i> ).....	13
2.4 <i>Input-Output</i> .....	13
2.5 Penelitian Sebelumnya.....	14
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>17</b>
3.1 Desain Penelitian.....	17
3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	20
3.3 Model Analisis.....	20
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
4.1 Profil Kelas Menengah di Indonesia.....	27
4.2 Pengaruh Kelas Menengah Terhadap Perekonomian.....	48
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>53</b>
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR INDEKS.....</b>	<b>93</b>

BAB

# 1

## Pendahuluan

---

**K**elas menengah telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan perekonomian, stabilitas social ekonomi, peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, dan banyak lainnya. Setidaknya demikian dari berbagai hasil kajian.

### 1.1. Latar Belakang dan Masalah

“Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur” merupakan visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250– USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0-4,5 triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil

sebesar 6,4 -7,5 persen pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0-9,0 persen pada periode 2015-2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011-2014 menjadi 3,0 persen pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju (MP3EI, 2011).

Harapan ini sesuai dengan trend pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus positif pasca krisis seperti diperlihatkan pada Gambar 1.1.

Harapan ini sesuai dengan trend pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus positif pasca krisis seperti diperlihatkan pada Gambar 1.1.

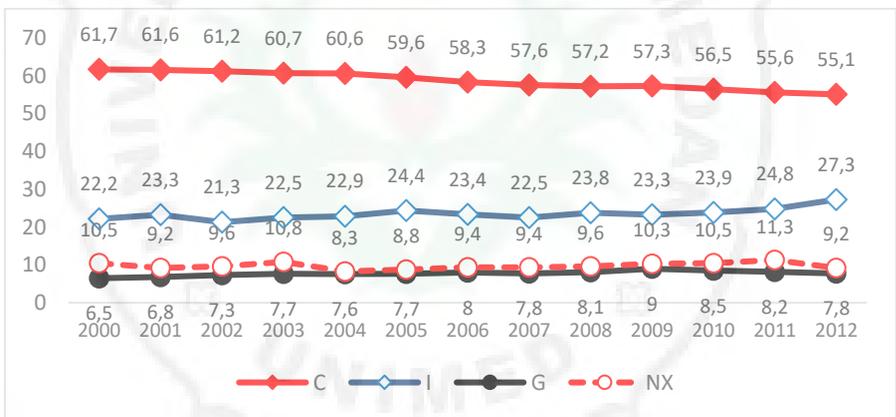


**Gambar 1.1.** Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam Persen (y-o-y; Harga Konstan 2000; Sumber: BPS berbagai tahun)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus terjaga di atas 5 persen sejak tahun 2004 tidak terlepas dari kontribusi komponen pengeluaran sektor rumah tangga yang tetap dominan atau di atas 50 persen dibandingkan dengan komponen pengeluaran dari pemerintah, sektor swasta dan permintaan luar negeri (Gambar 1.2).

Krisis global yang melanda dunia pada tahun 2005 dan 2008 telah memberikan dampak terhadap perekonomian global di mana terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju yang menjadi tujuan ekspor komoditas Indonesia. Krisis tahun 2008 sebagai contoh telah mempengaruhi perekonomian Indonesia yang diperlihatkan oleh nilai tukar rupiah yang terkoreksi tajam hingga mencapai Rp 10.900/US\$ pada penghujung tahun 2008 (Outlook Ekonomi Indonesia 2009-2014, Bank

Indonesia). Krisis ini berlanjut dengan terjadinya defisit transaksi berjalan dan transaksi modal yang diakibatkan oleh turunnya ekspor Indonesia akibat turunnya harga berbagai komoditas utama dunia. Meski demikian, perekonomian Indonesia secara umum tidak banyak terpengaruh. Jumlah penduduk Indonesia yang relatif banyak (no 4 di dunia) menjadi penangkal yang baik dalam meredam dampak krisis global tersebut. Jumlah penduduk besar menjadi pasar yang besar pula untuk penjualan produk. Tingginya penduduk Indonesia ini memberikan distribusi yang berbeda atas daya beli dari berbagai tingkat pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil pada kisaran 6% memberikan peningkatan kesejahteraan dengan ditunjukkan adanya kelas menengah pada sisi pendapatan yang semakin besar.



**Gambar 1.2.** Kontribusi Komponen Pengeluaran terhadap PDB Indonesia Tahun 2000-2012 (Sumber: BPS, Fitrawaty et al,2018)

Kelas menengah telah memainkan peran khusus dalam pemikiran ekonomi selama berabad-abad (Kharas, 2010). Kelas menengah mencerminkan kemampuan untuk menikmati kehidupan yang nyaman. Kelas menengah biasanya menikmati perumahan yang baik, kesehatan dan kesempatan pendidikan untuk anak-anak mereka, pensiun yang wajar dan keamanan kerja, serta pendapatan tambahan yang dapat dialokasikan untuk liburan dan rekreasi. Kelas menengah dianggap sebagai sumber kewirausahaan dan inovasi usaha kecil yang membuat ekonomi modern berkembang. Nilai-nilai kelas menengah juga menekankan pendidikan, kerja keras dan hemat. Dengan demikian, kelas menengah adalah sumber

dari semua masukan yang diperlukan untuk pertumbuhan, akumulasi modal fisik dan akumulasi modal manusia.

Kelas menengah di Indonesia akan dilihat berdasarkan kriteria pendapatan. Berdasarkan kriteria ini, Indonesia mempunyai PDB perkapita tahun 2012 mencapai 3.850 dolar AS yang telah membawa Indonesia masuk dalam jajaran negara dengan pendapatan menengah atas atau upper middle income countries. Pada sisi lain Bank Dunia juga memperkirakan telah terjadi lonjakan kelas menengah menjadi 56,5% pada tahun 2010 dibandingkan pada tahun 2000 hanya mencapai 20%.

Peningkatan golongan kelas menengah ini tentunya menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat. Kelas ini merupakan penyerap barang dan jasa di pasar dalam negeri dan pasar impor, sehingga bisa menggerakkan perekonomian domestik menjadi lebih bergairah sekaligus memberikan tekanan impor yang lebih kuat. Gaya konsumsi yang cukup tinggi untuk kelas ini, diikuti dengan banyaknya pendatang baru pada kelas ini akan memberikan perilaku konsumtif yang tinggi.

Fenomena menarik untuk kelas menengah di Indonesia, bahwa pada krisis global tahun 2005 dan tahun 2008 telah memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia, seperti kenaikan harga BBM pada tahun 2005 dan tahun 2008. Kenaikan BBM membuat perekonomian Indonesia terkoreksi. Namun, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6 persen Indonesia dijuluki the most stable economic growth in the world oleh majalah The Economist. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari dukungan kelas menengah.

Berbagai kajian telah mengaitkan pertumbuhan kelas menengah dengan pemerintahan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, prasyarat terjadinya stabilitas social ekonomi, tulang punggung perekonomian, penggerak pertumbuhan sector swasta dan sebagai prasyarat dari negara yang semakin maju (Drabble et al, 2015; Ncube et al, 2011; Nayab, 2011; Landes, 1998; Sokolof and Engerman, 2000; Birdsall et al, 2000; Ncube et al, 2011; Pressman, 2007; Kharas and Gertz, 2010). Kelas menengah sering diasosiasikan dengan kepemilikan bisnis, property, dan profesi yang baik (Beckett, 2010). Seseorang yang berasal dari kelas menengah lebih memungkinkan untuk mendapatkan akses

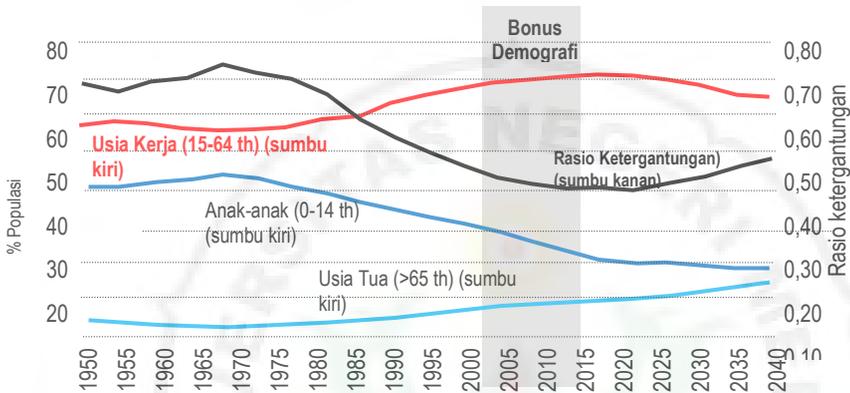
memperoleh pendidikan, dan keterampilan yang lebih baik untuk memulai bisnis (Boushey and Hersh, 2012).

Easterly (2001) dalam studinya menemukan bahwa negara dengan kelas menengah yang besar cenderung tumbuh lebih cepat, setidaknya dalam situasi homogenitas etnis. Kelas menengah di beberapa negara termasuk China dan Afrika merupakan sumber utama pertumbuhan sektor swasta (Ncube et al, 2011). Permintaan yang tinggi dari kelas menengah akan memicu peningkatan investasi, peningkatan produksi dan akhirnya peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan merupakan satu dari sedikit tujuan utama suatu negara (Maipita et.al, 2010; Maipita, 2013; Maipita, 2014), karena distribusi pendapatan penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Norris et al, 2015; Kanbur et al, 2014).

Tiga alasan untuk mempertimbangkan bahwa kelas menengah penting bagi perekonomian, yaitu: (1) pengusaha baru, muncul dari kelas menengah yang menciptakan lapangan kerja dan kesempatan pertumbuhan untuk seluruh masyarakat, (2) kelas menengah dengan nilai-nilai yang kuat menekankan pada akumulasi modal manusia dan tabungan, (3) kelas menengah bersedia membayar sedikit tambahan untuk kualitas, dengan demikian akan mendorong investasi dalam produksi dengan kualitas yang lebih baik dan pemasaran yang kompetitif, yang memacu tingkat produksi yang lebih tinggi dan mengarah ke peningkatan pendapatan untuk semua orang (Bannerjee dan Duflo, 2007; Nayab, 2011).

Di sisi lain, Indonesia sedang berada pada kondisi yang disebut dengan "bonus demografi". Rasio tingkat ketergantungan (*dependency ratio*) yang relatif kecil (MP3EI, 2011). Artinya pada saat ini hingga beberapa tahun ke depan (Gambar 1.3), Indonesia memiliki penduduk usia kerja yang besar dibanding dengan anak-anak dan usia tua. Meningkatnya penduduk usia kerja dapat meningkatkan jumlah rumah tangga kelas menengah yang akhirnya secara siklus menjadi input dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan (Maipita, 2014; 2016). Jumlah kelas menengah ini diyakini akan terus bertambah dengan pertumbuhan ekonomi yang mencukupi. Ketika pendapatan meningkat, maka pola belanja akan meningkat, mendorong berbagai pertumbuhan

diseluruh kategori konsumsi. Pertumbuhan kelas menengah dipandang sebagai konsekuensi langsung dari pertumbuhan ekonomi (Cárdenas et al, 2011; Drabble et al, 2015).



**Gambar 1.3.** Perkiraan Perkembangan Demografi Indonesia  
(Sumber: MP3EI, 2011)

Mengingat kondisi perekonomian dan masyarakat Indonesia saat ini yang diduga kuat memiliki kelas menengah relatif besar dan akan terus bertambah akibat bonus demografi yang akan terjadi. Selanjutnya, didasari pada Gambar 1.3 serta target pencapaian MP3EI yang telah dicanangkan pemerintah, maka dianggap sangat perlu untuk memetakan serta mengetahui dengan jelas peranannya terhadap kemajuan perekonomian Indonesia di masa datang. Dengan diketahuinya posisi dan peran tersebut, maka akan dapat menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah seperti penyusunan target pajak, pengentasan kemiskinan, perumahan, dan lainnya. Selain itu, juga dapat menjadi dasar untuk berbagai penelitian ekonomi lainnya, yang berkenaan dengan kesejahteraan, dan regional.

## 1.2. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan profil masyarakat ekonomi kelas menengah (middle class economic) di Indonesia, (2) meneliti bagaimana pengaruh kelas menengah terhadap perekonomian Indonesia. Output penelitian ini antara lain: (1) peta profil kelas menengah Indonesia

menurut provinsi dan nasional, (2) prediksi peran kelas menengah terhadap perekonomian Indonesia, (3) artikel yang diterbitkan di jurnal terakreditasi nasional, (4) artikel yang dimuat di jurnal internasional.



BAB

# 2

## Tinjauan Pustaka

---

**T**idak mudah untuk mendefinisikan kelas menengah, karena dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti: pendapatan, kekayaan, pendidikan, prestise, kepemilikan rumah, mobil, dan lainnya (Jose, 2016; Tarkhnishvili and Tarkhnishvili, 2013; Focus, 2010), tidak seperti defenisi kemiskinan dengan ambang batas yang jelas (Yuan et al, 2011). Tidak ada defenisi tunggal dari kelas menengah, namun upaya untuk mengidentifikasinya sering dikaitkan dengan tingkat pendapatan (Pressman, 2015). Pressman (2007) mendefinisikan kelas menengah (*middle class*) sebagai masyarakat yang berpenghasilan antara 75 hingga 150 persen dari pendapatan rata-rata. Kelemahan dari defenisi ini karena menciptakan rentang kelas menengah yang sangat luas (Dallinger, 2013).

---

## 2.1. Pengertian dan Ukuran Kelas Menengah

Istilah kelas menengah dapat didefinisikan secara relatif atau absolut (Kharas, 2010). Secara relatif, kelas menengah dapat diartikan sebagai masyarakat dengan kelompok pendapatan berada pada persentil ke-20 dan ke-80 dari distribusi konsumsi dan antara 0,75 hingga 1,25 kali rata-rata pendapatan per kapita (Easterly, 2000; Birdsall et al, 2000; Kharas, 2010; Bhalla, 2009; Ncube et al, 2011). ). Kelas menengah dapat juga disebutkan bagi masyarakat dengan pengeluaran per kapita sehari-hari antara USD2 hingga USD4 dan antara USD6 hingga USD10 (Banerjee and Duflo, 2007; Brulliad, 2010; Ncube et al, 2011). Ravallion (2009) mendefinisikan kelas menengah dengan mereka yang hidup diantara 2 hingga 13 dollar per hari.

Peneliti lain seperti Bhalla (2009) dalam Kharas (2010) menggunakan pendekatan absolut untuk mendefinisikan kelas menengah sebagai masyarakat yang memiliki pendapatan lebih dari USD3.900 per tahun (purchasing power parity, PPP). Banerjee dan Duflo (2007) serta Brulliad (2010) menggunakan dua ukuran untuk menentukan masyarakat kelas menengah, yaitu mereka dengan pengeluaran per kapita sehari-hari antara USD2 hingga USD4 dan antara USD6 hingga USD10 (Ncube et al, 2011).

Milanovic dan Yitzhaki (2002) mendefinisikan kelas menengah sebagai masyarakat dengan pendapatan rata-rata di Brasil dan Italia antara \$ 12 hingga \$ 50 per hari pada tahun 2000 (PPP). Blackburn dan Bloom (1985) mengidentifikasi kelas menengah sebagai rumah tangga dengan pendapatan per kapita antara 0,60 dan 2,25 kali pendapatan rata-rata di Inggris (Rashdan, 2014). Kingombe (2014) mendefinisikan kelas menengah yang stabil dengan pendapatan antara US\$4 sampai US\$20 per hari, sedangkan menurut kajian AfDB (2011) adalah orang dengan pengeluaran per hari antara US\$2 hingga US\$20 (PPP). EAGLEs (2013) mengelompokkan kelas menengah menjadi tiga kelompok, yaitu low middle class dengan pendapatan per kapita per tahun (PPP tahun 2010) sebesar US\$5.000-15.000, medium middle class antara US\$15.000-25.000, dan high middle class antara US\$25.000-40.000 (Fitrawaty et al, 2018).

Kharas (2010) dalam kajiannya menggunakan pendekatan absolut untuk mendefinisikan kelas menengah rumah tangga, yaitu rumah tangga dengan pengeluaran sehari-hari antara USD10 dan USD100 per orang dalam PPP.

Batas bawah dipilih dengan mengacu pada garis kemiskinan rata-rata di Portugal dan Italia, dua negara Eropa maju dengan definisi ketat dari kemiskinan, sedangkan batas atas dipilih sebagai dua kali pendapatan rata-rata dari Luxemburg, negara maju terkaya.

Ncube et.all (2011), mengkaji masyarakat di Afrika yang hidup dengan tingkat pengeluaran perkapita antara USD2-20 perhari. Kemudian dikelompokkan menjadi tiga sub kelas, yaitu kelas mengambang dengan tingkat konsumsi per kapita per hari antara USD 2-4, kelas menengah ke bawah dengan tingkat pengeluaran per kapita per hari USD 4-10 dan kelas menengah atas dengan tingkat pengeluaran perkapita perhari antara USD10-20.

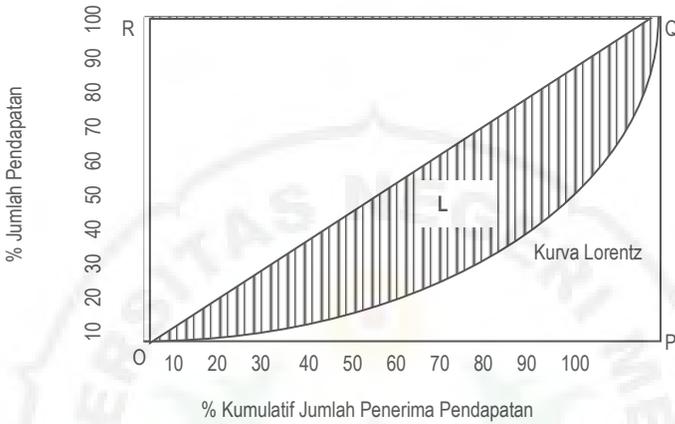
Secara umum, pendekatan yang sering digunakan dalam menentukan kelas menengah antara lain (Kharas, 2010): (a) pendekatan Pendapatan: *Middle class should be a person with higher and stable income*, (b) pendekatan Pekerjaan: *Middle class should be a person holding professional or managerial occupation*, (c) pendekatan Pendidikan: *Middle class should be a person with high education*, dan (d) pendekatan Konsumsi: *the consumptive behaviors and life-style of richer people*.

Hisao (1999), mengelompokkan enam kelas untuk masyarakat yang bisa disebut kelas dengan pendapatan menengah, yaitu: (a) Capitalist Class (Pengusaha yang mempekerjakan lebih dari 20 orang karyawan), (b) New Middle Class (professionals dan managers), (c) Old Middle Class (small owners), (d) Marginal Middle Class (routine workers), (e) Working Class (blue-collar workers), dan (f) Farmers.

## **2.2.Kurva Lorenz dan Koefisien Gini**

Kurva Lorenz memberikan gambaran yang lebih jelas dibanding kurva lainnya. Ini disebabkan sumbu horizontal dan vertikalnya tidak menggunakan logaritma tetapi nilai hitung biasa (*arithmetic scale*) sehingga tidak terjadi pengerutan, baik pada tingkat pendapatan rendah maupun tingkat pendapatan tinggi (Maipita, 2014).

Bentuk kurva Lorenz menunjukkan derajat ketidak merataan dalam



**Gambar 2.1.** Bentuk Kurva Lorenz (Sumber: Maipita, 2014)

distribusi pendapatan (Perkins, et.al, 2001). Dalam kondisi distribusi pendapatan merata secara sempurna, maka  $X$  persen dari jumlah penduduk akan menerima  $X$  persen dari jumlah pendapatan. Dalam kurva Lorenz, keadaan ini digambarkan sebagai garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas (OQ). Ini berarti, seluruh pendapatan keluarga akan sama dengan pendapatan rata-rata.

Jika  $X$  persen jumlah individu atau keluarga menerima kurang dari  $X$  persen pendapatan, maka kurva Lorenz akan menyimpang dari garis diagonal OQ memberat ke bawah menjadi OQ yang cekung (*concave*). Semakin tidak merata distribusi pendapatan maka kurva Lorenz akan semakin cekung (Todaro dan Smith, 2003).

Formula dari rasio konsentrasi Gini (*Gini concentration ratio*) atau koefisien Gini (*Gini coefficient*) diperlihatkan pada persamaan (2.1).

$$G = 2 \sum_{i=1}^k (P_i - Q_i)(P_i + P_{i-1}) \quad (2.1)$$

dengan:  $P_i$  merupakan persentase kumulatif jumlah keluarga atau individu hingga kelas ke- $i$ ,  $Q_i$  merupakan persentase kumulatif jumlah keluarga pendapatan hingga kelas ke- $i$  dan  $k$  adalah jumlah kelas pendapatan.

### 2.3. Teknik Peramalan (*Forecasting*)

Terdapat beragam teknik *forecasting* atas kemungkinan kejadian di masa depan. Teknik *forecasting* biasanya dipilih berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan ketersediaan data pendukung. Horizon waktu dalam *forecasting* juga merupakan dasar pemilihan metode. Untuk jangka pendek dan menengah, beberapa jenis metode dapat diaplikasikan, namun sejalan dengan makin panjangnya horizon waktu, makin sedikit teknik metode yang bisa diaplikasikan (Hanke et.al, 2002). Kriteria lain sebagai dasar pemilihan teknik *forecasting* adalah jenis data yang dimiliki. Terdapat empat (4) kriteria jenis pola data yang terdefinisi, yaitu: (a) data *Stationary*, (b) data *Trend*, (c) data *Seasonality*, dan (d) data *Cyclical*.

Dua faktor lain yang juga mendasari pemilihan teknik/metode *forecasting* adalah: (i) jenis model yang dipakai, dan (ii) jumlah data historis yang tersedia.

### 2.4. Input-Output

Tabel I-O menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa yang terjadi antar sektor produksi di dalam suatu ekonomi dengan bentuk penyajian berupa matriks (Tabel 2.1). Tabel I-O merupakan uraian statistik yang disajikan dalam bentuk matriks (BPS, 2009).

Kemampuan alat analisis ini untuk melihat keterkaitan (*linkages*) antar-sektor demi sektor dalam perekonomian hingga tingkat yang lebih rinci, menjadikan alat analisis ini digunakan dalam proses perencanaan pembangunan. Tabel I-O akan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang: (a) struktur perekonomian, mencakup struktur output dan nilai tambah masing-masing sektor, (b) struktur input antara, yaitu penggunaan berbagai barang dan jasa oleh sektor-sektor produksi, (c) struktur penyediaan barang dan jasa baik produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor, dan (d) struktur permintaan barang dan jasa, baik permintaan antara maupun permintaan akhir untuk konsumsi, investasi dan ekspor.

**Tabel 2.1.** Struktur Tabel Input Output

Struktur Input \ Alokasi Output	Sektor	Permintaan Antara						Permintaan Akhir	Jumlah Output
		1	2	.	.	.	n		
Input Antara	1	X <sub>11</sub>	X <sub>12</sub>	.	.	.	X <sub>1n</sub>	F <sub>1</sub>	X <sub>1</sub>
	2	X <sub>21</sub>	X <sub>22</sub>	.	.	.	X <sub>2n</sub>	F <sub>2</sub>	X <sub>2</sub>
	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	n	X <sub>n1</sub>	X <sub>n2</sub>	.	.	.	X <sub>nn</sub>	F <sub>n</sub>	X <sub>n</sub>
Input Primer		V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	.	.	.	V <sub>n</sub>		
Jumlah Input		X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	.	.	.	X <sub>n</sub>		

Sumber: Richardon (1972), Modifikasi

Tabel 1 dapat dituliskan dalam bentuk matriks:

$$X = (I - A)^{-1} F. \tag{2.2}$$

dengan  $(I - A)$  merupakan Matriks Leontief,  $(I - A)^{-1}$  adalah Matriks kebalikan Leontief (*multiplier output*),  $F$  adalah permintaan akhir yang bersifat eksogen, dan  $X$  adalah total output yang ditentukan dengan memasukkan berbagai nilai permintaan akhir,  $F$ .

## 2.5. Penelitian Sebelumnya

Chunling (2009) dalam kajiannya menggambarkan profil umum dari kelas menengah di China melalui tiga aspek, yaitu: (1) munculnya kelas menengah: dilihat dari latar belakang kelas menengah, definisi dan banyaknya kelas menengah; (2) komposisi kelas menengah, diperlihatkan dengan menunjukkan banyaknya masyarakat dengan tingkat pendapatan tertentu, dan (3) sikap sosial-politik kelas menengah, hal ini untuk menunjukkan bagaimana arah politik dari kelas menengah. Perekonomian di China tidak lepas dari peran kelas menengah dimana mereka adalah sebuah kelompok sosial dengan pendapatan, pendidikan, prestise dan kerja yang lebih tinggi. Kondisi ini telah membawa China menjadi negara yang mencengangkan semua orang dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. GDP China pada tahun 2006 58 kali lebih besar daripada tahun 1978

dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 13%.Pendapatan perkapita naik 34 kali pada tahun 2006 58 kali lebih besar daripada tahun 1978.Tingkat pendidikan tinggi naik dari tahun 1980-an ke 2000-an dari 1% ke 7% secara nasional dan dari 11% ke 17% di kota-kota. Hal ini terjadi karena pertumbuhan pekerja di sektor formal (*white-collar occupation*).

Jing (2010) dalam studinya menemukan bahwa keluarga kelas menengah China, terutama rumahtangga pasangan muda, menghadapi kesulitan ketika harga perumahan meningkat. Dengan naiknya harga perumahan, kebanyakan pasangan muda memilih untuk mengurangi pengeluaran lain seperti bahan makanan, mobil, dan aktivitas rekreasi. Sebahagian di antaranya yang berada di kota kembali ke kampung halaman. Karena biaya hidup yang lebih murah, mereka pun dapat menjaga gaya hidup di kelas menengah.

Nayab (2011) mengelompokkan kelas menengah menggunakan ukuran tertimbang dari lima faktor, yaitu: (1) pendidikan, (2) pekerjaan, (3) pendapatan, (4) gaya hidup, dan (5) perumahan. Pakistan diperkirakan memiliki kelas menengah sekitar 35 persen dari total penduduk. Menggunakan definisi tersebut, Pakistan memiliki kelas menengah yang lebih besar (dalam persentase) dibanding negara tetangganya seperti Sri Lanka, dan India. Kelas menengah di Pakistan sebenarnya telah berkembang dari waktu ke waktu dan relatif kurang rentan terhadap fluktuasi perekonomian. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah di Pakistan cenderung bertambah dari waktu ke waktu.

Ncube et.all (2011), mengkaji masyarakat di Afrika yang hidup dengan tingkat pengeluaran perkapita antara USD2-20 perhari. Kemudian dikelompokkan menjadi tiga sub kelas, yaitu kelas mengambang dengan tingkat konsumsi per kapita per hari antara USD 2-4, kelas menengah ke bawah dengan tingkat pengeluaran per kapita per hari USD 4-10 dan kelas menengah atas dengan tingkat pengeluaran perkapita perhari antara USD10-20.

Kajian ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam dua dekade terakhir telah membantu mengurangi kemiskinan di Afrika dan meningkatkan jumlah kelas menengah. Meskipun pertumbuhannya belum sangat kuat, namun tetap memberikan kontribusi yang besar pada peningkatan konsumsi domestik dan pertumbuhan sektor swasta di

banyak negara Afrika. Penjualan barang-barang seperti lemari es, televisi, ponsel, motor dan mobil telah meningkat di hampir setiap negara Afrika dalam beberapa tahun terakhir. Sebahagian besar konsumsi ini dilakukan oleh masyarakat kelas menengah. Dengan demikian, mereka turut mendorong pertumbuhan sektor swasta di Afrika.



## Metode Penelitian

---

**B**agian ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan, mulai dari desain, jenis dan sumber data yang digunakan, hingga model analisis dalam penelitian.

### 3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama satu tahun anggaran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini diperlihatkan pada desain operasional penelitian pada Gambar 4.1. Data tingkat pendapatan, dan pengeluaran diekstraksi dari data Susenas mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2012. Setiap variabel dideskripsikan dengan menunjukkan perubahan tiap tahun, mengacu pada berbagai tingkat pendapatan rumah tangga. Data tingkat pendapatan akan diurutkan menurut tingkat besarnya dan

---

dikelompokkan dalam persentil. Selanjutnya akan dibangun kurva Lorenz dan menghitung indeks ketimpangan dari setiap kelompok.

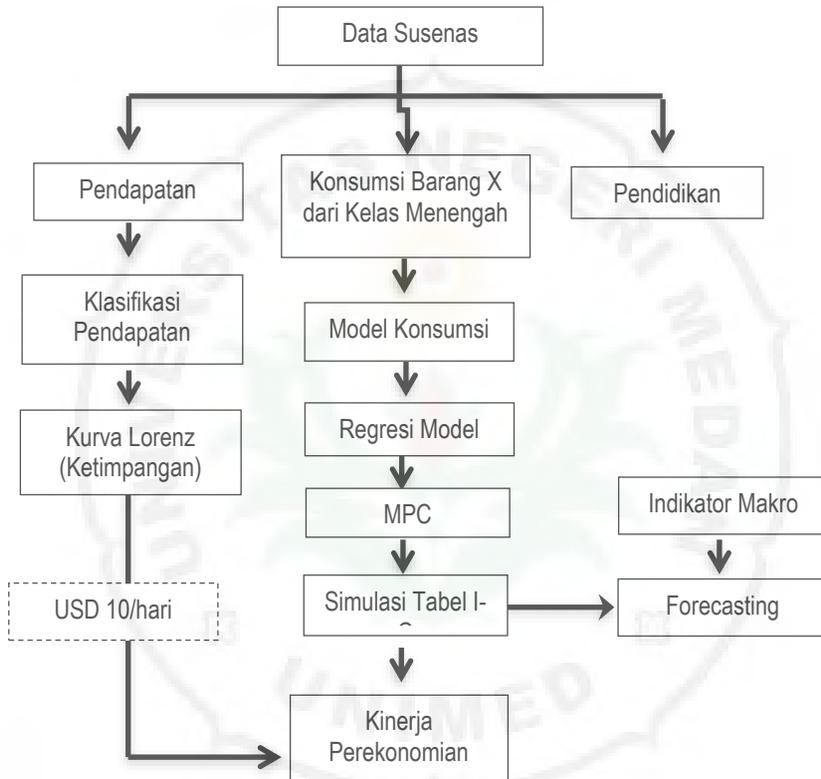
Kelas menengah dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan tiga kriteria (tiga jenis), yaitu: (1) penetapan kelas menengah mengikut Karas (2010), mendefinisikan kelas menengah rumahtangga yang memiliki pengeluaran antara USD10-USD100 per individu per bulan; (2) Kriteria kedua untuk pengelompokkan kelas menengah dibuat dengan kriteria 60 persen pendapatan di tengah atau antara persentil 20 dan persentil 80 (Easterly, 2000; Birdsall et al, 2000; Kharas, 2010; Bhalla, 2009; Ncube et al, 2011); (3) kriteria terakhir yang dihitung pada penelitian ini adalah kriteria dari World Bank yang membagi pendapatan rumahtangga kedalam kelompok 4-4-2, atau 40 persen kelas bawah, 40 persen kelas menengah dan 20 persen kelas dengan pendapatan tinggi. Kelompok 40 persen di tengah disebut dengan kelas menengah.

Tingkat konsumsi untuk kelas menengah (yang diperoleh dari Susenas) akan diolah, diestimasi dan dianalisis lebih lanjut untuk melihat perilaku konsumsi mereka atas berbagai barang utama yang diklasifikasikan terhadap barang dan jasa. Menggunakan model konsumsi Keynes, dilakukan estimasi dengan regresi. Hasil regresi ini akan menjelaskan perilaku konsumsi bagi rumahtangga kelas menengah. Perilaku ini akan tergambarkan dari koefisien *Marginal Propensity to Consume* (MPC) untuk setiap tahun yang diteliti.

Selanjutnya, koefisien atau data MPC yang diperoleh dari hasil regresi, ditambah dengan data indikator ekonomi makro, digunakan sebagai bahan simulasi dengan tabel Input-Output (I-O). Tentu saja tabel I-O yang dimaksud harus dibangun (disusun) sebelumnya berdasarkan perubahan koefisien teknologi untuk setiap tahun. Selain untuk mendapatkan informasi dari perubahan konsumsi rumah tangga, simulasi ini juga berfungsi untuk mendapatkan informasi perubahan pengeluaran pemerintah, Investasi dan Net Ekspor dari hasil *forecasting* indikator makro ekonomi.

Hasil simulasi juga akan memberikan perubahan output yang menghasilkan perubahan Produk Domestik Bruto (PDB). Perubahan PDB menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang akan dijelaskan berdasarkan tiap sektor, sehingga menunjukkan perubahan kinerja perekonomian.

Berdasarkan definisi di atas, akan dibuat besaran kelas menengah di Indonesia berdasarkan provinsi dan membuat Kurva Lorenz untuk menghasilkan parameter distribusi pendapatan.



**Gambar 3.1.** Desain Penelitian

Rata-rata dari distribusi ini disesuaikan untuk mencerminkan konsumsi rumah tangga yang diberikan dalam perhitungan pendapatan nasional untuk masing-masing provinsi. Parameter ini digunakan untuk memperkirakan jumlah orang yang ada di kisaran pendapatan kelas menengah. Selanjutnya membuat proyeksi untuk ukuran kelas menengah masing-masing provinsi.

## 3.2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, terdiri dari data Susenas tahun 2011 dan tahun 2012 untuk level individu dan rumah tangga. Tabel Input-Output yang digunakan adalah Tabel Publikasi BPS terakhir yaitu untuk tahun 2008. Sektor yang ada sebanyak 66 sektor yang nanti akan digunakan sebagai model keseimbangan umum pada saat melakukan simulasi.

## 3.3. Model Analisis

### 3.3.1. Model Konsumsi

Untuk memperoleh pola konsumsi (kecenderungan mengkonsumsi) dari rumah tangga kelas menengah, digunakan model regresi terhadap fungsi konsumsi Keynes. Melalui fungsi ini kita bisa melihat bagaimana keseimbangan pendapatan nasional terjadi dari sisi pengeluaran dan pendapatan.

Fungsi konsumsi dan tabungan dapat digambarkan secara sederhana melalui fungsi linear, yaitu:

$$C = a + MPC Y \quad (3.1)$$

$$S = -a + (1 - MPC) Y \quad \text{atau} \quad S = -a + MPS Y \quad (3.2)$$

Dengan  $C$  adalah konsumsi dari masyarakat,  $Y$  adalah pendapatan,  $a$  merupakan kontanta yang selalu positif dan lebih besar dari nol, ( $MPC$  adalah *Marginal Propensity to Consume*).

Misal, masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa ( $x_1$  dan  $x_2$ ) dengan tingkat pendapatan sebesar  $y$  dan harga dari masing-masing barang adalah  $p_1$  dan  $p_2$  yang ditunjukkan oleh tingkat indeks harga. Maka untuk mengetahui bagaimana permintaan barang dan jasa yang dilakukan oleh kelas menengah diuraikan sebagai berikut.

$$\text{Cobb-Douglas Utility Function: } \max U(x_1, x_2) \quad Ax_1x_2 \quad (3.3)$$

$$\text{Dengan generic budget constraint: } p_1x_1 + p_2x_2 = y \quad (3.4)$$

Menggunakan Lagrangian, maka diperoleh *Marshallian Demand Function* sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 x_2 &= \frac{(1 - p_2)y}{p_2} \text{ atau } \ln x_2 = \ln(1 - p_2)y - \ln p_2 \\
 x_1 &= \frac{y}{p_1} \text{ atau } \ln x_1 = \ln y - \ln p_1
 \end{aligned}
 \tag{3.5}$$

Model di atas digunakan untuk mengetahui permintaan dari tiap tingkat pendapatan atas barang dan jasa dalam perekonomian.

### 3.3.2. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan atau ketimpangan dalam penelitian ini diukur menggunakan kurva Lorenz dan Koefisien Gini menggunakan persamaan (3.6).

$$KG = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - X_{i-1})(Y_i + Y_{i-1})}{\sum_{i=1}^n (X_i - X_{i-1})(Y_i + Y_{i-1})}
 \tag{3.6}$$

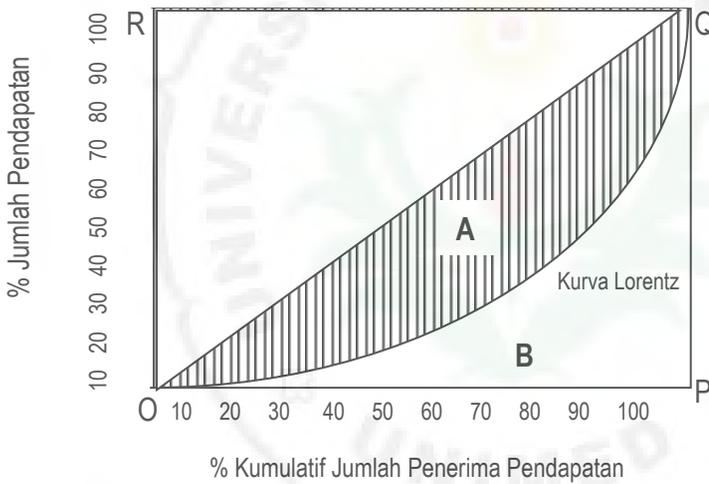
dengan:  $KG$  adalah angka Koefisien Gini,  $X_i$  adalah proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas  $i$ , dan  $Y_i$  adalah proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas  $i$ .

Koefisien Gini secara luas digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan. Koefisien Gini, merupakan perbandingan antara garis pemerataan dengan kurva Lorenz seperti diperlihatkan pada Gambar 3.2. Kurva Lorenz memberikan gambaran yang lebih jelas dibanding kurva lainnya. Ini disebabkan sumbu horizontal dan vertikalnya tidak menggunakan logaritma tetapi nilai hitung biasa (*arithmetic scale*) sehingga tidak terjadi pengerutan, baik pada tingkat pendapatan rendah maupun tingkat pendapatan tinggi.

Bentuk kurva Lorenz menunjukkan derajat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan. Dalam kondisi distribusi pendapatan merata secara sempurna, maka  $X$  persen dari jumlah penduduk akan menerima  $X$  persen dari jumlah pendapatan. Misalnya 40 persen jumlah penduduk atau penerima pendapatan harus menerima 40 persen dari total pendapatan yang ada.

Dalam kurva Lorenz, keadaan ini digambarkan sebagai garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas ( $OQ$ ). Ini berarti, seluruh pendapatan keluarga akan sama dengan pendapatan rata-rata.

Jika  $X$  persen jumlah individu atau keluarga menerima kurang dari  $X$  persen pendapatan, maka kurva Lorenz akan menyimpang dari garis diagonal  $OQ$  memberat ke bawah menjadi  $OQ$  yang cekung (*concave*). Semakin tidak merata distribusi pendapatan maka kurva Lorenz akan semakin cekung (Maipita, 2014).



**Gambar 3.2.** Bentuk Kurva Lorenz

Pengukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang diarsir ( $A$ ) dibagi dengan luas segitiga  $OPQ$  ( $B$ ). Rasio ini dikenal dengan rasio konsentrasi Gini (*Gini concentration ratio*) yang sering disebut dengan koefisien Gini (*Gini coefficient*). Ada beberapa cara untuk mengukur koefisien Gini (Charles, 2011), beberapa di antaranya diuraikan berikut ini.

### 3.3.3. Simulasi Dengan I-O

Multiplier output diperoleh dari matrik kebalikan Leontief seperti pada persamaan (2.2). Sedangkan multiplier pendapatan diperoleh menggunakan persamaan (3.7).

$$M_{INC} = \hat{W} (I - A)^{-1} \quad (3.7)$$

Dengan  $M_{INC}$  adalah multiplier pendapatan,  $\hat{W}$  merupakan matriks diagonal koefisien NTB yang diperoleh dari  $\hat{W} = \frac{U_j}{X_j}$ , dan  $(I - A)^{-1}$

adalah matriks kebalikan Leontief. Sesuai dengan asumsi dasar model IO, maka hubungan antara NTB dengan output bersifat linier seperti diperlihatkan pada persamaan (3.8).

$$M_{NTB} = \hat{V} (I - A)^{-1} \quad (3.8)$$

dengan  $M_{NTB}$  adalah multiplier NTB,  $\hat{V}$  merupakan matriks diagonal koefisien NTB yang diperoleh dari  $\hat{V} = \frac{V_j}{X_j}$ .

Selanjutnya, simulasi dapat dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada permintaan akhir. Dampak suatu perubahan permintaan akhir terhadap penciptaan output, pendapatan, penciptaan nilai tambah bruto dan kebutuhan akan tenaga kerja diperlihatkan pada persamaan (3.9) hingga (3.12).

dampak perubahan permintaan akhir terhadap penciptaan output:

$$Output = M_{out} F \quad (3.9)$$

dampak perubahan permintaan akhir terhadap pendapatan:

$$INC = M_{INC} F \quad (3.10)$$

dampak perubahan permintaan akhir terhadap penciptaan nilai tambah bruto:

$$NTB = M_{NTB} F \quad (3.11)$$

dampak perubahan permintaan akhir terhadap kebutuhan tenaga kerja:

$$TK \quad M_{TK} \quad F \quad (3.12)$$

### 3.3.4. Model Peramalan (*Forecasting*)

Berdasarkan profil dari masyarakat kelas menengah dan perilaku konsumsi yang digambarkan oleh fungsi konsumsinya, maka dilakukan peramalan atas perekonomian dan peran dari kelas menengah terhadap perekonomian Indonesia. Untuk tujuan peramalan berbagai variabel makro Indonesia, maka digunakan metode atau teknik *Double Exponential Smoothing*. Pertimbangan-pertimbangan utama yang mendasari pemilihan ini adalah: (a) Data *time series*, kontribusi dan pertumbuhan sektoral/subsektoral di Indonesia, berdasarkan ciri-cirinya dapat digolongkan dalam kategori data stationer atau data trend, (b) Horizon waktu yang ingin dibuat peramalannya adalah jangka pendek dan menengah.

Formula untuk melakukan metode *Double Exponential Smoothing* diuraikan berikut ini.

Tahap awal dilakukan regresi dari variabel yang akan diramalkan terhadap waktu.

$$\hat{Y}_{t+1} = a_t + b_t T \quad (3.13)$$

Dengan  $\hat{Y}_{t+1}$  adalah ramalan pada periode akan datang,  $a_t$  adalah *intercept*,  $b_t$  adalah koefisien tren, dan  $T$  merupakan Periode waktu. Kemudian dilakukan penyesuaian untuk parameter  $a$  dan  $b$ .

$$a_t = \frac{2S_t - S_t^2}{S_t - S_t^2} : \text{intercept yang disesuaikan} \quad (3.14)$$

$$b_t = \frac{S_t - S_t^2}{1} : \text{koefisien tren yang disesuaikan}$$

$$(3.15)$$

merupakan bobot,  $S_t$  dan  $S_t^2$  merupakan *single* dan *double* statistik yang dihaluskan berdasarkan pada persamaan berikut:

$$S_t = \sum_{i=1}^t Y_i \quad S_{t+1} = S_t + Y_{t+1} \quad (3.16)$$

$$S_t^2 = S_t + 1 - S_{t-1}^2 \quad (3.17)$$

Tahap awal dalam melakukan metode *Double Exponential Smoothing* adalah menentukan peramalan pertama dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$s_0 = a + \frac{1}{2}b \quad (3.18)$$

$$s_0^2 = a + 2 \frac{1}{2}b \quad (3.19)$$

dimana  $a$  dan  $b$  merupakan parameter dari regresi variabel yang akan diramalkan terhadap waktu. Hal yang penting dilakukan dalam metode ini adalah menentukan  $\alpha$  untuk dijadikan bobot dalam penggunaan model forecasting. Penentuan  $\alpha$  dilakukan dengan iterasi pada berbagai tingkat  $\alpha$  dengan rentang pada  $0 < \alpha < 1$ .



## Hasil & Pembahasan

---

**P**ada bagian ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang dilakukan serta pembahasannya. Dimulai dari gambaran profil kelas menengah di Indonesia berdasarkan empat kriteria yang telah ditetapkan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan ketimpangan yang terjadi pada kelas menengah untuk masing-masing kriteria. Terakhir adalah membahas bagaimana dampak kenaikan pendapatan kelas menengah terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan sektor ekonomi/industry.

### 4.1. Profil Kelas Menengah di Indonesia

Berikut ini akan diuraikan profil kelas menengah di Indonesia berdasarkan ketiga kriteria yang digunakan dalam penelitian ini. Kriteria tersebut adalah berdasarkan: (1) penetapan kelas menengah mengikut Karas (2010), mendefinisikan kelas menengah rumah tangga yang memiliki pengeluaran antara USD10-USD100 per kapita per hari; (2) Kriteria kedua untuk pengelompokan kelas menengah dibuat dengan kriteria 60 persen pendapatan di tengah atau antara persentil 20 dan persentil 80 (Easterly, 2000; Birdsall et al, 2000; Kharas, 2010; Bhalla, 2009; Ncube et al, 2011); (3) kriteria terakhir yang dihitung pada penelitian ini adalah kriteria dari

---

World Bank yang membagi pendapatan rumah tangga kedalam kelompok 4-4-2, atau 40 persen kelas bawah, 40 persen kelas menengah dan 20 persen kelas dengan pendapatan tinggi. Kelompok 40 persen di tengah disebut dengan kelas menengah.

#### 4.1.1. Kelas Menengah Berdasarkan Pendapatan antara USD10 - USD100

Kharas (2010) mendefinisikan kelas menengah sebagai rumahtangga yang memiliki pengeluaran antara USD10 sampai dengan USD 100. Cara pengelompokan ini dirasakan kaku karena mematok pengeluaran setiap rumah tangga berdasarkan nilai USD. Implikasi dari penggunaan cara ini bahwa penyesuaian nilai rupiah terhadap USD harus dilakukan terlebih dahulu. Dampak yang dapat diduga bahwa adanya kecenderungan kenaikan nilai nominal rupiah terhadap satu dolar Amerika Serikat selama kurun waktu penelitian. Dengan kata lain adanya kecenderungan penurunan nilai rupiah terhadap USD, sehingga nominal rupiah terhadap USD semakin meningkat. Kecenderungan atas kenaikan nilai nominal rupiah terhadap USD ini juga diikuti dengan tingkat inflasi yang selalu positif sepanjang waktu penelitian. Tabel 4.1 menunjukkan bagaimana kecenderungan dari terus melemahnya nilai rupiah terhadap USD.

Berdasarkan Tabel 4.1, dilakukan konversi terhadap pengeluaran rata-rata rumahtangga dari tahun 2004-2012. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran individu dari tahun 2004-2012.

**Tabel 4.1.** Nilai Kurs Rupiah Terhadap USD

Tahun	Nilai Rupiah Terhadap USD	
	Akhir Tahun	Rata-rata
2004	9,290.00	8,938.85
2005	9,830.00	9,704.74
2006	9,020.00	9,159.32
2007	9,419.00	9,141.00
2008	10,950.00	9,698.96
2009	9,400.00	10,389.90
2010	8,991.00	9,090.43
2011	9,718.00	9,670.00
2012	9,113.00	9,068.00

Sumber: Asian Development Bank: Key Indicators for Asia and the Pacific 2011-2012

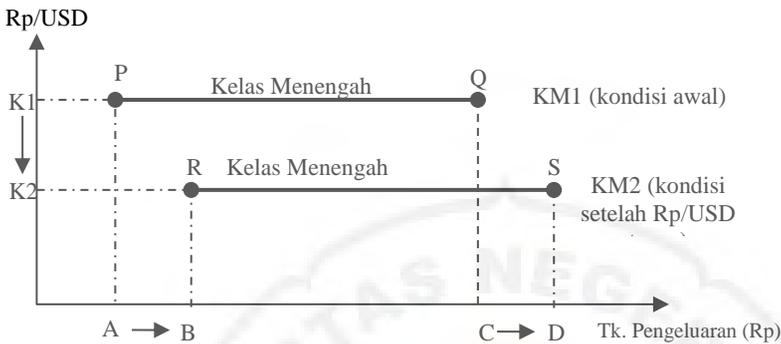
Tahun 2008 menunjukkan pertumbuhan yang relatif rendah seiring terjadinya krisis ekonomi dunia yang juga berimbas pada perekonomian Indonesia. Walaupun begitu, selama enam tahun terjadi kenaikan hampir dua kali lipat untuk pengeluaran rata-rata individu kelas menengah yang tergolong pada pengeluaran antara 10USD-100USD.

**Tabel 4.2.** Rata-rata dan Pertumbuhan Rata-rata Kelas Menengah Berdasarkan Kriteria USD

Tahun	Rata-rata (USD)	Pertumbuhan (%)	Rasio Observasi (%)	Rasio Rata-rata (%)
2004	24.65		91.42	98.41
2005	26.97	9.39	90.41	92.12
2006	31.22	15.79	95.53	89.68
2007	35.17	12.63	93.91	85.12
2008	35.27	0.29	93.87	85.34
2009	36.22	2.70	93.63	83.94
2010	44.18	21.96	87.82	75.35
2011	46.95	6.29	82.62	66.44
2012	47.02	0.14	82.44	65.32

Sumber : Hasil Perhitungan

Seperti disampaikan sebelumnya, kelemahan cara ini adalah adanya kekakuan untuk ukuran kelas menengah karena mematok pada nilai dalam USD. Semakin tinggi kurs Rp/USD atau semakin rendah nilai rupiah terhadap USD, maka dengan jumlah rupiah yang sama (tetap), nilai dalam USD akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, terjadinya fluktuasi nilai kurs seperti pada Tabel 5.1 menyebabkan terjadinya pergeseran terhadap kelompok yang masuk dalam kelas menengah. Artinya, diperlukan rupiah yang lebih banyak agar tetap setara dengan USD semula. Individu (rumah tangga) yang memiliki pengeluaran sedikit di atas batas bawah (USD10) pada tahun 2004 dikatakan masuk dalam kelas menengah, namun dengan pendapatan yang sama (tetap) pada tahun 2005 dapat saja tidak lagi masuk dalam kelompok kelas menengah karena adanya penurunan nilai rupiah terhadap USD. Akibat dari penurunan nilai tukar ini maka cakupan terhadap observasi semakin lebar (bergeser ke atas). Sebagai ilustrasi, dapat dilihat pada Gambar 4.1.



**Gambar 4.1.** Ilustrasi Pergeseran Kelas Menengah Akibat Perubahan Nilai Tukar (Sumber: Maipita et al, 2016; Maipita and Wahyudi, 2017, Fitriawaty et.al, 2018)

Pada tingkat nilai tukar rupiah terhadap USD sebesar  $K_1$ , kelas menengah berada sepanjang  $PQ$ . Kelompok ini berada pada tingkat pengeluaran sebesar  $AB$  (misalkan  $A$  setara dengan USD10, dan  $B$  setara dengan USD100). Ketika nilai tukar rupiah terhadap USD menurun dari  $K_1$  menjadi  $K_2$ , maka nilai  $A$  yang semula setara dengan USD10 akan menjadi kurang dari USD10. Dengan kata lain, diperlukan nominal rupiah yang lebih banyak dari  $A$  agar nilainya tetap setara dengan USD10. Misalkan rupiah yang diperlukan saat ini sebesar  $B$ . Dengan demikian terjadi pergeseran batas bawah dari kelas menengah dari semula di titik  $A$  menjadi titik  $B$ . Demikian juga halnya dengan batas atas. Diperlukan lebih banyak rupiah untuk setara dengan USD100, sehingga batas atas kelas menengah dalam rupiah bergeser dari  $C$  ke  $D$ . Konsekuensi dari penurunan nilai tukar ini bahwa kelompok kelas menengah menjadi bergeser dari semula  $PQ$  menjadi  $RS$ .

Dilihat dari proporsi kelas menengah terhadap populasi (Tabel 4.2), relatif besar. Kurun Waktu penelitian, proporsi kelas menengah terhadap populasi mencapai rata-rata 92,37 persen. Bahkan bila dilihat dari rasio antara rata-rata kelas menengah dengan rata-rata seluruh sampel menunjukkan angka pada kisaran 87 persen. Oleh karena itu, cara ini tidak terlalu menunjukkan kejelasan atas peran dari kelas menengah karena kelas pendapatan rendah dan pendapatan atas menjadi sangat kecil porsinya.

Bila kita lihat lebih lanjut menurut provinsi, sebaran dari kelas menengah menurut provinsi secara lengkap diperlihatkan pada Lampiran 1. Tabel pada lampiran ini menunjukkan bahwa kurun waktu 2004-2009, rata-rata jumlah kelas menengah menurut provinsi mencapai di atas 90 persen, bahkan pada tahun 2006 mencapai 95.027 persen. Kemudian memurun pada tahun 2010 menjadi sebesar 86,231 persen (Tabel 4.3; ringkasan Lampiran 1). Hal ini berarti bahwa dengan menggunakan pengelompokan kelas menengah berdasarkan kriteria USD, maka jumlah kelas menengah di Indonesia kurun waktu penelitian rata-rata mencapai lebih dari 90 persen untuk setiap provinsi. Lima provinsi dengan persentase kelas menengah tertinggi dan terendah diperlihatkan pada Tabel 4.3.

Besarnya rata rata-rata pengeluaran kelas menengah dalam USD menurut provinsi (peta kelas menengah menurut provinsi) diperlihatkan pada Lampiran 3. Secara nasional, rata-rata pengeluaran kelas menengah berada pada rentang USD25,622 hingga USD 61,010 selama kurun waktu penelitian. Data ini juga memperlihatkan bahwa ada trend peningkatan pengeluaran rata-rata kelas menengah secara nasional dari tahun 2004 hingga 2010.

**Tabel 4.3.** Persentase Kelas Menengah terhadap Total Populasi Menurut Provinsi (5 Terbesar dan Terkecil)

Rank	Provinsi	Persentase/Tahun						
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Lampung	84.347	87.356	96.561	94.302	96.765	96.105	94.960
2	SulBar	-	-	94.769	96.409	97.302	97.527	94.444
3	JaTeng	92.823	91.883	97.409	96.455	96.506	97.092	94.225
4	JaTim	91.526	90.064	96.447	95.487	96.108	96.589	93.967
5	NTT	72.379	67.132	88.232	92.013	92.331	93.548	93.563
...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	BaBel	97.737	95.750	96.386	93.445	91.117	89.811	79.697
30	PaBar	-	-	96.482	92.326	93.750	91.423	78.719
31	KalTim	94.703	93.390	91.351	89.296	87.230	82.792	71.889
32	Kep. Riau	-	92.248	91.440	84.807	85.039	84.190	68.326
33	DKI Jakarta	91.126	86.154	81.250	77.012	73.367	71.813	56.820
	<b>Rata-rata</b>	<b>91.554</b>	<b>90.268</b>	<b>95.027</b>	<b>93.589</b>	<b>93.570</b>	<b>93.158</b>	<b>86.231</b>

Sumber: Lampiran 1

**Tabel 4.4.** Rata-rata Pengeluaran Kelas Menengah Secara Nasional Berdasarkan kriteria USD

Nasional	Tahun						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	25.662	29.521	35.372	41.457	43.388	45.116	61.010

Sumber: Lampiran 3

Perkembangan pengeluaran individu kelas menengah dari diperlihatkan pada Tabel 4.5. Kurun waktu 2004-2012, tingkat pengeluaran rata-rata kelas menengah terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 8,65 persen per tahun. Selama sembilan tahun masa observasi, tingkat pengeluaran naik hampir dua kali lipat hingga pada tahun 2012, sehingga daya beli kelas ini menunjukkan kinerja pendapatan yang tinggi. Tingkat pertumbuhan pengeluaran terendah terjadi pada tahun 2008 dan 2012. Hal ini merupakan imbas dari krisis ekonomi global.

**Tabel 4.5.** Pengeluaran Minimum, Maksimum dan Rata-rata Kelas Menengah Kriteria USD (USD/bulan)

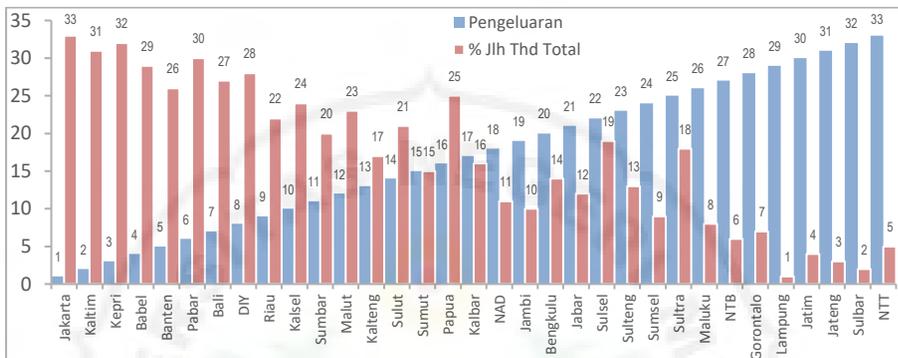
Tahun	Minimum	Pert (%)	Maksimum	Pert (%)	Rata-rata	Pert (%)
2004	10.00		99.98		24.65	
2005	10.00	0.00	99.99	0.01	26.97	9.39
2006	10.00	0.00	100.00	0.00	31.22	15.79
2007	10.00	0.01	99.98	-0.02	35.17	12.63
2008	10.00	-0.02	100.00	0.02	35.27	0.29
2009	10.00	0.01	100.00	-0.00	36.22	2.70
2010	10.00	0.01	100.00	0.00	44.18	21.96
2011	10.01	0.05	100.00	0.00	46.95	6.29
2012	10.16	1.56	100.00	0.00	47.02	0.14
<b>Rata-Rata</b>	<b>10.02</b>	<b>0.21</b>	<b>99.99</b>	<b>0.00</b>	<b>36.40</b>	<b>8.65</b>

Sumber: Susenas, data diolah

Rata-rata pengeluaran kelas menengah mencerminkan daya beli dari kelas menengah itu sendiri. Besarnya rata-rata pengeluaran kelas menengah dalam USD untuk masing-masing provinsi diperlihatkan pada Lampiran 3. Untuk mengetahui provinsi mana yang memiliki kelas menengah dengan daya beli tertinggi maka data pada Lampiran 3 dapat di-ranking seperti pada Lampiran 4.

Pada tahun 2009-2010, kelas menengah di provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata tingkat pengeluaran (daya beli) paling tinggi dibanding dengan kelas menengah pada provinsi lain, diikuti dengan provinsi Kalimantan Timur, Kepri dan Bangka Belitung. Namun bila dilihat dari banyaknya individu kelas menengah yang ada pada provinsi tersebut dibanding dengan total populasinya, maka berkebalikan. Lebih jelas situasi ini diperlihatkan pada Gambar 4.2. Pada tahun 2010, kelas menengah dengan tingkat daya beli tertinggi berada pada provinsi DKI Jakarta (peringkat 1). Namun di sisi lain, DKI Jakarta memiliki persentase kelas menengah terendah di banding dengan provinsi lain (peringkat 33). Sementara itu, provinsi Lampung memiliki persentase kelas menengah tertinggi, namun

daya belinya rendah (peringkat 29). Hal ini mengindikasikan terjadi ketimpangan daya beli (pendapatan/pengeluaran) antara kelas menengah antar provinsi.



**Gambar 4.2.** Ranking Rata-rata Terbesar Pengeluaran Kelas Menengah dan Persentase Jumlah Kelas Menengah Terhadap Total Populasi Menurut Provinsi Tahun 2010 (sort by 2010)

Gambar 4.2 memperlihatkan bahwa kelas menengah dengan dengan rata-rata daya beli yang rendah banyak terdapat di wilayah Indonesia Timur seperti, provinsi Nusa Tenggara Timur ,Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan lainnya.

#### 4.1.2. Kelas Menengah Berdasarkan Kriteria 60 Persen di Tengah (antara Persentil 20 dan 80)

Kriteria kedua untuk pengelompokan kelas menengah dibuat dengan kriteria 60 persen pendapatan di tengah atau antara persentil 20 dan persentil 80 (Easterly, 2000; Birdsall et al, 2000; Bhalla, 2009; Ncube et al, 2011).

Sesuai dengan kriteria ini, maka besarnya kelas menengah adalah 60 persen dari total penduduk baik tingkat nasional, maupun tingkat provinsi. Oleh karena itu, dibanding dengan kriteria sebelumnya (USD), jumlah kelas menengah menurut kriteria jauh lebih sedikit (bandingkan dengan data pada Tabel 53, rata-rata jumlah kelas menengah mencapai di atas 90 persen dari total populasi).

Perkembangan pengeluaran individu kelas menengah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 diperlihatkan pada Tabel 5.6. Kurun waktu 2004-2012, tingkat pengeluaran rata-rata kelas menengah terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 13,82 persen per tahun. Selama sembilan tahun masa observasi, tingkat pengeluaran naik lebih dari dua kali lipat hingga pada tahun 2010, sehingga daya beli kelas ini menunjukkan kinerja pendapatan yang tinggi, meskipun kemudian mengalami penurunan. Tingkat pertumbuhan pengeluaran terendah terjadi pada tahun 2008. Hal ini merupakan imbas dari krisis ekonomi global.

**Tabel 4.6.** Pengeluaran Minimum, Maksimum dan Rata-rata Kelas Menengah Kriteria 60 persen (Rupiah/bulan)

Tahun	Minimum	Pert (%)	Maksimum	Pert (%)	Rata-rata	Pert (%)
2004	117,696.40		283,422.50		182,342.20	
2005	131,350.00	11.60	359,863.30	26.97	215,568.60	18.22
2006	160,241.70	22.00	409,832.20	13.89	254,099.20	17.87
2007	176,696.00	10.27	498,036.10	21.52	297,310.60	17.01
2008	188,512.10	6.69	523,342.30	5.08	316,662.50	6.51
2009	214,934.10	14.02	578,638.10	10.57	351,977.50	11.15
2010	238,413.70	10.92	712,412.50	23.12	419,405.10	19.16
2011	266,079.10	11.60	837,414.30	17.55	477,915.20	13.95
2012	288,238.10	8.33	890,959.60	6.39	509,897.70	6.69
<b>Rata-Rata</b>	<b>198,017.91</b>	<b>11.93</b>	<b>565,991.21</b>	<b>15.64</b>	<b>336,130.96</b>	<b>13.82</b>

Sumber : Susenas, data diolah

Pertumbuhan pendapatan atau pengeluaran dari 60 persen pendapatan di tengah ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama untuk pengeluaran tertinggi (maksimum). Seperti pada kriteria USD, tahun 2008 mengalami pukulan untuk pertumbuhan kelas menengah dan kembali naik hingga tahun 2012. Pertumbuhan pengeluaran yang relatif tinggi ini mengindikasikan bahwa tingkat daya beli dari kelas menengah yang semakin tinggi.

Perhitungan dengan mempertimbangkan pengeluaran tiap provinsi menunjukkan peningkatan yang juga tinggi. Tabel 4.7 memberikan gambaran perkembangan pengeluaran rata-rata individu per bulan dari tiap provinsi di Indonesia untuk masa observasi tahun 2004 sampai dengan

tahun 2012. Sel-sel yang kosong menunjukkan data sekunder Data Susenas belum tersedia. Secara lengkap, pengeluaran maksimum dan minimum individu menurut provinsi disajikan pada Lampiran 9 hingga Lampiran 14.

Ranking untuk setiap provinsi berdasarkan urutan terbesar pengeluaran individu kelas menengah sama dengan kriteria pada USD. Provinsi DKI Jakarta tetap merupakan provinsi dengan jumlah pengeluaran individu terbesar untuk kelas menengahnya, diikuti oleh Bangka Belitung dan kepulauan Riau. Urutan terakhir atau provinsi dengan pengeluaran individu kelas menengah terkecil berada pada Nusa Tenggara Timur, diikuti oleh provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat. Dari Tabel 4.7, juga terlihat bahwa pengeluaran rata-rata kelas menengah provinsi DKI Jakarta hampir tiga kali lipat dari pengeluaran rata-rata kelas menengah di provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Tabel 4.7.** Pengeluaran Rata-rata Kelas Menengah Merut Provinsi (Kriteria 60 persen; 5 terbesar dan 5 terkecil)

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	DKI	273,896	318,586	167,234	405,068	449,017	497,678	522,544	560,363	589,576
2	Babel	160,573	215,043	188,542	293,268	324,325	343,435	397,404	437,007	504,720
3	Kep. Riau	-	227,667	179,648	302,908	351,390	385,156	420,146	528,102	493,714
4	Kalim	177,702	200,109	34,333	284,888	301,027	330,855	409,542	449,251	490,548
5	Riau	164,539	174,702	137,885	265,676	276,699	308,454	330,179	389,027	406,615
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
29	Sulsel	102,595	111,568	44,765	147,040	156,919	176,992	190,212	222,082	237,550
30	Papua	113,903	119,800	70,913	155,977	160,232	191,701	205,639	233,540	237,286
31	Sulbar	-	-	54,738	142,896	156,777	182,757	198,380	215,291	236,884
32	Gorontalo	93,245	108,599	73,141	133,371	139,782	151,138	168,383	205,722	228,375
33	NTT	80,042	80,509	53,475	114,022	127,900	148,135	165,204	195,697	212,258
	Rata-rata	127,588	146,782	116,599	196,213	215,130	241,674	265,009	303,256	326,286

Sumber: Lampiran 9

### 4.1.3. Kelas Menengah Berdasarkan Kriteria World Bank

Kriteria terakhir yang dihitung pada penelitian ini adalah kriteria dari World Bank. Kriteria ini membagi kelas menengah kedalam kelompok 4-4-2, atau 40 persen kelas bawah, 40 persen kelas menengah dan 20 persen kelas dengan pendapatan tinggi.

Dari ketiga kriteria kelas menengah, kriteria World Bank (WB) memiliki jumlah kelas menengah yang paling sedikit, hanya 40 persen dari total

populasi (kriteria USD lebih dari 90 persen, kriteria 60 persen sebanyak 60 persen).

Perkembangan pengeluaran individu kelas menengah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 diperlihatkan pada Tabel 4.8. Kurun waktu 2004-2012, tingkat pengeluaran rata-rata kelas menengah terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 14,30 persen per tahun. Selama sembilan tahun masa observasi, tingkat pengeluaran cenderung berfluktuasi. Sama dengan dua kriteria lainnya, tingkat pertumbuhan pengeluaran terendah terjadi pada tahun 2008 dan tahun 2012.

**Tabel 4.8.** Pengeluaran Minimum, Maksimum dan Rata-rata Kelas Menengah Kriteria World Bank (Rupiah/bulan)

Tahun	Minimum	Pert (%)	Maksimum	Pert (%)	Rata-rata	Pert (%)
2004	154,141.60		283,422.50		205,578.30	
2005	176,378.70	14.43	359,863.30	26.97	246,641.30	19.97
2006	211,216.00	19.75	409,832.20	13.89	288,479.30	16.96
2007	240,541.80	13.88	498,036.10	21.52	341,963.80	18.54
2008	258,702.10	7.55	523,342.30	5.08	363,307.30	6.24
2009	289,575.90	11.93	578,638.10	10.57	402,222.30	10.71
2010	335,091.30	15.72	712,412.50	23.12	486,369.60	20.92
2011	377,176.90	12.56	837,414.30	17.55	557,308.90	14.59
2012	404,383.70	7.21	890,959.60	6.39	593,319.50	6.46
<b>Rata-Rata</b>	<b>271,912.00</b>	<b>12.88</b>	<b>565,991.21</b>	<b>15.64</b>	<b>387,243.37</b>	<b>14.30</b>

Sumber : Susenas, data diolah

Pengeluaran maksimum, minimum, dan rata-rata kelas menengah menurut provinsi secara lengkap diperlihatkan pada Lampiran 21 sampai 26. Pengeluaran rata-rata terbesar dan terkecil masing-masing untuk 5 provinsi diurutkan berdasarkan tahun 2012, diperlihatkan pada Tabel 4.9.

Seperti diperlihatkan pada Tabel 4.9, pengeluaran rata-rata terbesar dari kelas menengah menurut provinsi pada tahun 2012 berada pada provinsi Kalimantan Selatan, diikuti oleh Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Lampung. Sedangkan yang terendah berada pada provinsi Sulawesi Barat, diikuti oleh Sulawesi tengah, Jawa Timur, Maluku, dan Banten.

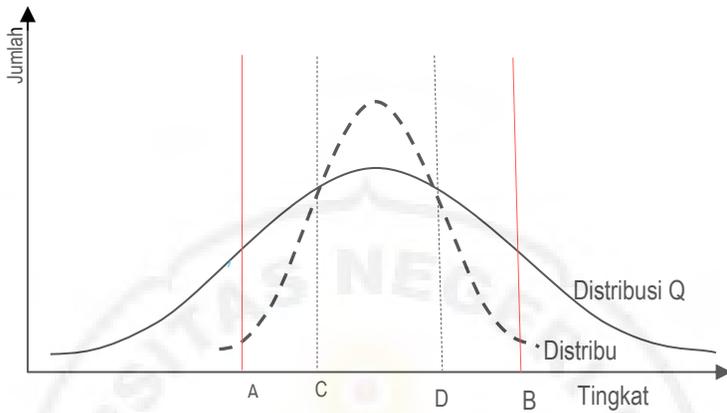
**Tabel 4.9.** Pengeluaran Rata-rata Kelas Menengah Merut Provinsi (Kriteria WB; 5 terbesar dan 5 terkecil)

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kalsel	516,412	701,777	729,371	801,743	891,725	977,068	1,078,447	1,358,748	1,574,390
2	Kalteng	-	565,366	644,777	707,913	797,369	883,343	982,746	1,210,714	1,373,570
3	NTT	464,288	459,501	517,896	533,066	651,204	703,816	737,618	993,773	1,097,038
4	Kalbar	-	414,694	470,770	625,008	689,514	718,840	814,053	1,037,046	981,279
5	Lampung	300,504	333,845	389,443	488,726	525,654	593,131	612,900	823,460	962,306
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
29	Banten	163,188	218,716	248,876	320,786	331,491	355,280	423,635	513,627	541,851
30	Maluku	197,179	231,284	266,306	299,709	337,106	374,629	419,749	521,507	537,434
31	Jatim	152,189	194,063	233,133	288,153	303,975	317,135	403,452	461,494	497,553
32	Sulteng	181,507	203,341	238,799	272,936	290,693	321,395	391,058	434,338	476,290
33	Sulbar	179,132	208,559	244,076	286,314	312,147	348,701	407,658	448,778	461,691
	Rata-rata	69,497	113,908	120,710	140,132	155,481	169,495	190,040	236,469	257,679

Sumber: Hasil penelitian, diolah

Hal yang menarik dari Tabel 4.9 bahwa 5 provinsi dengan pengeluaran rata-rata tertinggi didominasi oleh provinsi dari Kalimantan. Berbeda dengan dua kriteria lainnya, pengeluaran rata-rata tertinggi selalu berada pada provinsi DKI Jakarta. Namun pada kriteria ini, DKI Jakarta hanya berada pada urutan ke-28 dari 33 provinsi. Bahkan Papua Barat dan Papua masing masing berada pada urutan ke-9 dan ke-10. Artinya dengan cakupan persentase kelas menengah yang lebih kecil, tingkat pengeluaran rata-ratanya di kelima provinsi megalahkan pengeluaran rata-rata kelas menengah di DKI Jakarta. Kondisi ini tentu berasosiasi dengan tingkat ketimpangan total di provinsi tersebut yang diakibatkan perbedaan distribusi pendapatan. Kondisi ini dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3 memperlihatkan dua jenis distribusi pendapatan yaitu P yang lebih curam, dan Q yang lebih landai, serta dua jenis batasan kelas menengah yaitu AB dan CD. Ketika batasan kelas menengahnya dalah AB, artinya yang dimaksud dengan kelas menengah adalah mereka yang memiliki tingkat pendapatan/pengeluaran pada rentang AB, maka rata-rata pendapatan yang berada di bawah kurva Q akan lebih besar dari pada rata-rata yang berada di bawah kurva P. Namun bila batasan kelas menengahnya dipersempit menjadi CD, maka rata-rata pendapatan yang berada di bawah kurva P akan lebih besar dari pada rata-rata pendapatan yang berada di bawah kurva Q.

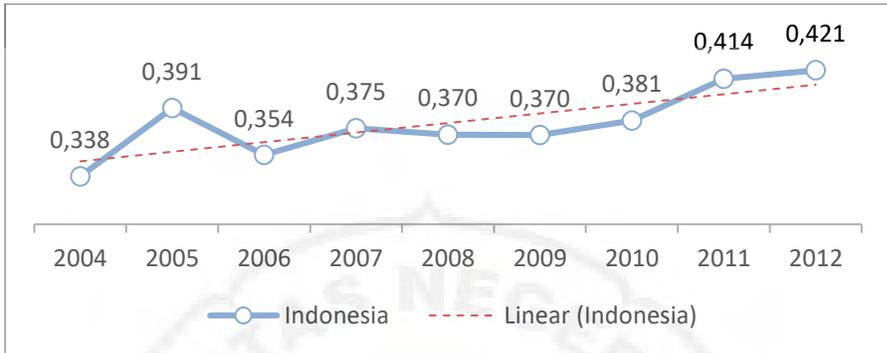


**Gambar 4.3.** Perbedaan Rata-rata Akibat Perbedaan Distribusi (Sumber: diadaptasi dari Maipita, 2014)

### Ketimpangan Kelas Menengah

Perhitungan ketimpangan kelas menengah dalam penelitian ini menggunakan Indeks Gini yang dibandingkan dengan indeks Gini total. Indeks ini menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan kelas menengah dari tiap provinsi juga dilakukan dengan cara yang sama, yaitu menghitung indeks Gini kelas menengah dan membandingkannya dengan indeks Gini total dalam setiap provinsi.

Hasil perhitungan indeks Gini nasional untuk semua pendapatan di Indonesia ditunjukkan pada Gambar 4.4. Gambar ini memperlihatkan bahwa secara keseluruhan, terdapat kecenderungan kenaikan indeks Gini (tingkat ketimpangan distribusi pendapatan) di Indonesia, walaupun pendapatan per kapita, baik secara riil atau nominal mengalami kenaikan.



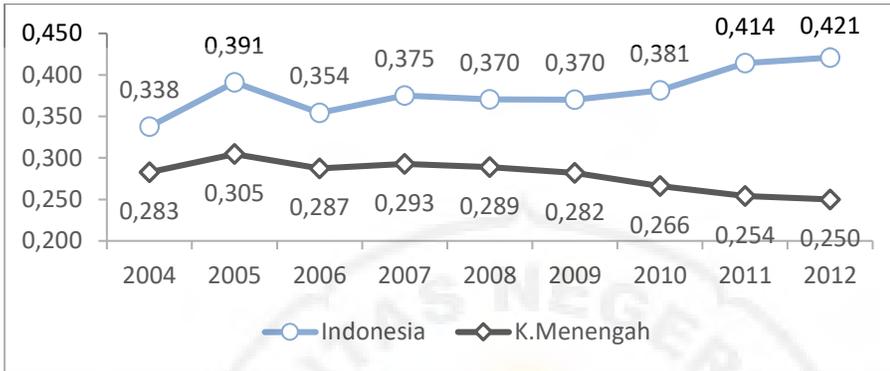
**Gambar 4.4.** Indeks Gini Indonesia ( Sumber: Pengolahan Data Susenas)

#### 4.1.4. Ketimpangan Kelas Menengah Menurut Kriteria Pendapatan USD10 - USD100

Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada kelas menengah menurut kriteria US10-USD100 diperlihatkan pada Gambar 4.5. Gambar ini memperlihatkan perbandingan antara ketimpangan nasional dengan kelompok kelas menengah berdasarkan kriteria USD10-USD100. Ketimpangan pada kelompok ini relatif lebih rendah dibanding dengan tingkat ketimpangan nasional untuk semua tahun observasi. Artinya, distribusi pendapatan pada kelompok ini relatif homogen. Pada kurun waktu pengamatan, tingkat distribusi pendapatan relatif konstan, meskipun ada perubahan, namun fluktuasinya relatif kecil.

Berbeda dengan ketimpangan distribusi secara nasional, ketimpangan pada kelompok kelas menengah justru menunjukkan kecenderungan yang menurun. Dengan kata lain, secara total, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan cenderung meningkat, namun pada kelompok kelas menengah cenderung semakin merata.

Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan (total) antar provinsi dan kelas menengah relatif bervariasi (secara lengkap diperlihatkan pada Lampiran 5 hingga 8). Lima provinsi dengan tingkat ketimpangan terendah dan tertinggi diperlihatkan pada Tabel 4.10.



**Gambar 4.5.** Indeks Gini Indonesia dan Kelas Menengah, Kriteria USD  
(Sumber: Pengolahan Data Susenas)

Dari 33 provinsi di Indonesia, tingkat ketimpangan terendah pada kelas menengah terdapat pada provinsi DKI Jakarta, diikuti oleh Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan pada kelas menengah di provinsi tersebut relatif lebih merata dibanding dengan provinsi lain.

**Tabel 4.10.** Indeks Gini Kelas Menengah menurut Provinsi (5 terkecil dan terbesar menurut tahun 2012; Kriteria USD)

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	DKI	0.225	0.227	0.195	0.186	0.183	0.178	0.156	0.156	0.156
2	Babel	0.243	0.261	0.232	0.218	0.215	0.228	0.188	0.175	0.161
3	Kaltim	0.273	0.281	0.253	0.242	0.239	0.246	0.207	0.189	0.187
4	Kep. Riau	0.000	0.280	0.246	0.220	0.220	0.218	0.182	0.168	0.187
5	Riau	0.273	0.281	0.251	0.247	0.246	0.240	0.222	0.205	0.206
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
29	NTT	0.255	0.286	0.281	0.311	0.307	0.297	0.297	0.280	0.269
30	Gorontalo	0.260	0.293	0.283	0.295	0.292	0.284	0.322	0.299	0.282
31	SulSel	0.268	0.289	0.283	0.309	0.306	0.302	0.304	0.279	0.282
32	Sulteng	0.250	0.280	0.273	0.314	0.298	0.289	0.311	0.287	0.292
33	Papua	0.298	0.336	0.315	0.332	0.339	0.323	0.315	0.292	0.297

Sumber: Lampiran 6

Merujuk kembali pada Gambar 4.2, bahwa provinsi DKI Jakarta memiliki persentase kelas menengah terendah dibanding dengan total populasinya, tetapi kelas menengah ini memiliki rata-rata pengeluaran tertinggi dibanding dengan provinsi lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa secara total

terjadi ketimpangan yang relatif tinggi di antara penduduknya, atau terjadi perbedaan tingkat pendapatan yang cukup besar antara kelompok menengah dengan kelompok lainnya.

Lampiran 6 memperlihatkan bahwa provinsi DKI Jakarta menempati ranking 32 dari 33 provinsi pada tahun 2004, naik menjadi ranking 29 tahun 2011 dan ranking 26 pada tahun 2012.

Provinsi dengan tingkat ketimpangan kelas menengah tertinggi berada pada provinsi Papua, diikuti dengan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Bila dibanding dengan tingkat ketimpangan provinsi DKI Jakarta, indeks Gini kelas menengah di provinsi Papua berbeda jauh bahkan hampir mencapai setengah dari indeks Gini provinsi DKI Jakarta.

Bila tingkat ketimpangan total dibandingkan dengan tingkat ketimpangan kelas menengah (lihat Tabel 4.11 dan 4.10), maka terlihat bahwa 5 provinsi dengan ketimpangan (total populasi) terendah berbeda dengan 5 provinsi dengan ketimpangan terendah pada kelompok menengahnya. Secara total, provinsi Kep. Bangka Belitung merupakan provinsi dengan tingkat ketimpangan terendah (0,302), diikuti oleh Sulawesi Barat (0,332), dan Nangroo Aceh Darussalam (0,335). Namun tidak demikian pada kelompok kelas menengah. Provinsi dengan tingkat ketimpangan terendah pada kelas menengahnya justru berada pada provinsi DKI Jakarta (0,156), diikuti oleh Kep. Bangka Belitung (0,161), dan Kalimantan Timur (0,187).

**Tabel 4.11.** Indeks Gini Provinsi (5 terkecil dan terbesar menurut tahun 2012)

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Babel	0.267	0.315	0.275	0.281	0.278	0.298	0.303	0.318	0.302
2	Sulbar	-	-	0.316	0.343	0.344	0.304	0.357	0.360	0.332
3	Aceh	0.281	-	0.304	0.289	0.299	0.293	0.309	0.341	0.335
4	Kalteng	0.272	0.303	0.281	0.311	0.306	0.300	0.313	0.353	0.337
5	Sumut	0.279	0.337	0.310	0.325	0.326	0.320	0.349	0.349	0.339
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
29	Bali	0.292	0.352	0.324	0.344	0.325	0.321	0.363	0.416	0.434
30	Sulut	0.272	0.343	0.306	0.335	0.298	0.320	0.379	0.382	0.437
31	Gorontl	0.302	0.369	0.321	0.387	0.356	0.362	0.435	0.449	0.439
32	DIY	0.419	0.464	0.425	0.390	0.405	0.402	0.432	0.428	0.445
33	Papua	0.350	0.450	0.389	0.424	0.423	0.393	0.424	0.432	0.453

Sumber: Lampiran 5

#### 4.1.5. Ketimpangan Kelas Menengah Menurut Kriteria 60 Persen (antara persentil 20 dengan 80)

Ketimpangan untuk kriteria pendapatan/pengeluaran antara persentil 20 dan persentil 80 Pada Gambar 4.6. Fenomena yang muncul sama dengan kriteria sebelumnya, dimana ketimpangan pada kelas menengah lebih rendah daripada ketimpangan secara total. Fenomena lain yang muncul adalah ketimpangan pada kriteria ini lebih rendah daripada ketimpangan menggunakan pendekatan USD. Hal ini mungkin terjadi karena cakupan pada pendekatan USD lebih luas daripada pendekatan 60 persen. Gambaran ini memberikan sebuah wacana, bahwa kelompok pendapatan pada 60 persen lebih merata dibandingkan dengan pendapatan lainnya.

Gambar 4.6 juga memberikan gambaran atas jauhnya gap dari ketimpangan secara total dan ketimpangan pada kelas menengah. Tingkat pendapatan yang lebih merata ini memberikan stabilitas sosial yang jauh lebih baik, sehingga memberikan atmosfer ekonomi yang jauh lebih kondusif. Tingkat indeks Gini yang kecil ini juga memberikan pertumbuhan ekonomi di kelas menengah diharapkan akan lebih tinggi, karena relatif mempunyai akses yang lebih baik dibandingkan dengan kelas pendapatan bawah.



**Gambar 4.6.** Indeks Gini Indonesia dan Kelas Menengah berdasarkan kriteria USD dan 60 persen (Sumber: Pengolahan Data Susenas)

Hal lain yang menarik dari Gambar 4.6 bahwa trend indek Gini nasional mengalami peningkatan, demikian juga dengan indek Gini kelas

menengah dengan kriteria 60 persen meskipun tidak setajam nasional. Namun tidak demikian dengan indeks Gini pada kelas menengah dengan kriteria USD, justru mengalami penurunan. Dengan kata lain, ketimpangan distribusi pendapatan nasional dan kelompok kelas menengah dengan kriteria 60 persen cenderung meningkat, namun sebaliknya terjadi pada kelompok kelas menengah dengan kriteria USD. Walaupun secara umum, indeks gini kelas menengah dengan kriteria 60 persen lebih rendah dibanding dengan indeks Gini kelas menengah dengan kriteria USD, namun arah dari trend keduanya relatif bertolak belakang.

Ketimpangan distribusi pendapatan pada kelas menengah menurut provinsi secara lengkap diperlihatkan pada Lampiran 15 dan 16. Kedua tabel pada lampiran ini dapat menjelaskan bagaimana Indeks Gini per provinsi untuk semua tingkat pendapatan dan ranking dari Indeks Gininya. Dari kedua lampiran ini dapat dibandingkan bagaimana tingkat ketimpangan untuk tiap provinsi relatif terhadap total pendapatan di provinsi tersebut dan dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Lima provinsi terendah dan tertinggi diperlihatkan pada Tabel 4.12.

**Tabel 4.12.** Indeks Gini Kelas Menengah menurut Provinsi (5 terkecil dan terbesar menurut tahun 2012; Kriteria 60 persen)

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	DKI	0.0924	0.1126	0.1045	0.1131	0.1131	0.1092	0.1219	0.1384	0.1409
2	Babel	0.1287	0.1366	0.1293	0.1381	0.1347	0.1206	0.1449	0.1601	0.1466
3	Kaltim	0.1265	0.1466	0.1350	0.1461	0.1465	0.1514	0.1579	0.1632	0.1625
4	DIY	0.1376	0.1592	0.1492	0.1639	0.1638	0.1593	0.1748	0.1783	0.1653
5	Kepri	-	0.1426	0.1363	0.1392	0.1341	0.1278	0.1474	0.1496	0.1695
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
29	Sumbar	0.1368	0.1575	0.1448	0.1601	0.1510	0.1516	0.1710	0.1749	0.1840
30	Maluku	0.1379	0.1596	0.1494	0.1674	0.1666	0.1451	0.1764	0.1898	0.1846
31	Sultra	0.1357	0.1563	0.1464	0.1661	0.1581	0.1641	0.1707	0.1769	0.1852
32	Sulut	0.1335	0.1575	0.1455	0.1631	0.1548	0.1533	0.1830	0.1869	0.1868
33	Papua	0.1428	0.1682	0.1539	0.1654	0.1679	0.1618	0.1968	0.1965	0.1938

Sumber: Lampiran 15

Bila kita bandingkan indeks Gini kelas menengah kriteria USD tahun 2012 (Tabel 5.10) dengan kriteria 60 persen (Tabel 5.12), terlihat bahwa provinsi dengan indeks Gini terendah masih berada pada DKI Jakarta.

Untuk 5 provinsi dengan Gini tertinggi, 3 dari 5 provinsi yang termasuk pada kriteria USD (Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sulawesi

Selatan), tidak terdapat lagi pada kriteria 60 persen (digantikan oleh provinsi Sumatera Barat, Maluku, dan Sulawesi Utara). Dua provinsi yang tetap masuk dalam kedua kriteria adalah Sulawesi Tenggara dan Papua, bahkan Papua memiliki indeks Gini tertinggi untuk kedua kriteria.

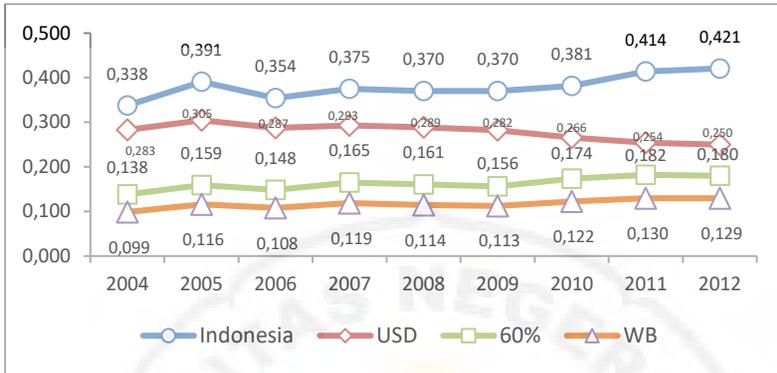
Pada tahun 2012, Rentang antara Gini terkecil (DKI Jakarta) dengan dengan Gini terbesar (Papua) pada kriteria USD lebih kecil (0,0529) dibanding dengan rentang pada kriteria 60 persen (0,1414). Hal ini mengindikasikan disparitas distribusi pendapatan pada kelas menengah dengan kriteria USD lebih kecil dibanding dengan kriteria 60 persen. Namun secara umum hal ini memberikan signal bagi kita, bahwa pertumbuhan ekonomi masih timpang, bahkan untuk kelas dengan pendapatan menengah.

#### **4.1.6. Ketimpangan Kelas Menengah Menurut Kriteria World Bank**

Kriteria terakhir yang dibahas pada tingkat ketimpangan kelas menengah adalah kriteria World Bank yang membagi pendapatan pada 40 persen rendah, 40 persen sedang dan 20 persen tinggi. Pada penelitian ini dibuat pembagian berdasarkan populasi. Dari hasil perhitungan, ketimpangan untuk populasi 40 persen pendapatan kelas menengah menunjukkan ketimpangan yang lebih rendah daripada dengan kriteria 60 persen (Gambar 4.7). Bahkan dari semua kriteria, indeks ketimpangan kriteria WB merupakan yang terkecil untuk setiap tahun. Hal ini dapat difahami kerana jumlah kelas menengah pada kriteria WB lebih sedikit dibanding dengan kriteria lainnya.

Ketimpangan distribusi pendapatan kelas menengah menurut provinsi secara lengkap diperlihatkan pada Lampiran 23 dan 24. Lima provinsi dengan indeks ketimpangan terendah dan tertinggi menurut tahun 2012, diperlihatkan pada Tabel 4.13.

Pada dua kriteria sebelumnya (kriteria USD dan kriteria 60 persen), provinsi dengan indeks Gini terendah adalah DKI Jakarta, diikuti oleh Kep. Bangk Belitung. Namun dengan kriteria WB posisinya terbalik, provinsi dengan indeks Gini terendah adalah Kep. Bangka Belitung, diikuti oleh DKI Jakarta.



**Gambar 4.7.** Indeks Gini Indonesia dan Kelas Menengah berdasarkan kriteria USD, 60 persen, dan World Bank (Sumber: Pengolahan Data Susenas)

Secara total, Kep. Bangka Belitung memang memiliki indeks Gini terendah dibanding dengan provinsi lainnya di Indonesia (lihat Lampiran 5). Namun tidak demikian dengan DKI Jakarta. Secara total provinsi ini menempati urutan ke-26 dari 33 provinsi pada tahun 2012 dan urutan ke-29 pada tahun 2011. Dengan kata lain, meski secara total ketimpangan pendapatan di provinsi DKI relatif tinggi, namun pada kelompok kelas menengahnya justru relatif kecil.

**Tabel 4.13.** Indeks Gini Kelas Menengah menurut Provinsi (5 terkecil dan terbesar menurut tahun 2012; Kriteria WB)

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Babel	0.0953	0.1103	0.1029	0.1132	0.1104	0.0976	0.1158	0.1309	0.1222
2	DKI	0.0819	0.0965	0.0910	0.0999	0.0991	0.0941	0.1065	0.1161	0.1226
3	Sumsel	0.0972	0.1134	0.1060	0.1159	0.1172	0.1138	0.1229	0.1302	0.1229
4	Bengkulu	0.0993	0.1156	0.1075	0.1123	0.1144	0.1083	0.1195	0.1310	0.1240
5	Gorontalo	0.0974	0.1122	0.1083	0.1206	0.1163	0.1120	0.1227	0.1296	0.1241
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
29	Jabar	0.0980	0.1159	0.1077	0.1199	0.1121	0.1119	0.1211	0.1300	0.1307
30	Kep. Riau	-	0.1118	0.1029	0.1113	0.1104	0.1021	0.1129	0.1128	0.1310
31	Banten	0.0961	0.1164	0.1063	0.1178	0.1158	0.1141	0.1241	0.1311	0.1311
32	Sulbar	-	-	0.1083	0.1271	0.1094	0.1127	0.1233	0.1294	0.1317
33	Riau	0.0978	0.1128	0.1041	0.1147	0.1116	0.1120	0.1214	0.1278	0.1331

Sumber: Lampiran 23

Hal lain yang menarik dari Tabel 4.13, bahwa bila pada kedua kriteria sebelumnya, provinsi Papua merupakan provinsi dengan indeks Gini

tertinggi (ketimpangan paling tinggi), namun tidak demikian dengan kelas menengah menurut kriteria WB. Posisi terendah dari 33 provinsi justru berada pada Provinsi Riau, sedangkan Papua berada pada urutan ke-27 pada tahun 2012 (lihat Lampiran 24). Selin itu, pada dua kriteria sebelumnya (USD dan 60 persen), 5 provinsi dengan ketimpangan tertinggi didominasi oleh provinsi dari Indonesia bagian Timur, namun dengan kriteria WB didominasi oleh provinsi dari Indonesia bagian Barat.

Pada kriteria ini dicoba menghitung indeks Gini untuk masing kelompok pendapatan, yaitu kelompok atas, menengah, dan bawah seperti diperlihatkan pada Tabel 4.14.

Dari tabel ini terlihat bahwa kelompok dengan pendapatan tinggi lebih tidak merata dibandingkan dengan kelompok pendapatan sedang, dan rendah. Kelas menengah secara rata-rata memiliki tingkat ketimpangan yang paling rendah dibandingkan dengan ketimpangan pada kelas bawah dan atas. Hal ini terlihat jelas pada Gambar 4.8, dimana kelas atas jauh melampaui dua kelas lainnya.

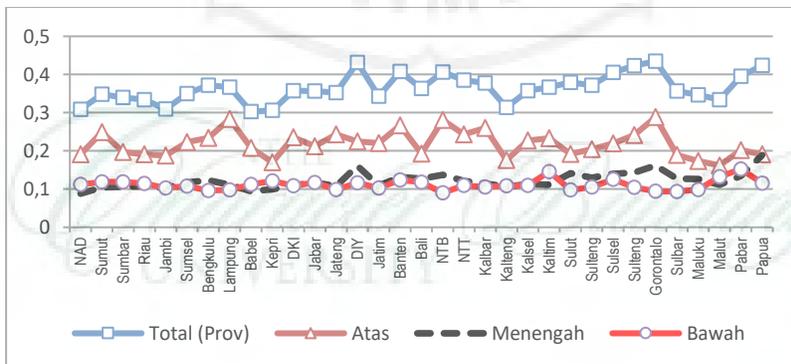
Dari tabel 4.15 terlihat bahwa kelompok dengan pendapatan tinggi lebih tidak merata dibandingkan dengan kelompok pendapatan sedang, dan rendah. Kelas menengah secara rata-rata memiliki tingkat ketimpangan yang paling rendah dibandingkan dengan ketimpangan pada kelas bawah dan atas. Hal ini terlihat jelas pada Gambar 4.8, dimana kelas atas jauh melampaui dua kelas lainnya.

**Tabel 4.14.** Indeks Gini Kelas Atas, Menengah dan Bawah Menurut Provinsi Tahun 2010; Kriteria WB (diurut berdasarkan Gini total)

No	Provinsi	Indeks Gini			
		Total (Prov)	Atas	Menengah	Bawah
1	Kep. Bangka Belitung	0.3026	0.2078	0.0946	0.1118
2	Kep. Riau	0.3059	0.1701	0.0993	0.1218
3	Nanggroe Aceh Darussalam	0.3090	0.1914	0.0881	0.1118
4	Jambi	0.3100	0.1875	0.1025	0.1029
5	Kalimantan Tengah	0.3135	0.1761	0.1066	0.1088
6	Riau	0.3341	0.1907	0.1069	0.1144
7	Maluku Utara	0.3343	0.1621	0.1112	0.1322
8	Sumatera Barat	0.3396	0.1971	0.1065	0.1184

9	Jawa Timur	0.3429	0.2207	0.1085	0.1026
10	Maluku	0.3465	0.1734	0.1268	0.0990
11	Sumatera Utara	0.3486	0.2488	0.1043	0.1186
12	Sumatera Selatan	0.3496	0.2232	0.1168	0.1076
13	Jawa Tengah	0.3524	0.2436	0.1081	0.0990
14	Sulawesi Barat	0.3565	0.1892	0.1272	0.0932
15	Jawa Barat	0.3567	0.2124	0.1171	0.1171
16	Kalimantan Selatan	0.3573	0.2271	0.1130	0.1094
17	DKI Jakarta	0.3573	0.2359	0.1093	0.1087
18	Bali	0.3630	0.1930	0.1270	0.1176
19	Kalimantan Timur	0.3667	0.2331	0.1109	0.1461
20	Lampung	0.3669	0.2839	0.1109	0.0975
21	Bengkulu	0.3716	0.2336	0.1227	0.0963
22	Sulawesi Tengah	0.3720	0.2046	0.1300	0.1052
23	Kalimantan Barat	0.3775	0.2597	0.1145	0.1051
24	Sulawesi Utara	0.3790	0.1918	0.1413	0.0980
25	Nusa Tenggara Timur	0.3850	0.2436	0.1216	0.1099
26	Papua Barat	0.3950	0.2020	0.1346	0.1524
27	Sulawesi Selatan	0.4057	0.2194	0.1396	0.1254
28	Nusa Tenggara Barat	0.4063	0.2811	0.1372	0.0900
29	Banten	0.4076	0.2666	0.1316	0.1241
30	Sulawesi Tenggara	0.4231	0.2412	0.1428	0.1047
31	Papua	0.4236	0.1914	0.1890	0.1152
32	DI Yogyakarta	0.4316	0.2249	0.1608	0.1164
33	Gorontalo	0.4348	0.2883	0.1613	0.0947

Sumber : Pengolahan Data Susenas



Gambar 4.8. Indeks Gini kelas Atas, Menengah dan Bawah Menurut Provinsi Tahun 2010; Kriteria WB (Sumber: Tabel 4.14)

## 4.2. Pengaruh Kelas Menengah Terhadap Perekonomian

### 4.2.1. Fungsi Konsumsi

Model konsumsi dari Keynes menunjukkan bahwa tingkat konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan, melalui sisi permintaan. Berdasarkan data konsumsi rumahtangga dan pendapatan yang diproksi dari data Produk Domestik Bruto Indonesia selama kurun waktu 20 tahun (1993-2012), diperoleh fungsi konsumsi sebagai berikut:

$$\text{Konsumsi} = -22939.6 + 0.779844 \text{ Pendapatan} \quad (20)$$

Fungsi konsumsi pada persamaan (20) mempunyai tingkat signifikansi pada alpha sebesar 1 persen, sehingga cukup berarti untuk digunakan sebagai dasar menentukan tingkat MPC (*Marginal Propensity to Consume*).

Dari persamaan (20) terlihat bahwa besarnya nilai MPC Indonesia dalam penelitian ini sebesar 0,78 dan inilah besarnya rasio dari tingkat konsumsi masyarakat atas pendapatannya. MPC sebesar 0,78 mengindikasikan jika terjadi kenaikan pendapatan masyarakat sebesar Rp 100, maka sebesar Rp 78 di antaranya digunakan untuk konsumsi.

Karena keterbatasan data, MPC yang dihasilkan pada persamaan (20) bukanlah MPC untuk kelas menengah, tetapi merupakan MPC total. Namun demikian, MPC ini tetap dapat digunakan sebagai proksi yang baik untuk memperkirakan tingkat konsumsi dari semua kalangan pendapatan masyarakat Indonesia.

### 4.2.2. Dampak Simulasi Kenaikan Pendapatan Kelas Menengah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Ekonomi/Industri

Untuk melihat dampak kenaikan pendapatan kelas menengah terhadap pertumbuhan ekonomi, dilakukan simulasi perubahan pendapatan yang diproksi dengan pengeluaran dari rumah tangga pada ketiga kelompok kelas menengah di Indonesia.

Simulasi dilakukan dengan tiga skenario, yaitu meningkatkan pendapatan sebesar 10 persen, 15 persen dan 20 persen dari *baseline*. Model yang digunakan untuk membuat simulasi adalah Tabel Input Output Tahun 2008. Asumsi perekonomian pada tahun 2012 dianggap sama strukturnya

dengan tahun 2008, sehingga kita bisa menggunakan perubahan dari konsumsi rumahtangga sebagai variabel eksogen mempengaruhi output total atau PDB. Hasil Simulasi untuk ketiga skenario diperlihatkan pada Tabel 4.15 dimana pada tabel tersebut menunjukkan tingkat perubahan pengeluaran yang merupakan porsi dari MPC (sebesar 0.78) terhadap perubahan pendapatannya. Secara umum, kenaikan tingkat pendapatan kelas menengah untuk ketiga kriteria, berdampak sangat kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Suatu alasan yang menyebabkan ini terjadi bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor. Jika PDB merupakan fungsi dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih ( $PDB=C+I+G+X-M$ ), maka relatif wajar bila dampak kenaikan C relatif kecil terhadap kenaikan PDB. Selain itu, konsumsi (C) yang dihitung dalam simulasi di atas hanyalah konsumsi rumahtangga kelas menengah dan bukan konsumsi total. Di sisi lain, karena dampak terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut, hanya diakibatkan oleh adanya penambahan pendapatan pada rumah tangga, maka porsi konsumsi rumah tangga kelas menengah tersebut dapat dikatakan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 4.15.** Hasil Simulasi Kenaikan Pendapatan Kelas Menengah

Rata-rata Pengeluaran (Rp) (Rp):		
Total Populasi		2,449,919.00
Kelompok USD10-USD100		1,867,434.00
Kelompok 20%-80% (60%)		1,639,903.92
Kelompok World Bank		2,174,802.19

SIMULASI I	Kenaikan Pendapatan (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kelompok 20%-80%	10	0.1187
Kelompok US\$10-US\$100	10	0.1059
Kelompok WB	10	0.1382

SIMULASI II	Kenaikan Pendapatan (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kelompok 20%-80%	15	0.1836
Kelompok US\$10-US\$100	15	0.1613
Kelompok WB	15	0.2138

SIMULASI III	Kenaikan Pendapatan (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kelompok 20%-80%	20	0.2372
Kelompok US\$10-US\$100	20	0.2116
Kelompok WB	20	0.2759

Sumber: Perhitungan Simulasi dengan Tabel I-O

Tabel 4.15 juga memperlihatkan bahwa Simulasi III memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibanding dengan Simulasi II dan I. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, maka akan semakin tinggi pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari simulasi ketiga kriteria kelas menengah, peningkatan pendapatan rumahtangga menurut kriteria World Bank memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan tingkat pendapatan rumahtangga kelas menengah menurut kriteria ini jauh lebih besar dibanding dengan dua kriteria lainnya. Demikian juga dengan tingkat pengeluaran individu. Pada tahun 2012, rata-rata pengeluaran kelas menengah untuk kriteria USD sebesar USD47,02 (Tabel 4.2), dengan rata-rata kurs tahun 2012 sebesar Rp9.068 per USD, maka rata-rata pendapatan tersebut setara dengan Rp426.377,17. Rata-rata pendapatan kelas menengah kriteria 60 persen tahun 2012 sebesar Rp509.897,70 (Tabel 4.6), sedangkan rata-rata pendapatan kelas menengah menurut kriteria World Bank sebesar Rp593.319,50 (Tabel 4.8).

Selanjutnya dilakukan simulasi kenaikan pendapatan kelas menengah terhadap pertumbuhan 66 sektor ekonomi yang ada pada Tabel I-O. Simulasi dilakukan dengan menaikkan pendapatan kelas menengah kriteria World Bank sebesar 20 persen. Kriteria ini dipilih karena memiliki dampak terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi seperti diperlihatkan pada Tabel 4.15. Dampak simulasi kenaikan pendapatan tersebut terhadap sektor ekonomi secara laengkap diperlihatkan pada Lampiran 25, sedangkan 10 sektor yang memperoleh dampak terbesar dan terkecil diperlihatkan pada Tabel 4.16.

Ketika pendapatan kelas menengah meningkat, maka konsumsi mereka juga akan meningkat. Peningkatan konsumsi ini akan berdampak terhadap sektor-sektor ekonomi. Ketika pendapatan tersebut meningkat sebesar 20 persen, ternyata sektor Teh merupakan sektor ekonomi yang memperoleh dampak terbesar, yaitu sebesar 33,45 persen. Sektor berikutnya yang memperoleh dampak terbesar adalah sektor Tanaman Bahan Makanan Lainnya (25,63 persen), dan sektor Tembakau (13,82 persen).

Hal menarik bahwa sektor makanan pokok bukanlah sektor yang memperoleh dampak terbesar akibat kenaikan pendapatan tersebut,

seperti sektor Padi hanya memperoleh dampak sebesar 0,25 persen (urutan ke-37), sektor Perikanan sebesar 0,36 persen (urutan ke-30), sektor Peternakan sebesar 1,03 persen (urutan ke-15).

Hal yang menarik lainnya adalah dampak pada kelompok sektor transportasi. Dari keempat kelompok sektor transportasi (Angkutan Darat, Angkutan Udara, Angkutan Air dan Angkutan Kereta Api), sektor Angkutan Kereta Api memperoleh dampak pertumbuhan yang paling besar, yaitu sebesar 6,31 persen, diikuti oleh sektor Angkutan Udara (0,56 persen), sektor Angkutan Air (0,24 persen), dan terakhir sektor Angkutan Darat (0,22 persen).

**Tabel 4.16.** Hasil Simulasi Dampak Kenaikan Pendapatan Rumah tangga Kelas Menengah Kriteria World Bank Sebesar 20% dari *Baseline* terhadap Pertumbuhan Sektor Ekonomi (10 terbesar dan terkecil)

No	Sektor	Pertumbuhan (%)
1	Teh	33.4475
2	Tanaman bahan makanan lainnya	25.6313
3	Tembakau	13.8216
4	Kegiatan yang tak jelas batasannya	10.7908
5	Angkutan kereta api	6.3064
6	Tanaman kacang-kacangan	4.2512
7	Tebu	3.5977
8	Hasil hutan lainnya	3.5196
9	Industri minuman	2.5583
10	Kelapa	2.4412
..	..	..
57	Industri pemintalan	0.0922
58	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik	0.0820
59	Industri minyak dan lemak	0.0781
60	Jasa sosial kemasyarakatan	0.0650
61	Penambangan batubara dan bijih logam	0.0586
62	Industri dasar besi dan baja	0.0527
63	Industri semen	0.0280
64	Bangunan	0.0220
65	Pemerintahan umum dan pertahanan	0.0184
66	Industri logam dasar bukan besi	0.0165

Sumber: Hasil Simulasi I-O; Lampiran 25

## Kesimpulan & Saran

---

**S**eperti disampaikan di awal buku ini, bahwa tidak mudah untuk mendefinisikan kelas menengah. Oleh karena itu, tidak mudah juga melihat profil dan peranannya terhadap perekonomian Indonesia. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan dan disarankan beberapa hal, seperti diuraikan berikut ini.

### 5.1. Kesimpulan

Beberapa point penting yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari hasil dan pembahasan pada bahagian sebelum ini, antara lain:

1. Kelas menengah dengan kriteria USD secara umum memiliki cakupan yang lebih luas di banding dengan kedua kriteria lainnya. Artinya, dengan kriteria USD, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai lebih dari 90 persen, demikian juga dengan jumlah menurut provinsi. Sedangkan rata-rata jumlah individu kelas menengah menurut kriteria

60 persen di tengah dan 40 persen menurut World Bank masing-masing sesuai dengan kriteria tersebut, yaitu 60 persen dan 40 persen.

2. Tingkat pengeluaran rata-rata kelas menengah terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 8,65 persen untuk kriteria USD, 13,82 persen untuk kriteria 60 persen ditengah, dan 14,30 persen per tahun untuk kriteria World Bank. Rata-rata tingkat pengeluaran kelas menengah dengan kriteria World Bank juga lebih tinggi dibanding dengan dua kriteria lainnya.
3. Selama tahun pengamatan, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara nasional lebih tinggi dibanding dengan tingkat ketimpangan pada kelompok kelas menengah. Di antara ketiga kriteria kelas menengah, tingkat ketimpangan pada kriteria World Bank lebih rendah dibanding dengan dua kriteria lainnya, diikuti dengan kriteria 60 persen di tengah, dan kriteria USD. Hal ini dapat dimaklumi karena jumlah kelas menengah pada kelompok World Bank lebih sedikit (hanya 40 persen) dibanding dengan kriteria 60 persen ditengah (60 persen), dan kriteria USD (lebih dari 90 persen).
4. Selama kurun waktu pengamatan (2004-2012), trend ketimpangan nasional mengalami peningkatan, demikian juga dengan trend ketimpangan pada kelas menengah dengan kriteria 60 persen dan kriteria World Bank. Tetapi tidak demikian pada kelas menengah dengan kriteria USD, trend ketimpangannya justru menurun.
5. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi menurut provinsi pada kriteria USD dan 60 persen di tengah berada pada provinsi Papua. Namun tidak demikian dengan kelas menengah menurut kriteria World Bank. Posisi terendah dari 33 provinsi justru berada pada Provinsi Riau, sedangkan Papua berada pada urutan ke-27 pada tahun 2012 (lihat Lampiran 24). Selain itu, pada dua kriteria (USD dan 60 persen), 5 provinsi dengan ketimpangan tertinggi didominasi oleh provinsi dari Indonesia bagian Timur, namun dengan kriteria WB didominasi oleh provinsi dari Indonesia bagian Barat.
6. Untuk kriteria World Bank, kelompok dengan pendapatan tinggi lebih tidak merata dibandingkan dengan kelompok pendapatan sedang, dan rendah. Kelas menengah secara rata-rata memiliki tingkat

ketimpangan yang paling rendah dibandingkan dengan ketimpangan pada kelas bawah dan atas.

7. Dari hasil estimasi data PDB selama 20 tahun (1993-2012), diperoleh nilai *Marginal Propensity to Consume* (MPC) sebesar 0,779, dengan persamaan  $Konsumsi = -22939.6 + 0.779844 Pendapatan$ . Nilai MPC ini menunjukkan bahwa sekitar 78 persen dari pendapatan masyarakat, digunakan untuk konsumsi.
8. Dampak kenaikan pendapatan kelas menengah terhadap pertumbuhan ekonomi untuk ketiga skenario (kenaikan pendapatan 10, 15, dan 20 persen) kurang dari 1 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan pendapatan kelas menengah tidak elastis terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Suatu alasan yang menyebabkan ini terjadi bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor. Jika PDB merupakan fungsi dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih ( $PDB=C+I+G+X-M$ ), maka relatif wajar bila dampak kenaikan C relatif kecil terhadap kenaikan PDB. Selain itu, konsumsi (C) yang dihitung dalam simulasi di atas hanyalah konsumsi rumah tangga kelas menengah dan bukan konsumsi total.
9. Semakin tinggi kenaikan pendapatan pada kelas menengah, akan berdampak semakin tinggi pula terhadap pertumbuhan ekonomi.
10. Kenaikan tingkat pendapatan kelas menengah juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi/industri. Simulasi menggunakan kriteria World Bank, sebanyak 15 dari 66 sektor ekonomi/industri dalam kajian ini memperoleh dampak kenaikan pertumbuhan lebih dari satu persen akibat kenaikan tingkat pendapatan kelas menengah sebesar 20 persen. Bahkan beberapa sektor memperoleh dampak yang relatif besar, seperti sektor Teh (33,45 persen), dan sektor Tanaman Bahan Makanan lainnya (25,63 persen).
11. Sektor makanan pokok bukanlah sektor yang memperoleh dampak terbesar akibat kenaikan pendapatan kelas menengah, seperti sektor Padi hanya memperoleh dampak sebesar 0,25 persen (urutan ke-37), sektor Perikanan sebesar 0,36 persen (urutan ke-30), dan sektor Peternakan sebesar 1,03 persen (urutan ke-15).

## 5.2. Saran

Dari hasil, pembahasan, serta keterbatasan penelitian ini, maka disarankan beberapa hal, yaitu:

1. Tingkat konsumsi atau tingkat pendapatan/pengeluaran hanyalah satu dimensi karakteristik kelas menengah. Variabel lain seperti pendidikan, profesi, tingkat kesehatan, tabungan, pembentukan modal, investasi, demokrasi, dan banyak lainnya juga merupakan fitur penting yang berhubungan dengan kelas menengah. Oleh karena itu, kajian ke depan perlu untuk menambahkan berbagai variabel tersebut sehingga hasil penelitiannya dapat lebih komprehensif.
2. Mengingat kondisi Indonesia yang sedang mengalami bonus demografi, maka hasil kajian ini (terutama dampak kenaikan pendapatankelas menengah terhadap sektor ekonomi/industri) diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ekonomi.



## Daftar Pustaka

- AfDB. 2011. The Middle of the Pyramid: Dynamics of the Middle Class in Africa. *Market Brief*, April 20, 2011.
- Banerjee, A. and E. Duflo. 2007. *What is Middle Class About the Middle Classes Around the World?* Massachusetts: MIT.
- Beckett, A. 2010. "Is the British middle class an endangered species?" *The Guardian*, July 24, 2010, p. 28. <http://www.guardian.co.uk/uk/2010/jul/24/middle-class-in-declinesociety>.
- Bhalla, S. 2009. *The Middle Class Kingdoms of India and China*. Peterson Institute for International Economics, Washington, DC.
- Birdsall, N., C. Graham, and S. Pettinato. 2000. *Stuck In The Tunnel: Is Globalisation Muddling The Middle Class?* Centre on Social and Economic Dynamics.
- Blackburn, M. L., & D. E. Bloom. 1985. What is happening to the middle class?, *American Demographics*, 7(1):18-25.
- Boushey, H., and Hersh A S. 2012. The American Middle Class, Income Inequality, and the Strength of Our Economy. *Center for American Progress*. [www.Americanprogress.org](http://www.Americanprogress.org).
- Brulliad, N. 2010. South Africa's "black diamonds" overtake whites, *Global Post*.
- Cárdenas, M., H. Kharas, and C. Henao. 2011. Latin America's Global Middle Class. *Working Paper*, Global Economy and Development at Brookings, Washington, DC.
-

- Charles, J.A. 2011. Understanding Income Inequality: Concept, Causes, and Measurement. *International Journal of Economics and Management Sciences*. 1(3):17-28.
- Dallinger, U. 2013. The Endangered Middle Class? A Comparative Analysis of the Role Played by Income Redistribution. *Journal of European Social Policy* 23(1): 83-101.
- Drabble, S., Ratsmann, N., Hoorens, S., Khodyakov, D., Yaqub, O. 2015. The Rise of a Global Middle Class Global Societal Trend to 2030: *Thematic Report 6*. Rand Corporation.
- EAGLEs. 2013. Emerging Middle Class in Fast-Track Mode. *Economic Watch*. Januari 2013.
- Easterly, W. 2001. The Middle Class Consensus and Economic Development. *Journal of Economic Growth* 6, 317-335.
- Fitrawaty., Maipita, I., Hermawan, W., Rahman, H. 2018. The Impact of Middle-Class towards Economic Growth and Income Inequality in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Malaysia* 52(3): 3 - 16.
- Focus. 2010. Middle Class in America. *Focus* 27(1):1-8. University of Wisconsin-Madison Institute for Research on Poverty.
- Hanke, W, and Reitsch. 2002. *Business Forecasting*, 7th Edition, Prentice-Hall, India.
- Jing, Y. 2010. Stumbling on the Rocky Road: Understanding China's Middle Class. *International Journal of China Studies*, 1(2): 435-438.
- Jose, S.J. 2016. The Growing Size and Incomes of the Upper Middle Class. *Research Report*. Urban Institute.
- Kanbur, R., Rhee, C., Zhuang, J. 2014. *Inequality in Asia and the Pacific Trends, Drivers, and Policy Implications*. Asian Development Bank.
- Kharas, H. and Gertz, G. 2010. The New Global Middle Class: A Cross-over from West to East' in C. Li (ed.), *China's*
-

- Emerging Middle Class: Beyond Economic Transformation*. Washington, DC, Brookings Institute Press.
- Kharas, H. 2010. The Emerging Middle Class in Developing Countries. *Working Paper* No. 285. OECD Development Centre.
- Kingombe, C. 2014. Africa's Rising Middle Class amid Plenty and Extreme Poverty. *Discussion Paper* No 167. October 2014. European Centre for Development Policy Management.
- Landes, D. 1998. *The Wealth and Poverty of Nations*. Norton (New York NY).
- Li Chunling .2009. Profile of Middle Class in Mainland China. *Working Paper* of CASS.
- Maipita, I., & Wahyudi, S.T. 2017. Income Distribution and Inequality in Indonesia: Study on Middle-Class Household. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 18(1): 131-141.
- Maipita, I. 2013. *Memahami & Mengukur Kemiskinan*. Yogyakarta: Absolut Media.
- Maipita, I. 2014. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maipita, I., Jantan, M.D., Razak, N.A.A. 2010. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi dan Angka Kemiskinan di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia* 12(4): 421-456.
- Milanovic, B, and S Yitzhaki. 2012. Decomposing World Income Distribution: Does the World Have a Middle Class? *Review of Income and Wealth*, 48(2):155-178.
- MP3EI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. *MasterPlan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI)*. Kementerian koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
-

- Nayab, D.E. 2011. Estimating the Middle Class in Pakistan. *PIDE Working Paper 2011:77*. Pakistan Institute of Development Economics, Islamabad.
- Ncube , M., Lufumpa, C.L., Steve, K.M. 2011. The Middle of the Pyramid: Dynamics of the Middle Class in Africa. *Market Brief* April 20, 2011. African Development Bank.
- Norris, E.D., Kochhar, K., Suphaphiphat, N., Ricka, F., Evridiki, T. 2015. Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective. *IMF Staff Discussion Note*. International Monetary Fund.
- Perkins, D. H., Snodgrass, D. R., Gillis, M., & Roemer, M. 2001. *Economics of Development*. Third Edition. New York: W.W. Norton and Company.
- Pressman, S. 2007. 'The Decline of the Middle Class: An International Perspective', *Journal of Economic Issues*: 41:181–200.
- Pressman, S. 2015. Defining and Measuring the Middle Class. *Working Paper 007*. American Institute for Economic Research.
- Rashdan, A. 2014. Middle Class and Pro-Poor Growth in Egypt: The Missing Connection. *Topics in Middle Eastern and African Economies* 6(1), May 2014.
- Ravallion, M. 2009. *The Developing World's Bulging (but Vulnerable) "Middle Class"*. The World Bank.
- Sokoloff, K. and Engerman, S. 2000. Institutions, Factor Endowments, and Path of Development in the New World, *Journal of Economic Perspectives*, 14(3): 217–232.
- Tarkhnishvili, A., and Tarkhnishvili, L. 2013. Middle Class: Definition, Role and Development. *Global Journal of Human Social Science Sociology & Culture*, 13(7):20-31.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2003. *Economic Development*. London: Pearson Education Limited.
-

Yuan, Z., Wan, G., and Khor, N. 2011. The Rise of the Middle Class in the People's Republic of China. *ADB Economics Working Paper Series* No. 247, February 201.



## LAMPIRAN

**Lampiran 1. Persentase Kelas Menengah Terhadap Total Populasi Menurut Provinsi; Kriteria: Berdasarkan USD**

No	Provinsi	Tahun						
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Aceh	91.079	-	96.647	97.493	96.419	95.861	90.704
2	Sumut	94.918	93.100	97.112	95.994	94.911	94.336	89.399
3	Sumbar	95.254	94.334	96.576	94.623	95.129	94.268	87.097
4	Riau	96.742	95.785	95.924	91.900	92.272	90.388	85.390
5	Jambi	96.546	95.515	97.780	96.119	96.820	97.292	91.545
6	Sumsel	88.424	92.171	97.801	96.566	95.961	96.256	92.211
7	Bengkulu	91.571	88.434	97.734	97.270	96.326	97.513	89.458
8	Lampung	84.347	87.356	96.561	94.302	96.765	96.105	94.960
9	Kep. Babel	97.737	95.750	96.386	93.445	91.117	89.811	79.697
10	Kep. Riau	-	92.248	91.440	84.807	85.039	84.190	68.326
11	DKI Jakarta	91.126	86.154	81.250	77.012	73.367	71.813	56.820
12	Jabar	95.163	93.809	95.914	95.190	95.121	95.311	90.133
13	Jateng	92.823	91.883	97.409	96.455	96.506	97.092	94.225
14	DI Y	90.104	88.201	89.462	91.026	90.311	88.178	80.214
15	Jatim	91.526	90.064	96.447	95.487	96.108	96.589	93.967
16	Banten	96.580	93.436	95.742	92.337	93.460	91.654	80.945
17	Bali	97.905	95.576	95.197	92.056	94.189	94.074	80.714
18	NTB	81.705	87.289	96.448	96.189	96.222	95.544	92.694
19	NTT	72.379	67.132	88.232	92.013	92.331	93.548	93.563
20	Kalbar	91.247	91.894	97.519	96.882	96.064	95.515	89.353
21	Kalteng	95.292	96.474	98.104	95.372	94.651	96.092	89.201
22	Kalsel	95.081	94.123	97.265	94.014	94.245	92.788	83.888
23	Kaltim	94.703	93.390	91.351	89.296	87.230	82.792	71.889
24	Sulut	96.848	95.076	96.872	96.133	96.460	96.536	86.016
25	Sulteng	89.696	88.358	95.070	95.543	95.148	95.804	89.801
26	Sulsel	86.536	86.214	96.167	92.085	93.626	94.239	88.241
27	Sultra	89.688	86.469	95.657	94.362	95.207	96.084	89.144
28	Gorontalo	82.937	84.261	94.190	93.915	93.478	93.076	92.426
29	Sulbar	-	-	94.769	96.409	97.302	97.527	94.444
30	Maluku	93.952	88.180	95.123	95.640	95.733	95.710	92.341
31	Maluku Utara	93.826	90.488	96.518	95.248	94.939	93.725	85.138
32	Papua Barat	-	-	96.482	92.326	93.750	91.423	78.719
33	Papua	90.894	84.886	90.756	90.937	91.617	93.075	82.946
	<b>Rata-rata</b>	<b>91.554</b>	<b>90.268</b>	<b>95.027</b>	<b>93.589</b>	<b>93.570</b>	<b>93.158</b>	<b>86.231</b>

Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada data

**Lampiran 2. Persentase Kelas Menengah Terhadap Total Populasi Menurut Provinsi Berdasarkan Ranking Terbanyak; Kriteria: Berdasarkan USD**

No	Provinsi	Tahun							
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	Lampung	27	23	12	19	3	8	1	
2	Sulawesi Barat			26	6	1	1	2	
3	Jawa Tengah	15	16	6	5	4	4	3	
4	Jawa Timur	17	18	16	13	9	5	4	
5	Nusa Tenggara Timur	30	30	32	27	26	22	5	
6	Nusa Tenggara Barat	29	24	15	7	8	14	6	
7	Gorontalo	28	29	27	21	24	23	7	
8	Maluku	13	22	24	11	12	13	8	
9	Sumatera Selatan	25	14	2	4	11	7	9	
10	Jambi	6	5	3	9	2	3	10	
11	Nanggroe Aceh Darussalam	20		10	1	6	11	11	
12	Jawa Barat	9	9	20	16	16	16	12	
13	Sulawesi Tengah	23	20	25	12	14	12	13	
14	Bengkulu	16	19	4	2	7	2	14	
15	Sumatera Utara	11	12	8	10	18	17	15	
16	Kalimantan Barat	18	15	5	3	10	15	16	
17	Kalimantan Tengah	7	1	1	14	19	9	17	
18	Sulawesi Tenggara	24	25	22	18	13	10	18	
19	Sulawesi Selatan	26	26	18	25	23	19	19	
20	Sumatera Barat	8	7	11	17	15	18	20	
21	Sulawesi Utara	3	6	9	8	5	6	21	
22	Riau	4	2	19	28	27	28	22	
23	Maluku Utara	14	17	13	15	17	21	23	
24	Kalimantan Selatan	10	8	7	20	20	25	24	
25	Papua	21	28	30	30	28	24	25	
26	Banten	5	10	21	23	25	26	26	
27	Bali	1	4	23	26	21	20	27	
28	DI Yogyakarta	22	21	31	29	30	30	28	
29	Kep. Bangka Belitung	2	3	17	22	29	29	29	
30	Papua Barat			14	24	22	27	30	
31	Kalimantan Timur	12	11	29	31	31	32	31	
32	Kep. Riau		13	28	32	32	31	32	
33	DKI Jakarta	19	27	33	33	33	33	33	

Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada data

**Lampiran 3. Rata-rata Pengeluaran Individu Kelas Menengah per Bulan Menurut Provinsi (dalam USD); Kriteria: Berdasarkan USD**

No	Provinsi	Tahun							Rata
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	Aceh	21.450	-	36.054	39.064	41.614	43.005	56.015	39.534
2	Sumut	23.490	26.597	32.069	40.806	43.377	44.731	59.074	38.592
3	Sumbart	25.753	29.107	34.597	44.539	44.543	46.724	62.131	41.056
4	Riau	33.617	34.399	42.520	53.465	54.197	57.087	67.426	48.959
5	Jambi	22.512	27.025	33.143	40.818	41.486	40.039	55.800	37.260
6	Sumsel	19.063	21.895	29.548	37.463	39.611	40.201	52.922	34.386
7	Bengkulu	21.536	20.781	27.542	33.123	40.043	37.875	55.380	33.754
8	Lampung	18.256	22.536	27.173	35.093	34.178	34.194	46.605	31.148
9	Kep. Babel	30.717	39.787	45.032	54.830	57.853	59.593	77.360	52.168
10	Kep. Riau	-	42.730	51.400	68.374	71.091	69.186	89.555	65.389
11	Jakarta	57.771	72.311	79.634	87.708	91.940	94.039	118.64	86.006
12	Jabar	26.123	30.343	37.106	40.743	41.070	43.800	54.912	39.157
13	Jateng	22.107	23.271	28.429	31.649	32.574	33.671	45.480	31.026
14	DIY	34.839	40.054	45.199	44.170	48.948	50.719	68.812	47.534
15	Jatim	22.058	23.831	29.076	32.787	34.757	36.057	46.177	32.106
16	Banten	29.442	38.315	39.760	46.647	47.723	50.966	73.173	46.575
17	Bali	32.177	37.219	43.841	48.610	45.917	48.436	69.941	46.592
18	NTB	17.689	21.687	27.749	29.042	32.395	33.496	48.216	30.039
19	NTT	16.012	16.866	21.740	24.625	26.139	28.605	38.867	24.694
20	Kalbar	22.689	24.861	31.066	35.098	38.455	41.129	56.487	35.684
21	Kalteng	24.579	26.223	34.644	40.490	44.867	45.350	60.177	39.476
22	Kalsel	25.716	28.594	35.088	46.372	46.636	50.233	67.346	42.855
23	Kaltim	39.460	42.607	53.627	58.612	64.643	72.879	90.713	60.363
24	Sulut	26.410	30.463	34.993	38.931	37.114	39.827	60.045	38.255
25	Sulteng	20.760	21.752	27.486	32.117	35.783	38.040	53.756	32.813
26	Sulsel	19.285	21.141	27.989	35.170	35.337	36.489	54.550	32.852
27	Sultra	21.327	21.763	27.354	29.028	30.564	33.152	50.382	30.510
28	Gorontalo	19.746	22.542	26.036	28.484	29.537	30.345	47.993	29.240
29	Sulbar	-	-	27.504	29.779	32.118	31.622	44.541	33.113
30	Maluku	23.329	21.518	29.505	35.119	35.488	35.770	49.581	32.902
31	Malut	24.845	24.353	32.835	41.173	45.201	47.277	61.650	39.619
32	Pabar	-	-	32.889	41.714	43.673	51.657	70.690	48.125
33	Papua	27.097	31.050	34.663	42.447	42.917	42.620	58.944	39.962
	<b>Rata-rata</b>	<b>25.662</b>	<b>29.521</b>	<b>35.372</b>	<b>41.457</b>	<b>43.388</b>	<b>45.116</b>	<b>61.010</b>	<b>40.218</b>

Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada data

**Lampiran 4. Rata-rata Pengeluaran Individu Kelas Menengah per Bulan Menurut Provinsi (dalam USD) Berdasarkan Ranking Tertinggi; Kriteria: Berdasarkan USD**

No	Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	DKI Jakarta	1	1	1	1	1	1	1
2	Kalimantan Timur	2	3	2	3	3	2	2
3	Kep. Riau		2	3	2	2	3	3
4	Kep. Bangka Belitung	6	5	5	4	4	4	4
5	Banten	7	6	8	7	7	7	5
6	Papua Barat			17	12	13	6	6
7	Bali	5	7	6	6	9	10	7
8	DI Yogyakarta	3	4	4	10	6	8	8
9	Riau	4	8	7	5	5	5	9
10	Kalimantan Selatan	12	13	11	8	8	9	10
11	Sumatera Barat	11	12	15	9	12	12	11
12	Maluku Utara	13	18	18	13	10	11	12
13	Kalimantan Tengah	14	16	14	17	11	13	13
14	Sulawesi Utara	9	10	12	19	22	21	14
15	Sumatera Utara	15	15	19	15	14	14	15
16	Papua	8	9	13	11	15	17	16
17	Kalimantan Barat	17	17	20	23	21	18	17
18	Aceh	22		10	18	16	16	18
19	Jambi	18	14	16	14	17	20	19
20	Bengkulu	21	29	27	25	19	23	20
21	Jawa Barat	10	11	9	16	18	15	21
22	Sulawesi Selatan	26	28	25	21	25	24	22
23	Sulawesi Tengah	24	25	29	27	23	22	23
24	Sumatera Selatan	27	23	21	20	20	19	24
25	Sulawesi Tenggara	23	24	30	31	31	30	25
26	Maluku	16	27	22	22	24	26	26
27	Nusa Tenggara Barat	29	26	26	30	29	29	27
28	Gorontalo	25	21	32	32	32	32	28
29	Lampung	28	22	31	24	27	27	29
30	Jawa Timur	20	19	23	26	26	25	30
31	Jawa Tengah	19	20	24	28	28	28	31
32	Sulawesi Barat			28	29	30	31	32
33	Nusa Tenggara Timur	30	30	33	33	33	33	33

Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada data

## Lampiran 5. Indeks Gini Menurut Provinsi

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Aceh	0.281	-	0.304	0.289	0.299	0.293	0.309	0.341	0.335
2	Sumut	0.279	0.337	0.310	0.325	0.326	0.320	0.349	0.349	0.339
3	Sumbar	0.301	0.335	0.307	0.339	0.316	0.307	0.340	0.362	0.382
4	Riau	0.319	0.342	0.313	0.336	0.327	0.334	0.334	0.360	0.415
5	Jambi	0.248	0.326	0.302	0.315	0.307	0.274	0.310	0.348	0.343
6	Sumsel	0.278	0.312	0.309	0.329	0.324	0.319	0.350	0.351	0.397
7	Bengkulu	0.289	0.333	0.312	0.339	0.364	0.299	0.372	0.364	0.353
8	Lampung	0.285	0.348	0.297	0.391	0.344	0.349	0.367	0.367	0.374
9	Babel	0.267	0.315	0.275	0.281	0.278	0.298	0.303	0.318	0.302
10	Kep.Riau	-	0.368	0.330	0.327	0.341	0.315	0.306	0.332	0.362
11	DKI	0.366	0.425	0.364	0.361	0.356	0.349	0.357	0.427	0.429
12	Jabar	0.301	0.353	0.334	0.354	0.356	0.366	0.357	0.405	0.419
13	Jateng	0.281	0.315	0.289	0.342	0.328	0.321	0.352	0.395	0.390
14	DIY	0.419	0.464	0.425	0.390	0.405	0.402	0.432	0.428	0.445
15	Jatim	0.309	0.360	0.321	0.352	0.350	0.337	0.343	0.380	0.363
16	Banten	0.308	0.425	0.340	0.369	0.346	0.364	0.408	0.409	0.398
17	Bali	0.292	0.352	0.324	0.344	0.325	0.321	0.363	0.416	0.434
18	NTB	0.284	0.321	0.302	0.340	0.347	0.354	0.406	0.369	0.351
19	NTT	0.307	0.366	0.342	0.362	0.358	0.366	0.385	0.379	0.406
20	Kalbar	0.302	0.332	0.311	0.330	0.328	0.326	0.378	0.398	0.384
21	Kalteng	0.272	0.303	0.281	0.311	0.306	0.300	0.313	0.353	0.337
22	Kalsel	0.301	0.337	0.325	0.351	0.333	0.347	0.357	0.371	0.390
23	Kaltim	0.366	0.369	0.353	0.351	0.380	0.403	0.367	0.390	0.379
24	Sulut	0.272	0.343	0.306	0.335	0.298	0.320	0.379	0.382	0.437
25	Sulteng	0.313	0.329	0.336	0.345	0.348	0.333	0.372	0.391	0.407
26	Sulsel	0.313	0.358	0.330	0.394	0.374	0.391	0.406	0.407	0.426
27	Sultra	0.285	0.341	0.320	0.359	0.346	0.348	0.423	0.430	0.405
28	Gorontalo	0.302	0.369	0.321	0.387	0.356	0.362	0.435	0.449	0.439
29	Sulbar	-	-	0.316	0.343	0.344	0.304	0.357	0.360	0.332
30	Maluku	0.283	0.324	0.323	0.365	0.339	0.335	0.346	0.407	0.429
31	Malut	0.275	0.365	0.306	0.348	0.336	0.316	0.334	0.347	0.355
32	Pabar	-	-	0.334	0.348	0.332	0.351	0.395	0.413	0.432
33	Papua	0.350	0.450	0.389	0.424	0.423	0.393	0.424	0.432	0.453

**Lampiran 6. Ranking Indeks Gini Provinsi (diurutkan dari kecil ke besar; dasar tahun 2012)**

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kep. Babel	5	6	1	1	1	3	1	1	1
2	Sulbar			16	15	19	6	14	10	2
3	Aceh	11		7	2	3	2	3	3	3
4	Kalteng	7	4	2	3	4	5	5	8	4
5	Sumut	10	15	12	5	9	11	11	6	5
6	Jambi	4	10	5	4	5	1	4	5	6
7	NTB	14	8	6	13	22	25	28	14	7
8	Bengkulu	17	13	14	12	29	4	21	12	8
9	Malut	8	25	9	19	15	9	7	4	9
10	KepRi		27	23	6	17	8	2	2	10
11	Jatim	26	24	19	22	24	19	9	17	11
12	Lampung	16	20	4	31	18	23	20	13	12
13	Kaltim	31	29	30	20	31	33	19	19	13
14	Sumbar	20	14	10	11	6	7	8	11	14
15	Kalbar	23	12	13	8	12	15	23	22	15
16	Kalsel	19	16	22	21	14	20	16	15	16
17	Jateng	12	6	3	14	11	14	13	21	17
18	Sumsel	9	5	11	7	7	10	12	7	18
19	Banten	25	30	28	28	21	27	29	26	19
20	Sulteng	15	17	17	24	20	21	30	31	20
21	NTT	24	26	29	26	28	28	25	16	21
22	Sulteng	28	11	27	17	23	16	22	20	22
23	Riau	29	18	15	10	10	17	6	9	23
24	Jabar	21	22	25	23	26	29	15	23	24
25	Sulsel	27	23	24	32	30	30	27	24	25
26	Jakarta	32	31	31	25	27	22	17	29	26
27	Maluku	13	9	20	27	16	18	10	25	27
28	Pabar			26	18	13	24	26	27	28
29	Bali	18	21	21	16	8	13	18	28	29
30	Sulut	6	19	8	9	2	12	24	18	30
31	Gorontalo	22	28	18	29	25	26	33	33	31
32	DIY	33	33	33	30	32	32	32	30	32
33	Papua	30	32	32	33	33	31	31	32	33

**Lampiran 7. Indeks Gini Kelas Menengah Menurut Provinsi; Kriteria:  
Berdasarkan USD**

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Aceh	0.252	-	0.262	0.254	0.252	0.242	0.221	0.214	0.220
2	Sumut	0.250	0.276	0.257	0.261	0.252	0.254	0.236	0.230	0.223
3	Sumbar	0.270	0.288	0.264	0.266	0.253	0.249	0.237	0.216	0.223
4	Riau	0.273	0.281	0.251	0.247	0.246	0.240	0.222	0.205	0.206
5	Jambi	0.227	0.278	0.252	0.260	0.258	0.241	0.238	0.223	0.218
6	Sumsel	0.246	0.269	0.262	0.276	0.265	0.259	0.261	0.251	0.245
7	Bengkulu	0.260	0.280	0.279	0.285	0.272	0.264	0.258	0.252	0.234
8	Lampung	0.243	0.290	0.267	0.292	0.285	0.270	0.268	0.249	0.244
9	Kep.Babel	0.243	0.261	0.232	0.218	0.215	0.228	0.188	0.175	0.161
10	Kep. Riau	-	0.280	0.246	0.220	0.220	0.218	0.182	0.168	0.187
11	Jakarta	0.225	0.227	0.195	0.186	0.183	0.178	0.156	0.156	0.156
12	Jabar	0.265	0.292	0.276	0.283	0.280	0.268	0.259	0.249	0.249
13	Jateng	0.251	0.271	0.259	0.279	0.275	0.268	0.265	0.258	0.258
14	DIY	0.347	0.343	0.324	0.293	0.307	0.296	0.268	0.243	0.243
15	Jatim	0.266	0.288	0.278	0.285	0.286	0.281	0.263	0.250	0.237
16	Banten	0.267	0.306	0.275	0.274	0.271	0.262	0.240	0.228	0.233
17	Bali	0.263	0.281	0.255	0.256	0.257	0.248	0.240	0.222	0.223
18	NTB	0.244	0.274	0.261	0.294	0.290	0.281	0.288	0.271	0.250
19	NTT	0.255	0.286	0.281	0.311	0.307	0.297	0.297	0.280	0.269
20	Kalbar	0.258	0.284	0.274	0.284	0.278	0.270	0.256	0.262	0.240
21	Kalteng	0.250	0.267	0.249	0.263	0.255	0.250	0.235	0.224	0.207
22	Kalsel	0.269	0.283	0.270	0.270	0.258	0.250	0.233	0.218	0.212
23	Kaltim	0.273	0.281	0.253	0.242	0.239	0.246	0.207	0.189	0.187
24	Sulut	0.254	0.289	0.266	0.269	0.253	0.260	0.271	0.250	0.257
25	Sulteng	0.268	0.282	0.282	0.294	0.292	0.281	0.281	0.252	0.251
26	Sulsel	0.268	0.289	0.283	0.309	0.306	0.302	0.304	0.279	0.282
27	Sultra	0.250	0.280	0.273	0.314	0.298	0.289	0.311	0.287	0.292
28	Gorontalo	0.260	0.293	0.283	0.295	0.292	0.284	0.322	0.299	0.282
29	Sulbar	-	-	0.272	0.289	0.287	0.271	0.285	0.273	0.259
30	Maluku	0.242	0.274	0.281	0.295	0.283	0.273	0.283	0.274	0.260
31	Malut	0.250	0.286	0.274	0.276	0.275	0.257	0.237	0.236	0.229
32	Pabar	-	-	0.279	0.289	0.274	0.269	0.284	0.250	0.252
33	Papua	0.298	0.336	0.315	0.332	0.339	0.323	0.315	0.292	0.297

Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada data

**Lampiran 8. Ranking Indeks Gini Kelas Menengah Menurut Provinsi**  
(diurutkan dari kecil ke besar dengan dasar tahun 2010);  
Kriteria: Berdasarkan USD

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jakarta	4	4	1	1	1	1	1	1	1
2	Kep.Babel	8	5	2	2	2	3	3	3	2
3	Kaltim	30	17	7	4	4	7	4	4	3
4	KepRi	-	13	3	3	3	2	2	2	4
5	Riau	31	16	5	5	5	4	6	5	5
6	Kalteng	13	6	4	10	10	11	8	11	6
7	Kalsel	28	20	17	13	12	10	7	8	7
8	Jambi	5	12	6	8	13	5	12	10	8
9	Aceh	16	-	13	6	6	6	5	6	9
10	Sumut	14	11	9	9	7	12	9	13	10
11	Sumbar	29	24	14	11	9	9	11	7	11
12	Bali	22	18	8	7	11	8	14	9	12
13	Malut	11	23	20	15	19	13	10	14	13
14	Banten	25	31	22	14	15	16	13	12	14
15	Bengkulu	21	14	26	21	16	17	16	23	15
16	Jatim	24	25	24	20	24	26	19	18	16
17	Kalbar	19	21	21	19	20	21	15	25	17
18	DIY	33	33	33	25	31	30	22	15	18
19	Lampung	7	28	16	24	23	21	21	16	19
20	Sumsel	10	7	12	16	14	14	18	21	20
21	Jabar	23	29	23	18	21	19	17	17	21
22	NTB	9	9	11	26	26	25	28	26	22
23	Sulteng	27	19	29	27	28	27	24	22	23
24	Pabar	-	-	25	23	17	20	26	19	24
25	Sultra	17	26	15	12	8	15	23	20	25
26	Jateng	15	8	10	17	18	18	20	24	26
27	Sulbar	-	-	18	22	25	23	27	27	27
28	Maluku	6	10	28	28	22	24	25	28	28
29	NTT	18	22	27	31	32	31	29	30	29
30	Gorontalo	20	30	31	29	27	28	33	33	30
31	Sulsel	26	27	30	30	30	32	30	29	31
32	Sultra	12	15	19	32	29	29	31	31	32
33	Papua	32	32	32	33	33	33	32	32	33

Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada data

**Lampiran 9. Pengeluaran Minimum Kelas Menengah Menurut Provinsi;  
Kriteria: 60 persen**

No	Provinsi	Tahun									
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	NAD	115,738	-	104,147	207,827	235,675	262,575	289,455	321,286	338,051	
2	Sumut	127,647	147,923	126,789	204,218	225,769	253,934	278,503	302,157	337,626	
3	Sumbar	128,720	147,072	141,417	214,776	235,943	265,164	292,828	341,292	342,913	
4	Riau	164,539	174,702	137,885	265,676	276,699	308,454	330,179	389,027	406,615	
5	Jambi	129,628	145,670	144,048	205,996	221,566	248,599	266,187	307,804	339,358	
6	Sumsel	105,623	123,462	144,285	183,250	205,143	226,378	242,954	270,764	286,405	
7	Bengkulu	107,005	120,917	159,949	171,920	190,189	218,133	241,500	265,901	312,733	
8	Lampung	94,389	112,790	179,442	156,504	171,219	187,082	211,629	248,343	272,058	
9	Babel	160,573	215,043	188,542	293,268	324,325	343,435	397,404	437,007	504,720	
10	Kepri	-	227,667	179,648	302,908	351,390	385,156	420,146	528,102	493,714	
11	Jakarta	273,896	318,586	167,234	405,068	449,017	497,678	522,544	560,363	589,576	
12	Jabar	129,993	145,107	184,535	192,496	194,697	226,113	248,792	272,885	293,899	
13	Jateng	112,692	122,698	136,905	158,148	169,721	192,918	211,263	231,220	246,731	
14	DIY	131,907	146,244	217,863	191,245	193,110	213,124	243,354	292,270	312,132	
15	Jatim	109,024	119,331	225,599	158,866	170,862	198,441	218,836	242,560	263,583	
16	Banten	143,999	163,044	175,045	216,424	230,537	254,923	295,393	325,389	343,466	
17	Bali	164,879	186,964	372,706	234,172	234,999	271,608	302,969	352,702	380,628	
18	NTB	95,794	113,852	66,376	143,119	163,358	175,635	196,219	219,133	263,606	
19	NTT	80,042	80,509	53,475	114,022	127,900	148,135	165,204	195,697	212,258	
20	Kalbar	113,564	129,085	52,136	168,340	195,555	225,803	237,849	262,665	301,794	
21	Kalteng	135,204	146,955	60,367	210,804	233,151	255,981	292,262	335,191	385,543	
22	Kalsel	131,763	148,353	60,481	218,844	234,994	268,510	297,114	348,897	372,676	
23	Kaltim	177,702	200,109	34,333	284,888	301,027	330,855	409,542	449,251	490,548	
24	Sulut	142,140	156,280	61,323	192,056	204,645	226,374	241,881	287,941	289,635	
25	Sulteng	106,180	116,778	42,099	151,227	173,676	201,967	216,553	265,613	287,862	
26	Sulsel	102,595	111,568	44,765	147,040	156,919	176,992	190,212	222,082	237,550	
27	Sultra	106,130	109,298	50,833	133,801	145,969	170,974	176,911	206,657	243,024	
28	Gorontalo	93,245	108,599	73,141	133,371	139,782	151,138	168,383	205,722	228,375	
29	Sulbar	-	-	54,738	142,896	156,777	182,757	198,380	215,291	236,884	
30	Maluku	121,021	118,429	52,593	157,826	175,633	194,442	215,400	256,249	287,909	
31	Malut	108,114	126,643	37,742	196,720	216,694	249,669	286,627	292,789	315,607	
32	Pabar	-	-	46,410	161,343	232,130	270,594	233,183	321,667	312,679	
33	Papua	113,903	119,800	70,913	155,977	160,232	191,701	205,639	233,540	237,286	
	<b>Rata-rata</b>	<b>127,588</b>	<b>146,782</b>	<b>116,599</b>	<b>196,213</b>	<b>215,130</b>	<b>241,674</b>	<b>265,009</b>	<b>303,256</b>	<b>326,286</b>	

Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada data



**Lampiran 10. Ranking Pengeluaran Minimum Kelas Menengah Menurut Provinsi (diurutkan menurut pengeluaran terbesar tahun 2012); Kriteria: 60 persen**

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	DKI Jakarta	1	1	9	1	1	1	1	1	1
2	Babel	5	3	4	3	3	3	4	4	2
3	Kep. Riau			6	2	2	2	2	2	3
4	Kaltim	2	4	33	4	4	4	3	3	4
5	Riau	4	6	14	5	5	5	5	5	5
6	Kalteng	8	12	23	10	10	11	10	9	6
7	Bali	3	5	1	6	8	6	6	6	7
8	Kalsel	10	9	22	7	9	8	7	7	8
9	Banten	6	7	8	8	12	12	8	10	9
10	Sumbar	13	11	13	9	6	9	9	8	10
11	Jambi	12	14	12	12	14	15	14	13	11
12	NAD	16		17	11	7	10	11	12	12
13	Sumut	14	10	16	13	13	13	13	14	13
14	Malut	21	17	32	14	15	14	12	15	14
15	Bengkulu	22	20	10	19	21	20	19	20	15
16	Pabar			29	21	11	7	21	11	16
17	DIY	9	13	3	17	20	21	16	16	17
18	Kalbar	18	16	27	20	18	19	20	22	18
19	Jabar	11	15	5	15	19	18	15	18	19
20	Sulut	7	8	21	16	17	17	18	17	20
21	Maluku	15	23	26	24	22	24	24	23	21
22	Sulteng	23	24	31	27	23	22	23	21	22
23	Sumsel	25	18	11	18	16	16	17	19	23
24	Lampung	28	26	7	25	24	27	25	24	24
25	NTB	27	25	20	29	27	30	29	29	25
26	Jatim	20	22	2	22	25	23	22	25	26
27	Jateng	19	19	15	23	26	25	26	27	27
28	Sultra	24	28	28	31	31	31	31	31	28
29	Sulsel	26	27	30	28	29	29	30	28	29
30	Papua	17	21	19	26	28	26	27	26	30
31	Sulbar			24	30	30	28	28	30	31
32	Gorontalo	29	29	18	32	32	32	32	32	32
33	NTT	30	30	25	33	33	33	33	33	33

Sumber: Lampiran 9; Ket: - tidak ada data

**Lampiran 11. Pengeluaran Maksimum Kelas Menengah Menurut Provinsi; Kriteria: 60 persen**

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	NAD	247,983	-	240,230	474,798	529,916	582,457	673,948	778,714	853,548
2	Sumut	270,234	355,212	306,219	490,003	533,795	594,426	696,283	820,490	863,785
3	Sumbang	287,240	374,525	312,791	563,035	562,177	640,981	795,382	912,110	1,009,839
4	Riau	400,684	438,790	315,082	700,550	698,917	782,008	885,768	1,107,833	1,187,670
5	Jambi	255,526	338,746	331,279	489,208	525,932	535,729	681,777	814,671	821,930
6	Sumsel	231,178	278,741	348,152	447,452	490,981	537,866	668,670	762,337	785,259
7	Bengkulu	228,480	279,122	370,568	422,704	467,890	487,561	678,522	777,375	797,318
8	Lampung	197,930	269,662	388,615	429,017	422,253	425,751	558,763	656,634	686,583
9	Babel	339,841	518,396	394,352	644,713	721,468	816,705	930,942	1,111,017	1,166,867
10	Kep. Riau	-	673,122	405,208	722,753	877,489	957,679	999,905	1,384,033	1,649,558
11	DKI	637,514	816,340	413,619	971,828	1,105,181	1,270,153	1,389,721	1,834,710	2,111,127
12	Jabar	287,893	372,633	434,357	519,156	522,489	565,958	710,149	850,238	966,154
13	Jateng	235,535	273,387	449,941	377,495	401,656	433,176	548,904	624,401	692,270
14	DIY	469,746	599,820	506,619	603,836	641,899	686,582	930,305	1,128,037	1,172,289
15	Jatim	237,967	292,123	555,089	404,505	438,210	492,454	580,436	641,838	631,651
16	Banten	332,381	468,551	702,464	624,618	606,549	667,640	919,806	1,034,070	1,073,607
17	Bali	370,819	488,951	899,597	608,316	594,841	664,282	936,182	1,201,906	1,158,289
18	NTB	206,063	257,527	2,189,167	360,440	396,295	437,984	591,771	612,057	676,199

19	NTT	177,306	200,754	2,897,708	290,772	325,228	372,241	477,399	543,743	556,390
20	Kalbar	251,744	306,887	3,354,501	422,125	487,429	560,019	662,679	859,311	857,477
21	Kalteng	283,706	328,869	3,714,266	515,879	564,246	597,733	753,241		1,021,738
22	Kalsel	293,512	366,845	3,763,453	588,202	571,070	656,867	836,667	994,428	1,059,583
23	Kaltim	449,103	532,824	4,050,306	725,927	780,166	961,941	1,114,095	1,320,381	1,386,367
24	Sulut	311,198	399,794	4,668,699	486,497	450,297	512,330	801,107	935,276	1,129,000
25	Sulteng	240,681	287,639	4,759,983	395,014	451,745	533,210	689,071	817,083	822,209
26	Sulsel	233,604	269,898	5,017,799	427,676	465,249	490,407	716,082	761,992	814,623
27	Sultra	235,131	70,045	5,770,834	368,396	376,176	433,947	628,055	708,776	845,571
28	Gorontalo	217,189	272,005	6,223,413	342,777	365,015	392,856	612,316	752,209	771,583
29	Sulbar	-	-	6,594,321	373,252	388,840	426,939	607,361	571,616	598,207
30	Maluku	266,065	291,191	7,316,138	421,500	459,189	445,158	619,270	932,195	952,000
31	Malut	253,175	326,650	11,100,000	538,594	589,209	622,921	776,918	797,905	767,039
32	Pabar	-	-	12,600,000	457,152	607,739	775,879	806,802	1,225,857	1,031,901
33	Papua	306,726	442,143	30,200,000	565,412	645,812	700,368	846,595	918,457	994,730
	<b>Rata</b>	<b>291,872</b>	<b>379,706</b>	<b>365,149</b>	<b>50,371</b>	<b>54,250</b>	<b>60,247</b>	<b>75,450</b>	<b>90,570</b>	<b>95,833</b>

Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada data



**Lampiran 12. Ranking Pengeluaran Maksimum Kelas Menengah Menurut Provinsi (diurutkan menurut pengeluaran terbesar tahun 2012); Kriteria: 60 persen**

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	NAD	19	-	33	18	16	16	22	22	19
2	Sumut	14	14	32	15	15	15	18	18	17
3	Sumbar	12	11	31	11	14	12	13	15	13
4	Riau	4	9	30	4	5	5	8	8	4
5	Jambi	16	15	29	16	17	20	20	20	22
6	Sumsel	25	23	28	20	19	19	23	24	25
7	Bengkulu	26	22	27	23	21	25	21	23	24
8	Lampung	29	28	26	21	27	31	31	28	29
9	Babel	6	5	25	5	4	4	5	7	6
10	Kep. Riau	-	-	24	3	2	3	3	2	2
11	DKI	1	1	23	1	1	1	1	1	1
12	Jabar	11	12	22	13	18	17	17	17	15
13	Jateng	22	24	21	28	28	29	32	30	28
14	DIY	2	3	20	8	7	8	6	6	5
15	Jatim	21	19	19	26	26	23	30	29	31
16	Banten	7	7	18	6	9	9	7	9	9
17	Bali	5	6	17	7	10	10	4	5	7
18	NTB	28	29	16	31	29	27	29	31	30
19	NTT	30	30	15	33	33	33	33	33	33
20	Kalbar	18	18	14	24	20	18	24	16	18
21	Kalteng	13	16	13	14	13	14	15	11	12
22	Kalsel	10	13	12	9	12	11	10	10	10
23	Kaltim	3	4	11	2	3	2	2	3	3
24	Sulut	8	10	10	17	25	22	12	12	8
25	Sulteng	20	21	9	27	24	21	19	19	21
26	Sulsel	24	27	8	22	22	24	16	25	23
27	Sultra	23	26	7	30	31	28	25	27	20
28	Gorontalo	27	25	6	32	32	32	27	26	26
29	Sulbar	-	-	5	29	30	30	28	32	32
30	Maluku	15	20	4	25	23	26	26	13	16
31	Malut	17	17	3	12	11	13	14	21	27
32	Pabar	-	-	2	19	8	6	11	4	11
33	Papua	9	8	1	10	6	7	9	14	14

Sumber: Lampiran 11; Ket: - tidak ada data

**Lampiran 13. Pengeluaran rata-rata Kelas Menengah Menurut Provinsi; Kriteria: 60 persen**

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	NAD	171,079	-	156,133	316,409	353,599	396,570	447,696	502,573	534,943
2	Sumut	186,050	230,950	195,625	316,905	347,038	383,310	444,303	505,096	552,313
3	Sumbar	191,616	236,374	208,501	351,449	362,789	414,895	488,980	566,713	603,454
4	Riau	259,741	275,521	206,792	439,880	439,599	492,177	555,931	666,123	697,369
5	Jambi	183,832	222,183	217,109	319,591	344,569	364,639	446,689	512,929	537,741
6	Sumsel	156,902	185,170	220,000	288,091	319,998	350,527	401,762	465,210	492,105
7	Bengkulu	154,731	181,555	239,839	267,397	300,436	326,873	404,527	461,165	513,418
8	Lampung	137,348	172,212	261,954	253,628	268,582	283,223	351,322	404,261	436,347
9	Babel	237,150	334,973	270,689	443,501	491,866	529,486	615,815	691,552	762,032
10	Kep. Riau	-	407,321	267,362	466,783	573,128	623,497	643,558	884,444	940,075
11	DKI	413,826	500,852	266,243	627,480	706,754	780,011	860,641	1,030,860	1,170,182
12	Jabar	193,914	231,286	281,600	317,728	323,192	359,480	425,194	490,327	529,194
13	Jateng	163,153	181,995	254,193	243,445	258,469	287,404	342,754	377,186	409,454
14	DIY	235,751	291,315	331,813	333,304	340,328	381,658	468,996	555,168	605,941
15	Jawa Timur	159,944	184,214	353,537	253,971	275,583	309,204	358,668	393,293	408,092
16	Banten	222,919	275,075	334,342	370,352	373,655	413,679	516,421	584,317	614,607
17	Bali	247,719	305,672	572,668	381,726	373,570	422,234	542,412	664,714	704,117
18	NTB	140,609	169,240	322,397	221,462	248,394	275,524	335,137	371,523	424,014
19	NTT	118,221	124,874	288,528	180,219	199,211	229,955	276,247	327,937	340,638

20	Kalbar	168,253	197,982	261,998	266,200	312,329	360,236	403,769	493,951	522,005
21	Kalteng	197,437	219,427	286,927	330,823	369,634	401,753	481,846	592,633	639,405
22	Kalsel	196,704	234,395	330,607	359,430	368,467	413,367	507,532	591,912	637,535
23	Kaltim	284,142	332,126	318,623	450,037	490,062	581,061	695,504	783,283	849,391
24	Sulut	211,589	250,488	317,422	310,943	302,727	336,156	448,283	543,530	579,094
25	Sulteng	159,460	183,461	235,069	242,111	281,644	333,610	399,297	461,826	485,939
26	Sulsel	154,711	172,784	252,570	247,315	275,084	288,881	397,769	427,249	471,691
27	Sultra	161,013	171,791	539,610	222,459	233,364	266,847	350,141	408,596	474,714
28	Gorontalo	143,109	170,372	425,253	208,191	223,931	246,021	329,962	407,671	427,249
29	Sulbar	-	-	263,350	222,695	249,741	280,532	351,718	339,360	378,208
30	Maluku	181,032	187,462	375,787	250,221	279,307	297,814	368,629	519,600	556,154
31	Malut	169,011	204,040	244,554	325,736	357,949	407,332	488,278	487,221	502,957
32	Pabar	-	-	241,874	278,108	382,342	500,210	463,303	671,243	589,483
33	Papua	188,439	232,062	494,772	288,522	336,034	371,065	424,107	474,547	500,034
	<b>Rata-rata</b>	<b>175,437</b>	<b>214,157</b>	<b>298,113</b>	<b>315,034</b>	<b>344,345</b>	<b>385,128</b>	<b>455,672</b>	<b>535,091</b>	<b>572,421</b>

Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada data



**Lampiran 14.** Ranking Pengeluaran Rata-rata Kelas Menengah Menurut Provinsi (diurutkan menurut pengeluaran terbesar tahun 2012); Kriteria: 60 persen

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	NAD	17	-	33	16	13	13	15	17	17
2	Sumut	14	14	32	15	14	14	17	16	15
3	Sumbar	12	10	30	9	11	8	9	11	11
4	Riau	3	7	31	5	5	6	5	6	6
5	Jambi	15	15	29	13	15	17	16	15	16
6	Sumsel	24	20	28	19	19	20	22	22	23
7	Bengkulu	25	24	26	21	22	23	20	24	20
8	Lampung	29	26	21	24	27	28	28	28	27
9	Babel	5	3	16	4	3	4	4	4	4
10	Kep. Riau	-	-	17	2	2	2	3	2	2
11	DKI	1	1	18	1	1	1	1	1	1
12	Jabar	11	13	15	14	18	19	18	19	18
13	Jateng	20	23	22	27	28	27	30	30	30
14	DIY	6	6	8	10	16	15	12	12	10
15	Jawa Timur	22	21	6	23	25	24	26	29	31
16	Banten	7	8	7	7	7	9	7	10	9
17	Bali	4	5	1	6	8	7	6	7	5
18	NTB	28	29	10	31	30	30	31	31	29
19	NTT	30	30	13	33	33	33	33	33	33
20	Kalbar	19	18	20	22	20	18	21	18	19
21	Kalteng	9	16	14	11	9	12	11	8	7
22	Kalsel	10	11	9	8	10	10	8	9	8
23	Kaltim	2	4	11	3	4	3	2	3	3
24	Sulut	8	9	12	17	21	21	14	13	13
25	Sulteng	23	22	27	28	23	22	23	23	24
26	Sulsel	26	25	23	26	26	26	24	25	26
27	Sultra	21	27	2	30	31	31	29	26	25
28	Gorontalo	27	28	4	32	32	32	32	27	28
29	Sulbar	-	-	19	29	29	29	27	32	32
30	Maluku	16	19	5	25	24	25	25	14	14
31	Malut	18	17	24	12	12	11	10	20	21
32	Pabar	-	-	25	20	6	5	13	5	12
33	Papua	13	12	3	18	17	16	19	21	22

Sumber: Lampiran 13; Ket: - tidak ada data

**Lampiran 15. Indeks Gini Kelas Menengah Menurut Provinsi; Kriteria 60 persen**

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	NAD	0.1351	-	0.1450	0.1579	0.1545	0.1517	0.1618	0.1747	0.1741
2	Sumut	0.1350	0.1545	0.1437	0.1582	0.1540	0.1491	0.1690	0.1806	0.1762
3	Sumbar	0.1368	0.1575	0.1448	0.1601	0.1510	0.1516	0.1710	0.1749	0.1840
4	Riau	0.1313	0.1495	0.1384	0.1501	0.1469	0.1474	0.1671	0.1726	0.1719
5	Jambi	0.1325	0.1543	0.1420	0.1580	0.1538	0.1472	0.1746	0.1820	0.1758
6	Sumsel	0.1376	0.1560	0.1445	0.1602	0.1573	0.1537	0.1759	0.1833	0.1768
7	Bengkulu	0.1349	0.1565	0.1489	0.1601	0.1589	0.1466	0.1799	0.1923	0.1739
8	Lampung	0.1325	0.1573	0.1451	0.1658	0.1571	0.1416	0.1705	0.1815	0.1808
9	Babel	0.1287	0.1366	0.1293	0.1381	0.1347	0.1206	0.1449	0.1601	0.1466
10	Kep. Riau	-	0.1426	0.1363	0.1392	0.1341	0.1278	0.1474	0.1496	0.1695
11	Jakarta	0.0924	0.1126	0.1045	0.1131	0.1131	0.1092	0.1219	0.1384	0.1409
12	Jabar	0.1350	0.1572	0.1480	0.1650	0.1588	0.1539	0.1731	0.1829	0.1834
13	Jateng	0.1358	0.1527	0.1429	0.1595	0.1587	0.1515	0.1712	0.1806	0.1786
14	DIY	0.1376	0.1592	0.1492	0.1639	0.1638	0.1593	0.1748	0.1783	0.1653
15	Jatim	0.1362	0.1573	0.1453	0.1623	0.1596	0.1544	0.1711	0.1775	0.1713
16	Banten	0.1319	0.1539	0.1470	0.1601	0.1575	0.1551	0.1688	0.1774	0.1767
17	Bali	0.1272	0.1498	0.1406	0.1541	0.1546	0.1464	0.1754	0.1808	0.1791
18	NTB	0.1377	0.1539	0.1469	0.1658	0.1559	0.1536	0.1794	0.1776	0.1754
19	NTT	0.1362	0.1564	0.1445	0.1617	0.1629	0.1577	0.1698	0.1773	0.1742
20	Kalbar	0.1352	0.1545	0.1463	0.1644	0.1568	0.1563	0.1708	0.1845	0.1780
21	Kalteng	0.1353	0.1515	0.1411	0.1607	0.1561	0.1596	0.1722	0.1844	0.1736
22	Kalsel	0.1355	0.1552	0.1466	0.1626	0.1560	0.1520	0.1724	0.1758	0.1747
23	Kaltim	0.1265	0.1466	0.1350	0.1461	0.1465	0.1514	0.1579	0.1632	0.1625
24	Sulut	0.1335	0.1575	0.1455	0.1631	0.1548	0.1533	0.1830	0.1869	0.1868
25	Sulteng	0.1366	0.1585	0.1459	0.1687	0.1615	0.1614	0.1781	0.1825	0.1829
26	Sulsel	0.1372	0.1566	0.1491	0.1666	0.1628	0.1565	0.1743	0.1795	0.1810
27	Sultra	0.1357	0.1563	0.1464	0.1661	0.1581	0.1641	0.1707	0.1769	0.1852
28	Gorontalo	0.1366	0.1556	0.1468	0.1665	0.1588	0.1548	0.1856	0.1857	0.1759
29	Sulbar	-	-	0.1515	0.1693	0.1539	0.1589	0.1750	0.1876	0.1778
30	Maluku	0.1379	0.1596	0.1494	0.1674	0.1666	0.1451	0.1764	0.1898	0.1846
31	Malut	0.1393	0.1608	0.1468	0.1602	0.1610	0.1511	0.1689	0.1756	0.1750
32	Pabar	-	-	0.1498	0.1678	0.1596	0.1570	0.1783	0.1815	0.1808
33	Papua	0.1428	0.1682	0.1539	0.1654	0.1679	0.1618	0.1968	0.1965	0.1938

Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada data



**Lampiran 16. Ranking Indeks Gini Kelas Menengah Menurut Provinsi;  
Kriteria 60 persen (diurutkan menurut tahun 2012)**

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jakarta	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Babel	4	2	2	2	3	2	2	3	2
3	Kaltim	2	4	3	4	4	12	4	4	3
4	DIY	25	27	29	21	31	29	22	15	4
5	Kepri	-	3	4	3	2	3	3	2	5
6	Jatim	20	22	16	18	25	21	15	13	6
7	Riau	5	5	5	5	5	9	6	5	7
8	Kalteng	15	7	7	16	15	30	17	26	8
9	Bengkulu	10	19	27	12	24	7	30	32	9
10	Aceh	13	-	14	7	10	15	5	6	10
11	NTT	19	18	11	17	30	27	10	11	11
12	Kalsel	16	14	21	19	14	16	18	9	12
13	Malut	29	29	22	14	27	11	8	8	13
14	NTB	27	10	24	25	13	18	29	14	14
15	Jambi	7	11	8	8	7	8	21	22	15
16	Gorontalo	22	15	23	28	23	22	32	28	16
17	Sumut	11	12	10	9	9	10	9	17	17
18	Banten	6	9	25	11	19	23	7	12	18
19	Sumsel	26	16	12	15	18	19	25	25	19
20	Sulbar	-	-	32	33	8	28	23	30	20
21	Kalbar	14	13	19	22	16	24	13	27	21
22	Jateng	18	8	9	10	21	13	16	18	22
23	Bali	3	6	6	6	11	6	24	19	23
24	Lampung	8	22	15	26	17	4	11	20	24
25	Pabar	-	-	31	31	26	26	28	21	25
26	Sulsel	24	20	28	29	29	25	20	16	26
27	Sulteng	21	26	18	32	28	31	27	23	27
28	Jabar	11	21	26	23	22	20	19	24	28
29	Sumbar	23	24	13	13	6	14	14	7	29
30	Maluku	28	28	30	30	32	5	26	31	30
31	Sultra	17	17	20	27	20	33	12	10	31
32	Sulut	9	25	17	20	12	17	31	29	32
33	Papua	30	30	33	24	33	32	33	33	33

Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada

**Lampiran 17. Pengeluaran Minimum Kelas Menengah Menurut Provinsi; Kriteria WB**

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	NAD	149,091	-	229,230	272,484	297,657	339,695	386,950	423,460	444,810
2	Sumut	27,365	-	61,323	67,561	83,349	60,090	52,060	129,058	110,230
3	Sumbar	161,631	195,929	226,610	269,329	296,516	326,826	369,710	413,047	459,226
4	Riau	32,603	11,968	35,345	65,293	69,540	90,599	86,716	79,675	119,094
5	Jambi	164,411	196,463	230,518	289,755	306,050	351,199	402,592	468,119	480,908
6	Sumsel	28,964	24,786	44,065	84,830	76,223	89,445	98,605	102,837	70,986
7	Bengkulu	217,517	230,818	284,595	371,172	368,324	408,311	456,051	544,177	555,925
8	Lampung	18,714	34,412	67,214	83,266	105,017	139,036	83,226	135,514	128,968
9	Babel	163,333	189,197	227,994	273,128	294,992	319,903	369,140	425,727	449,557
10	Kep. Riau	50,913	31,952	57,460	77,373	85,793	84,129	131,030	149,185	133,645
11	DKI	134,925	157,788	199,964	242,533	270,878	298,132	325,795	377,613	396,976
12	Jabar	26,786	35,824	44,524	70,475	90,851	88,734	77,842	98,265	120,582
13	Jateng	135,106	154,969	197,441	219,472	251,782	283,058	321,071	361,061	432,619
14	DIY	36,179	25,073	65,878	70,396	76,917	103,371	98,483	140,321	90,683
15	Jawa Timur	120,260	145,000	179,748	210,447	227,431	243,649	289,607	326,758	355,336
16	Banten	20,945	32,446	46,825	73,706	75,918	74,196	92,643	90,145	121,161
17	Bali	206,888	282,630	310,238	389,453	429,995	433,030	522,870	581,819	648,188
18	NTB	48,573	62,414	86,287	109,071	138,151	137,126	134,299	183,733	237,634

19	NTT	353,356	328,417	386,935	401,140	485,727	528,727	549,874	734,683	733,219
20	Kalbar	-	2,139	50,833	134,522	94,895	81,178	165,133	144,361	150,536
21	Kalteng	-	423,708	487,685	533,022	597,366	652,834	708,808	797,327	880,492
22	Kalsel	90,772	78,085	116,991	158,623	146,436	177,493	153,718	202,766	195,691
23	Kaltim	167,161	191,636	230,897	258,982	267,203	301,773	342,526	385,731	410,394
24	Sulut	23,681	33,268	56,548	73,287	47,791	67,439	77,019	86,117	98,289
25	Sulteng	142,542	156,911	187,224	206,876	219,422	246,408	283,681	305,707	326,402
26	Sulsel	25,522	19,745	44,765	45,241	67,734	63,461	66,445	91,027	105,762
27	Sultra	179,680	209,840	242,893	260,312	265,463	301,123	346,848	409,816	474,453
28	Gorontalo	25,778	41,960	62,333	69,882	86,391	67,248	86,647	120,730	103,231
29	Sulbar	137,994	155,127	185,887	212,537	229,740	259,137	296,502	323,363	343,728
30	Maluku	22,167	12,500	54,738	48,707	41,350	75,249	76,002	86,335	108,660
31	Malut	192,568	221,005	256,730	299,409	305,913	339,388	406,399	456,287	488,152
32	Pabar	31,947	42,961	52,593	75,633	64,321	98,205	104,499	107,940	142,811
33	Papua	211,200	253,724	299,000	318,225	316,082	360,588	429,345	508,619	574,749
	<b>Rata-rata</b>	<b>108,018</b>	<b>128,474</b>	<b>160,949</b>	<b>192,004</b>	<b>205,491</b>	<b>226,993</b>	<b>254,307</b>	<b>296,707</b>	<b>317,973</b>

Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada



**Lampiran 18.** Ranking Pengeluaran Minimum Kelas Menengah Menurut Provinsi (diurutkan menurut pengeluaran terbesar tahun 2012); Kriteria WB

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kalteng	32	1	1	1	1	1	1	1	1
2	NTT	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Bali	4	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Papua	3	4	4	5	5	5	5	5	4
5	Bengkulu	2	5	5	4	4	4	4	4	5
6	Malut	5	6	6	6	7	8	6	7	6
7	Jambi	8	8	9	7	6	6	7	6	7
8	Sultra	6	7	7	11	13	12	11	11	8
9	Sumbar	10	9	12	10	9	9	9	10	9
10	Babel	9	11	11	8	10	10	10	8	10
11	NAD	11	-	10	9	8	7	8	9	11
12	Jateng	14	15	14	14	14	14	14	14	12
13	Kaltim	7	10	8	12	12	11	12	12	13
14	DKI	15	12	13	13	11	13	13	13	14
15	Jawa Timur	16	16	17	16	16	17	16	15	15
16	Sulbar	-	-	16	15	15	15	15	16	16
17	Sulteng	12	13	15	17	17	16	17	17	17
18	NTB	19	18	19	20	19	20	20	19	18
19	Kalsel	17	17	18	18	18	18	19	18	19
20	Kalbar	32	31	28	19	21	27	18	21	20
21	Pabar	-	-	27	24	31	22	22	26	21
22	Kep. Riau	-	-	24	23	24	26	21	20	22
23	Lampung	31	22	20	22	20	19	28	23	23
24	Banten	30	24	29	25	28	29	25	30	24
25	Jabar	25	21	31	27	22	25	29	28	25
26	Riau	21	30	33	31	29	23	26	33	26
27	Sumut	24	32	23	30	25	33	33	24	27
28	Maluku	29	29	26	32	33	28	31	31	28
29	Sulsel	27	28	30	33	30	32	32	29	29
30	Gorontalo	26	20	22	29	23	31	27	25	30
31	Sulut	28	23	25	26	32	30	30	32	31
32	DIY	20	26	21	28	26	21	24	22	32
33	Sumsel	23	27	32	21	27	24	23	27	33

Sumber: Lampiran 17

**Lampiran 19. Pengeluaran Maksimum Kelas Menengah Menurut Provinsi; Kriteria WB**

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	NAD	247,983	-	405,208	474,798	529,916	582,457	673,948	778,714	853,548
2	Sumut	4,102,047	-	4,668,699	3,903,532	3,901,565	2,627,996	3,513,767	32,400,000	7,044,144
3	Sumbar	270,234	355,212	394,092	490,003	533,795	594,426	696,283	820,490	863,785
4	Riau	5,572,301	5,497,053	4,247,899	5,173,725	6,661,924	3,738,266	25,400,000	14,900,000	11,100,000
5	Jambi	287,240	374,525	409,369	563,035	562,177	640,981	795,382	912,110	1,009,839
6	Sumsel	2,645,718	4,038,652	4,739,183	5,551,068	7,212,467	4,758,005	4,984,061	20,200,000	16,800,000
7	Bengkulu	400,684	438,790	506,619	700,550	698,917	782,008	885,768	1,107,833	1,187,670
8	Lampung	5,750,000	7,889,343	5,013,540	4,873,986	5,120,398	7,874,398	6,341,978	7,128,161	40,600,000
9	Babel	255,526	338,746	388,615	489,208	525,932	535,729	681,777	814,671	821,930
10	Kep. Riau	2,642,103	5,639,921	3,545,214	3,598,723	4,006,466	1,997,439	6,921,593	7,460,221	9,903,486
11	DKI	231,178	278,741	345,476	447,452	490,981	537,866	668,670	762,337	785,259
12	Jabar	1,496,127	3,328,308	22,200,000	4,013,527	4,313,673	3,900,951	5,809,063	18,000,000	15,800,000
13	Jateng	228,480	279,122	362,286	422,704	467,890	487,561	678,522	777,375	797,318
14	DIY	2,225,819	6,133,265	3,786,667	3,698,668	22,000,000	2,768,255	6,940,054	11,900,000	15,200,000
15	Jawa Timur	197,930	269,662	312,791	429,017	422,253	425,751	558,763	656,634	686,583
16	Banten	2,539,168	4,206,468	2,678,325	3,248,718	5,897,340	7,240,846	17,600,000	16,500,000	12,400,000
17	Bali	339,841	518,396	527,470	644,713	721,468	816,705	930,942	1,111,017	1,166,867
18	NTB	1,966,246	3,437,798	3,757,815	4,561,492	2,502,431	3,201,854	8,703,298	3,772,225	6,886,508

19	NTT	637,514	673,122	732,024	722,753	877,489	957,679	999,905	1,384,033	1,649,558
20	Kalbar	-	4,940,238	5,770,834	4,464,563	10,200,000	5,124,257	4,878,478	17,700,000	11,600,000
21	Kalteng	-	816,340	899,597	971,828	1,105,181	1,270,153	1,389,721	1,834,710	2,111,127
22	Kalsel	32,500,000	21,600,000	79,000,000	20,900,000	20,600,000	7,621,447	18,400,000	17,900,000	20,300,000
23	Kaltim	287,893	372,633	432,147	519,156	522,489	565,958	710,149	850,238	966,154
24	Sulut	5,476,076	9,125,321	6,038,381	6,177,914	30,800,000	153,000,000	8,678,425	35,700,000	14,700,000
25	Sulteng	235,535	273,387	312,996	377,495	401,656	433,176	548,904	624,401	692,270
26	Sulsel	3,167,071	5,479,167	5,017,799	5,133,193	4,144,445	5,026,765	10,800,000	26,200,000	27,300,000
27	Sultra	469,746	599,820	702,464	603,836	641,899	686,582	930,305	1,128,037	1,172,289
28	Gorontalo	3,218,308	26,700,000	7,034,286	4,083,539	4,189,509	7,019,819	7,443,686	6,957,111	27,100,000
29	Sulbar	237,967	292,123	331,279	404,505	438,210	492,454	580,436	641,838	631,651
30	Maluku	18,900,000	11,200,000	6,594,321	7,581,341	5,442,242	9,048,244	9,991,074	29,000,000	28,800,000
31	Malut	332,381	468,551	492,566	624,618	606,549	667,640	919,806	1,034,070	1,073,607
32	Pabar	6,885,500	99,000,000	7,316,138	5,583,354	6,537,053	5,667,897	27,500,000	39,000,000	9,031,543
33	Papua	370,819	488,951	555,089	608,316	594,841	664,282	936,182	1,201,906	1,158,289
	<b>Rata-rata</b>	<b>3,358,627</b>	<b>7,259,795</b>	<b>5,439,975</b>	<b>3,092,162</b>	<b>4,656,702</b>	<b>7,325,995</b>	<b>5,681,544</b>	<b>9,732,065</b>	<b>8,854,346</b>

Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada



**Lampiran 20. Ranking Pengeluaran Maksimum Kelas Menengah Menurut Provinsi (diurutkan menurut pengeluaran terbedar tahun 2012); Ktireria WB**

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	NAD	26	-	26	28	26	26	29	28	27
2	Sumut	7	32	11	13	15	15	16	3	15
3	Sumbar	24	25	27	26	25	25	26	26	26
4	Riau	5	9	12	6	6	12	2	11	12
5	Jambi	23	23	25	24	24	24	24	24	24
6	Sumsel	10	13	10	5	5	10	14	6	6
7	Bengkulu	18	22	22	19	20	20	23	22	19
8	Lampung	4	6	9	8	10	3	12	14	1
9	Babel	25	26	28	27	27	29	27	27	28
10	Kep. Riau	-	-	15	15	14	16	11	13	13
11	DKI	29	29	30	29	29	28	30	30	30
12	Jabar	15	15	2	12	11	11	13	7	7
13	Jateng	30	28	29	31	30	31	28	29	29
14	DIY	13	7	13	14	2	14	10	12	8
15	Jawa Timur	31	31	33	30	32	33	32	31	32
16	Banten	12	12	16	16	8	5	4	10	10
17	Bali	20	19	21	20	19	19	20	21	21
18	NTB	14	14	14	9	16	13	7	16	16
19	NTT	16	17	18	18	18	18	18	18	18
20	Kalbar	32	11	7	10	4	8	15	9	11
21	Kalteng	32	16	17	17	17	17	17	17	17
22	Kalsel	1	3	1	1	3	4	3	8	5
23	Kaltim	22	24	24	25	28	27	25	25	25
24	Sulut	6	5	6	3	1	1	8	2	9
25	Sulteng	28	30	32	33	33	32	33	33	31
26	Sulsel	9	10	8	7	13	9	5	5	3
27	Sultra	17	18	19	23	21	21	21	20	20
28	Gorontalo	8	2	4	11	12	6	9	15	4
29	Sulbar	-	-	31	32	31	30	31	32	33
30	Maluku	2	4	5	2	9	2	6	4	2
31	Malut	21	21	23	21	22	22	22	23	23
32	Pabar	-	-	3	4	7	7	1	1	14
33	Papua	19	20	20	22	23	23	19	19	22

Sumber: Lampiran 19

**Lampiran 21. Pengeluaran Rata-rata Kelas Menengah Menurut Provinsi;  
Kriteria WB**

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	NAD	189,182	-	300,370	354,425	395,337	442,377	502,481	569,251	608,029
2	Sumut	191,739	-	330,216	357,086	403,617	446,823	509,180	633,892	688,514
3	Sumbar	206,804	259,844	293,465	356,876	391,069	430,630	503,870	578,710	630,314
4	Riau	209,979	258,123	293,718	373,005	420,712	464,755	536,982	604,028	658,547
5	Jambi	215,317	268,900	302,547	399,185	407,477	467,240	558,920	653,483	700,794
6	Sumsel	230,211	282,485	316,872	407,134	432,023	485,462	564,774	746,332	780,632
7	Bengkulu	293,744	311,509	372,257	495,981	497,110	560,085	632,043	768,228	813,781
8	Lampung	300,504	333,845	389,443	488,726	525,654	593,131	612,900	823,460	962,306
9	Babel	201,960	248,307	290,586	358,472	387,699	404,778	510,046	591,494	609,422
10	Kep. Riau	201,234	262,281	303,557	373,116	402,374	416,002	507,219	620,797	663,541
11	DKI	174,386	207,062	257,354	324,824	360,316	394,204	460,293	538,975	565,129
12	Jabar	170,407	212,486	270,630	342,449	384,183	417,694	481,060	569,326	598,461
13	Jateng	172,300	201,049	258,888	301,064	340,831	364,652	467,640	539,222	586,001
14	DIY	192,514	201,681	252,256	302,777	388,373	393,525	503,401	576,066	653,305
15	Jawa Timur	152,189	194,063	233,133	288,153	303,975	317,135	403,452	461,494	497,553
16	Banten	163,188	218,716	248,876	320,786	331,491	355,280	423,635	513,627	541,851
17	Bali	263,081	377,625	400,885	493,084	551,518	598,306	692,049	789,349	857,770
18	NTB	274,577	386,133	412,447	501,202	561,117	619,175	703,205	832,916	928,218
19	NTT	464,288	459,501	517,896	533,066	651,204	703,816	737,618	993,773	1,097,038
20	Kalbar	-	414,694	470,770	625,008	689,514	718,840	814,053	1,037,046	981,279
21	Kalteng	-	565,366	644,777	707,913	797,369	883,343	982,746	1,210,714	1,373,570
22	Kalsel	516,412	701,777	729,371	801,743	891,725	977,068	1,078,447	1,358,748	1,574,390
23	Kaltim	217,279	263,848	313,477	361,902	369,015	406,994	488,311	570,910	624,576
24	Sulut	233,515	294,478	339,854	372,433	398,342	455,084	499,147	652,552	734,529
25	Sulteng	181,507	203,341	238,799	272,936	290,693	321,395	391,058	434,338	476,290
26	Sulsel	197,615	225,843	260,377	289,303	315,936	349,845	413,409	513,622	580,285
27	Sultra	276,711	345,994	389,705	384,993	400,277	447,441	554,727	649,717	709,654
28	Gorontalo	311,424	388,721	413,976	403,756	474,747	526,971	625,503	745,485	838,156
29	Sulbar	179,132	208,559	244,076	286,314	312,147	348,701	407,658	448,778	461,691
30	Maluku	197,179	231,284	266,306	299,709	337,106	374,629	419,749	521,507	537,434
31	Malut	249,266	314,521	354,354	422,713	428,434	474,114	598,288	685,385	719,860
32	Pabar	263,181	371,851	364,164	426,397	462,867	529,541	665,145	775,429	836,969
33	Papua	277,692	347,220	396,755	432,668	422,535	474,571	632,744	772,319	820,882
	<b>Rata-rata</b>	<b>237,694</b>	<b>308,423</b>	<b>347,641</b>	<b>407,854</b>	<b>446,266</b>	<b>489,806</b>	<b>572,174</b>	<b>690,332</b>	<b>748,811</b>

Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada

**Lampiran 22.** Ranking Pengeluaran rata-rata Kelas Menengah Menurut Provinsi (diurutkan menurut pengeluaran terbedar tahun 2012); Kriteria WB

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	NAD	24	-	20	23	20	19	22	25	24
2	Sumut	23	32	15	21	16	18	18	17	17
3	Sumbar	17	19	22	22	21	20	20	21	21
4	Riau	16	20	21	17	14	15	16	19	19
5	Jambi	15	16	19	14	15	14	14	14	16
6	Sumsel	13	15	16	12	11	11	13	11	12
7	Bengkulu	5	13	11	6	8	8	9	10	11
8	Lampung	4	11	10	8	7	7	11	6	5
9	Babel	18	21	23	20	23	24	17	20	23
10	Kep. Riau	-	-	18	16	17	22	19	18	18
11	DKI	27	27	28	25	26	25	27	27	28
12	Jabar	29	25	24	24	24	21	25	24	25
13	Jateng	28	30	27	28	27	28	26	26	26
14	DIY	22	29	29	27	22	26	21	22	20
15	Jawa Timur	31	31	33	31	32	33	32	31	31
16	Banten	30	24	30	26	29	29	28	29	29
17	Bali	10	7	7	7	6	6	6	7	7
18	NTB	8	6	6	5	5	5	5	5	6
19	NTT	2	3	3	4	4	4	4	4	3
20	Kalbar	32	4	4	3	3	3	3	3	4
21	Kalteng	32	2	2	2	2	2	2	2	2
22	Kalsel	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Kaltim	14	17	17	19	25	23	24	23	22
24	Sulut	12	14	14	18	19	16	23	15	13
25	Sulteng	25	28	32	33	33	32	33	33	32
26	Sulsel	20	23	26	30	30	30	30	30	27
27	Sultra	7	10	9	15	18	17	15	16	15
28	Gorontalo	3	5	5	13	9	10	10	12	8
29	Sulbar	-	-	31	32	31	31	31	32	33
30	Maluku	21	22	25	29	28	27	29	28	30
31	Malut	11	12	13	11	12	13	12	13	14
32	Pabar	-	-	12	10	10	9	7	8	9
33	Papua	6	9	8	9	13	12	8	9	10

Sumber: Lampiran 21

**Lampiran 23. Indeks Gini Kelas Menengah Menurut Provinsi; Kriteria World Bank**

No	Provinsi	Tahun								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	NAD	0.0975	-	0.1066	0.1163	0.1174	0.1120	0.1137	0.1300	0.1283
2	Sumut	0.0964	0.1146	0.1067	0.1165	0.1102	0.1092	0.1230	0.1294	0.1301
3	Sumbar	0.0981	0.1160	0.1071	0.1170	0.1096	0.1131	0.1208	0.1264	0.1287
4	Riau	0.0978	0.1128	0.1041	0.1147	0.1116	0.1120	0.1214	0.1278	0.1331
5	Jambi	0.0975	0.1145	0.1050	0.1140	0.1100	0.1083	0.1235	0.1285	0.1299
6	Sumsel	0.0972	0.1134	0.1060	0.1159	0.1172	0.1138	0.1229	0.1302	0.1229
7	Bengkulu	0.0993	0.1156	0.1075	0.1123	0.1144	0.1083	0.1195	0.1310	0.1240
8	Lampung	0.0957	0.1138	0.1056	0.1225	0.1133	0.0989	0.1190	0.1270	0.1253
9	Babel	0.0953	0.1103	0.1029	0.1132	0.1104	0.0976	0.1158	0.1309	0.1222
10	Kep. Riau	-	0.1118	0.1029	0.1113	0.1104	0.1021	0.1129	0.1128	0.1310
11	DKI	0.0819	0.0965	0.0910	0.0999	0.0991	0.0941	0.1065	0.1161	0.1226
12	Jabar	0.0980	0.1159	0.1077	0.1199	0.1121	0.1119	0.1211	0.1300	0.1307
13	Jateng	0.0973	0.1126	0.1046	0.1163	0.1145	0.1094	0.1204	0.1280	0.1265
14	DIY	0.0980	0.1168	0.1112	0.1211	0.1146	0.1146	0.1237	0.1312	0.1249
15	Jawa Timur	0.0973	0.1149	0.1065	0.1178	0.1132	0.1113	0.1212	0.1267	0.1242
16	Banten	0.0961	0.1164	0.1063	0.1178	0.1158	0.1141	0.1241	0.1311	0.1311
17	Bali	0.0969	0.1158	0.1057	0.1162	0.1124	0.1081	0.1254	0.1314	0.1306
18	NTB	0.0981	0.1144	0.1056	0.1181	0.1129	0.1101	0.1251	0.1256	0.1262

19	NTT	0.0981	0.1121	0.1063	0.1185	0.1158	0.1115	0.1196	0.1303	0.1264
20	Kalbar	0.0977	0.1123	0.1066	0.1194	0.1132	0.1121	0.1205	0.1295	0.1304
21	Kalteng	0.0994	0.1134	0.1047	0.1197	0.1136	0.1129	0.1258	0.1305	0.1273
22	Kalsel	0.0997	0.1145	0.1078	0.1184	0.1127	0.1126	0.1224	0.1318	0.1274
23	Kaltim	0.0967	0.1120	0.1037	0.1074	0.1074	0.1127	0.1114	0.1233	0.1262
24	Sulut	0.0979	0.1173	0.1077	0.1165	0.1120	0.1106	0.1249	0.1306	0.1287
25	Sulteng	0.0992	0.1163	0.1060	0.1181	0.1121	0.1151	0.1247	0.1305	0.1284
26	Sulsel	0.0980	0.1142	0.1084	0.1174	0.1146	0.1120	0.1204	0.1249	0.1267
27	Sultra	0.0942	0.1148	0.1071	0.1125	0.1125	0.1151	0.1190	0.1218	0.1266
28	Gorontalo	0.0974	0.1122	0.1083	0.1206	0.1163	0.1120	0.1227	0.1296	0.1241
29	Sulbar	-	-	0.1083	0.1271	0.1094	0.1127	0.1233	0.1294	0.1317
30	Maluku	0.1011	0.1152	0.1074	0.1190	0.1131	0.0990	0.1217	0.1330	0.1303
31	Malut	0.0974	0.1177	0.1094	0.1131	0.1127	0.1055	0.1240	0.1253	0.1252
32	Pabar	-	-	0.1051	0.1269	0.1125	0.1116	0.1207	0.1232	0.1296
33	Papua	0.1031	0.1203	0.1095	0.1172	0.1173	0.1131	0.1292	0.1291	0.1305
	<b>Rata-rata</b>	<b>0.0973</b>	<b>0.1139</b>	<b>0.1060</b>	<b>0.1168</b>	<b>0.1126</b>	<b>0.1096</b>	<b>0.1209</b>	<b>0.1278</b>	<b>0.1276</b>

Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada

**Lampiran 24. Ranking Indeks Gini Kelas Menengah Menurut Provinsi;  
Kriteria World Bank (diurutkan menurut tahun 2012)**

No	Provinsi	Tahun									
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	Babel	6	5	2	7	7	2	5	27	1	
2	DKI	4	4	1	1	1	1	1	2	2	
3	Sumsel	12	13	14	10	31	29	21	22	3	
4	Bengkulu	29	24	24	4	24	8	8	28	4	
5	Gorontalo	15	9	29	29	30	18	20	19	5	
6	Jawa Timur	13	22	17	20	20	14	16	10	6	
7	DIY	24	30	33	30	26	31	25	30	7	
8	Malut	16	32	31	6	16	6	26	7	8	
9	Lampung	7	15	11	31	22	3	6	11	9	
10	NTB	26	17	10	21	18	12	30	8	10	
11	Kaltim	10	7	4	2	2	25	2	5	10	
12	NTT	25	8	15	24	28	15	9	23	12	
13	Jateng	14	11	6	12	25	11	10	13	13	
14	Sultra	5	21	21	5	15	32	7	3	14	
15	Sulsel	22	16	30	18	27	21	11	6	15	
16	Kalteng	30	13	7	27	23	26	32	24	16	
17	Kalsel	31	18	27	23	17	23	19	32	17	
18	NAD	17		18	13	33	18	4	20	18	
19	Sulteng	28	28	13	22	12	33	28	24	19	
20	Sumbar	26	27	22	16	4	27	14	9	20	
21	Sulut	21	31	25	14	10	13	29	26	20	
22	Pabar			9	32	14	16	13	4	22	
23	Jambi	17	19	8	8	5	9	24	14	23	
24	Sumut	9	20	20	15	6	10	22	16	24	
25	Maluku	32	23	23	25	19	4	18	33	25	
26	Kalbar	19	10	18	26	21	22	12	18	26	
27	Papua	33	33	32	17	32	28	33	15	27	
28	Bali	11	25	12	11	13	7	31	31	28	
29	Jabar	23	26	26	28	11	17	15	21	29	
30	Kep. Riau		6	3	3	8	5	3	1	30	
31	Banten	8	29	15	19	29	30	27	29	31	
32	Sulbar			28	33	3	24	23	16	32	
33	Riau	20	12	5	9	9	20	17	12	33	

Sumber: Lampiran 23

**Lampiran 25. Hasil Simulasi Dampak Kenaikan Pendapatan Rumah tangga Kelas Menengah Kriteria World Bank Sebesar 20 persen dari Baseline terhadap Pertumbuhan Sektor Ekonomi (Tahun Dasar 2012)**

No	Sektor	Pertumbuhan (%)	No	Sektor	Pertumbuhan (%)
1	Teh	33.4475	34	Sayur-sayuran dan buah-buahan	0.3299
2	Tanaman bahan makanan lainnya	25.6313	35	Penambangan dan penggalian lainnya	0.3283
3	Tembakau	13.8216	36	Komunikasi	0.2662
4	Kegiatan yang tak jelas batasannya	10.7908	37	Padi	0.2454
5	Angkutan kereta api	6.3064	38	Industri penggilingan padi	0.2418
6	Tanaman kacang-kacangan	4.2512	39	Jasa lainnya	0.2390
7	Tebu	3.5977	40	Angkutan air	0.2367
8	Hasil hutan lainnya	3.5196	41	Angkutan darat	0.2222
9	Industri minuman	2.5583	42	Industri kimia	0.2186
10	Kelapa	2.4412	43	Usaha bangunan dan jasa perusahaan	0.2160
11	Tanaman lainnya	2.2743	44	Industri barang karet dan plastik	0.1873
12	Industri gula	2.1717	45	Industri alat pengangkutan dan perbaikannya	0.1866
13	Tanaman umbi-umbian	1.7910	46	Industri kertas, barang dari kertas dan karton	0.1787
14	Industri pupuk dan pestisida	1.1500	47	Karet	0.1762
15	Peternakan	1.0314	48	Pengilangan minyak bumi	0.1636
16	Jagung	0.8780	49	Penambangan minyak, gas dan panas bumi	0.1613
17	Industri barang lain yang belum digolongkan dimanapun	0.7050	50	Industri bambu, kayu dan rotan	0.1571
18	Tanaman perkebunan lainnya	0.6633	51	Hasil tanaman serat	0.1358
19	Industri tepung, segala jenis	0.5691	52	Restoran dan hotel	0.1345
20	Unggas dan hasil-hasilnya	0.5677	53	Perdagangan	0.1226
21	Angkutan udara	0.5552	54	Industri tekstil, pakaian dan kulit	0.1154
22	Kopi	0.5550	55	Kelapa sawit	0.0997

23	Pemotongan hewan	0.5531	56	Industri barang dari logam	0.0933
24	Kayu	0.5425	57	Industri pemintalan	0.0922
25	Jasa penunjang angkutan	0.5321	58	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik	0.0820
26	Listrik, gas dan air bersih	0.5194	59	Industri minyak dan lemak	0.0781
27	Industri makanan lainnya	0.4855	60	Jasa sosial kemasyarakatan	0.0650
28	Cengkeh	0.4703	61	Penambangan batubara dan bijih logam	0.0586
29	Industri rokok	0.3703	62	Industri dasar besi dan baja	0.0527
30	Perikanan	0.3600	63	Industri semen	0.0280
31	Industri pengolahan dan pengawetan makanan	0.3449	64	Bangunan	0.0220
32	Industri barang-barang dari mineral bukan logam	0.3403	65	Pemerintahan umum dan pertahanan	0.0184
33	Lembaga keuangan	0.3318	66	Industri logam dasar bukan besi	0.0165

Sumber: Hasil Simulasi I-O

# DAFTAR INDEKS

<b>A</b>	absolut, 9 Adil, 1	ekspor, 2, 12, 47, 53 ekspor Indonesia, 3
<b>B</b>	Bank Indonesia, 3 barang, 4, 12, 14, 17, 19, 20, 89, 90 bisnis, 4 bonus demografi, 5, 6, 54 BPS, 2	<b>F</b> fluktuasi, 14, 27 <i>forecasting</i> , 12, 17, 24
<b>C</b>	cekung, 11, 21	<b>G</b> Gaya konsumsi, 4 golongan, 4
<b>D</b>	dalam negeri, 4, 12 Data, 16, 19, 23, 29, 33, 37, 38, 40, 43, 45 daya beli, 3, 4, 30, 31, 32 defisit, 3 diagonal, 11, 21, 22 distribusi pendapatan, 5, 11, 18, 20, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 52 domestik, 4, 14 dunia, 2, 27	<b>H</b> hasil kajian, 1, 54 historis, 12 horizontal, 10, 20
<b>E</b>	Ekonomi, ii, 1, 2, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 89	<b>I</b> ilustrasi, 27 Indeks Gini, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 64, 65, 66, 67, 76, 77, 86, 88 individu, 11, 17, 19, 21, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 48, 51 Indonesia, i, ii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 51, 52, 54, 56, 57 industry, 25 Inequality, 56 investasi, i, 5, 12, 47, 53, 54

## J

jasa, 4, 12, 17, 19, 20, 89  
Jenis Kemiskinan, 8  
jurnal, 7

## K

kajian, i, 4, 9, 53, 54  
kecenderungan, 19, 26, 36, 37  
kekayaan, 8  
kelas menengah, i, 3, 4, 5, 6, 8, 9,  
10, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 25, 26,  
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46,  
47, 48, 51, 52, 53, 54  
kelas menengah terkecil, 33  
kemiskinan, i, 1, 4, 5, 6, 8, 10, 14  
kesejahteraan, 1, 3, 5, 6  
Ketidakmerataan, 21  
ketimpangan, 5, 17, 20, 25, 31,  
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  
44, 52, 53  
ketimpangan nasional, 37, 52  
koefisien, 11, 17, 21, 22, 23  
Koefisien Gini, 20, 21  
komoditas, 2  
komoditas utama dunia, 3  
kompetitif, i, 5  
konsumtif, 4  
kontribusi, 2, 14, 23, 47  
Krisis, 2  
Krisis global, 2  
kriteria, 4, 12, 17, 25, 29, 31, 32,  
33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44,  
47, 48, 51, 52, 53  
kurs, 27, 48  
kurva, 10, 11, 17, 20, 21, 35  
Kurva Lorenz, 10, 18, 20, 21

## L

lapangan kerja, i, 5  
low middle class, 9

## M

Maju, 1  
Makmur, 1  
makro ekonomi, 17  
Mandiri, 1  
manusia, i, 4, 5  
Masyarakat, i, 1  
matriks, 12, 13, 22  
metode, 12, 23, 24  
multiplier, 13, 22

## N

Nasional, 1, 29  
negara maju, 1, 2, 10  
nilai nominal rupiah, 26  
nilai tukar rupiah, 2, 28  
nilai-nilai, i, 5

## O

observasi, 27, 30, 32, 34, 37

## P

pasar, 3, 4  
pasar impor, 4  
Pembangunan, 1, 57  
pembangunan ekonomi, i, 54  
Pemerataan, 20  
pendapatan masyarakat., 3  
pendapatan nasional, 18, 19, 41  
Pendapatan Rata-rata, 21  
pendapatan tinggi, 10, 17, 20, 26,  
33, 44, 52  
pendidikan, 3, 5, 8, 13, 14, 54  
penduduk Indonesia, 3  
Peneliti, 9  
Penelitian, i, 6, 13, 16, 18, 19, 60,  
61, 62, 63, 66, 67, 68, 71, 74, 76,  
77, 79, 82, 84, 87  
pengeluaran, 2, 9, 10, 14, 16, 17,  
19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33,

34, 35, 38, 40, 46, 47, 48, 52, 53,  
54, 69, 72, 75, 80, 83, 85  
Pengertian Kemiskinan, 9  
penggerak pertumbuhan, 4  
pengurangan kemiskinan, 5  
peningkatan, i, 1, 3, 4, 5, 14, 26,  
29, 32, 40, 48, 52  
penjualan, 3  
per kapita, 1, 9, 10, 14, 25, 36  
peran, i, 1, 3, 6, 7, 13, 23, 28  
Percepatan, 1, 57  
perekonomian, i, 1, 2, 4, 5, 6, 12,  
17, 20, 23, 27, 46, 51  
permintaan luar negeri, 2  
*persen*, 2, 4, 8, 11, 14, 17, 20, 21,  
25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40,  
41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52,  
53, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77,  
89  
persentase, 11, 14, 29, 30, 35, 38  
pertumbuhan, i, 1, 2, 4, 5, 13, 14,  
17, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 40, 42,  
46, 47, 48, 49, 52, 53  
pertumbuhan ekonomi, 1, 5, 6, 13,  
40, 47, 48, 53  
prestise, 8, 13  
Produk Domestik Bruto, 17, 46  
proporsi, 20, 28  
provinsi, 7, 18, 29, 30, 31, 32, 33,  
34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43,  
51, 52

## R

rasio, 11, 21, 28, 46  
rata-rata, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 26, 27,  
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38,  
44, 48, 51, 52, 73, 85  
relatif, 3, 5, 6, 9, 14, 27, 28, 32, 37,  
38, 39, 40, 41, 43, 47, 53

Rencana Pembangunan Jangka  
Panjang, 1  
rumah tangga, 2, 5, 9, 17, 19, 26,  
46, 47  
rumah tangga, 9, 14, 16, 17, 19,  
20, 26, 27, 46, 47, 48, 53

## S

sektor produksi, 12  
sektor swasta, 2, 5, 14  
seluruh masyarakat, i, 5  
signifikan, 32  
siklus, 5  
Simulasi, 22, 46, 47, 48, 49, 50, 53,  
89, 90  
social, 1, 4  
stabil, 3, 9  
stabilitas, i, 1, 4, 40  
statistik, 12, 23  
suatu negara, i, 5

## T

teknik, 12, 23  
terkoreksi, 2, 4  
Tingkat konsumsi, 17, 54  
transaksi berjalan, 3  
transaksi modal, 3

## U

Undang-Undang No. 17 tahun  
2007, 1  
upper middle income countries,  
4

## V

variabel, 16, 23, 24, 47, 54  
visi, 1

# Peran Kelas Menengah Pada Perekonomian Indonesia

Buku ini menggambarkan profil dan peran kelas menengah di Indonesia terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan sektor ekonomi/industri. Kelas menengah telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan perekonomian, stabilitas sosial ekonomi, peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, dan banyak lainnya. Berbagai kajian dan bukti empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan kelas menengah dikaitkan dengan pemerintahan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Kelas menengah semakin dianggap sebagai prasyarat terjadinya stabilitas pada struktur sosial ekonomi suatu negara. Tiga alasan untuk mempertimbangkan bahwa kelas menengah penting bagi perekonomian, yaitu: (1) pengusaha baru, muncul dari kelas menengah yang menciptakan lapangan kerja dan kesempatan pertumbuhan untuk seluruh masyarakat, (2) kelas menengah dengan nilai-nilai yang kuat menekankan pada akumulasi modal manusia dan tabungan, (3) kelas menengah bersedia membayar sedikit tambahan untuk kualitas, dengan demikian akan mendorong investasi dalam produksi dengan kualitas yang lebih baik dan pemasaran yang kompetitif, yang memacu tingkat produksi yang lebih tinggi dan mengarah ke peningkatan pendapatan untuk semua orang.

UNIMED  
THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

ISBN 978-623-83261-3-5 (PDF)



9 786239 326135

Diterbitkan Oleh  
The Higher Education Press Klasmen 4/3, Sinduharjo,  
Kec. Ngaglik Kab. Sleman. D.I. Yogyakarta